

MILIK PERPUSTAKAAN  
UNIV. NEGERI PADANG

## LAPORAN PENELITIAN



MILIK PERPUSTAKAAN UNIV. NEGERI PADANG  
DITERIMA TGL. : 31 Des 2004  
SUMBER/HARGA. Hadiah /  
KOLEKSI : F1  
NO. INVENTARIS : 1016 / K / 2004 - 5.1 (1)  
KLASIFIKASI : 374.0072 STU - 80

**STUDI LANJUTAN  
ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN BERWAWASAN  
GENDER DALAM RANGKA PENYUSUNAN KEBIJAKAN  
PENDIDIKAN BERWAWASAN GENDER  
DI SUMATRA BARAT**

Oleh

Dr. Indrati Kusumaningrum, MPd.

Dra. Fatmariza, M.Hum.

Dr. Maizuar, M.Pd.

Dra. Djusmaini Djamas, M.Si.

Dra. Farida Welly, MLS.

**PUSAT STUDI WANITA  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2004**

## **PERSONALIA PENELITI**

**Studi Analisis Kebijakan Pendidikan Berwawasan Gender  
dalam rangka Penyusunan Kebijakan Pendidikan  
Berwawasan Gender di Sumatra Barat**

**Ketua : Dr. Indrati Kusumaningrum, MPd.**

**Anggota**

- 1. Dra. Fatmariza, M.Hum.**
- 2. Dr. Maizuar, MPd.**
- 3. Dra. Djusmaini Djamas, MSi.**
- 4. Dra. Farida Welly, MLS.**

**Kerjasama  
Pusat Studi Wanita Universitas Negeri Padang  
dengan  
Departemen Pendidikan Nasional  
Direktorat Jenderal PLS dan Pemuda  
Proyek Peningkatan Peran Masyarakat dan Pemampuan  
Kelembagaan Pengarusutamaan Gender  
No : 06/PK/PPMPUG/2004 tanggal 17 Juni 2004**

## Kata Pengantar

Puji Syukur ke Hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa kami panjatkan, yang telah melimpahkan RahmatNYA, sehingga laporan ini dapat diselesaikan. Penelitian berjudul "*Studi Lanjutan Analisis Kebijakan Pendidikan Berwawasan Gender Dalam Rangka Penyusunan Kebijakan Berwawasan Gender di Sumatera Barat*" dilaksanakan di provinsi Sumatera Barat pada 19 kabupaten/kota. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui permasalahan gender dalam bidang pendidikan di daerah Sumatera Barat.

Dengan selesainya penelitian ini, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda, Departemen Pendidikan Nasional;
2. Direktorat Pendidikan Masyarakat Departemen Pendidikan Nasional;
3. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
4. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat
5. Badan Pusat Statistik Sumatera Barat
6. BAPPEDA provinsi Sumatera Barat
7. Biro Pemberdayaan Perempuan provinsi Sumatera Barat
8. Semua pihak-pihak terkait yang telah membantu penelitian ini namun tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Segala daya dan upaya sudah dilakukan seoptimal mungkin, namun disadari masih banyak kekurangan. Oleh karena itu saran guna perbaikan akan diterima dengan senang hati disertai ucapan terima kasih. Harapan kami semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi siapapun, terutama para pemerhati persoalan pengembangan peran gender serta para pengambil keputusan di provinsi Sumatera Barat.

Padang, Desember 2004

Tim Peneliti PSW-UNP

## DAFTAR ISI

ANGGOTA PENELITI	i
PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan	8
D. Pentingnya Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	<b>11</b>
A. Gender Sebagai Konstruksi Budaya	11
B. Urgensi Kebijakan Pendidikan yang Berperspektif Gender	12
C. Perempuan dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau	18
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian	20
B. Subyek dan Lokasi Penelitian	20
C. Teknik dan Alat Pengumpul Data	21
D. Analisis data	22
<b>BAB IV ANALISIS PROGRAM PENDIDIKAN SUMATRA BARAT</b>	
A. Kebijakan Pembangunan Pendidikan.	24
B. Data Pembuka Wawasan	29
C. Kesenjangan Gender : Pendalaman Kasus Padang dan Kabupaten Agam	84
D. Isu-Isu Kebijakan Gender	107
<b>BAB V REFORMULASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN YANG RESPONSIF GENDER DI SUMATERA BARAT</b>	
A. Kebijakan Pendidikan yang Responsif Gender	109
B. Rencana Aksi Pembangunan Pendidikan yang Responsif Gender	110
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>114</b>
<b>LAMPIRAN</b>	<b>116</b>



## DAFTAR TABEL

ABEL	Hal.
1. APS, APK, APM SD/MI menurut Kabupaten/Kota	4
2. APS, APK, APM SLTP/MTs menurut Kabupaten/Kota	5
3. APS, APK, APM SLTA menurut Kabupaten/Kota	5
4. Persentase penduduk 10-44 buta huruf menurut Jenis Kelamin tahun 2003	6
5. Alat pengumpul data dan teknik pengumpulan data	21
6. Keadaan Penduduk menurut usia sekolah	26
7. Ratio dan Angka Keterlayanan PAUD	54
8. Penduduk 10 tahun ke atas kemampuan bacatulis	56
9. Penduduk 10 tahun ke atas melek huruf	56
10. Program Paket A dan B	57
11. Penduduk bekerja dan tingkat kesempatan kerja	58
12. Data Pokok Program Kejar Usaha	59

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	hlm.
1. APS menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin Desa-Kota	116
2. APM menurut jenjang pendidikan	117
3. APK menurut jenjang pendidikan	118
4. Indeks Paritas dan Disparitas menurut jenjang pendidikan	119
5. Angka Buta aksara penduduk 10 tahun ke atas	120
6. Tingkat Keragaman Akses terhadap Pendidikan Anak	121
7. APK,APM,APS penduduk usia 7-12 tahun 2000	122
8. APK,APM,APS penduduk usia 13-15 tahun 2000	123
9. APK,APM,APS penduduk usia 16-18 tahun 2000	124
10. APK,APM,APS penduduk usia 7-12 tahun 2001	125
11. APK,APM,APS penduduk usia 13-15 tahun 2001	126
12. APK,APM,APS penduduk usia 16-18 tahun 2001	127
13. APK,APM,APS penduduk usia 7-12 tahun 2002	128
14. APK,APM,APS penduduk usia 13-15 tahun 2002	129
15. APK,APM,APS penduduk usia 16-18 tahun 2002	130
16. APK,APM,APS penduduk usia 7-12 tahun 2003	131
17. APK,APM,APS penduduk usia 13-15 tahun 2003	132
18. APK,APM,APS penduduk usia 16-18 tahun 2003	133

## BAB I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

*The Beijing Declaration and The Platform for Action 1996 (Gender Education and Development, International Centre of The ILO)* secara tegas menyatakan bahwa : “pendidikan merupakan hak asasi manusia dan alat penting dalam mencapai kesetaraan, perkembangan dan perdamaian. Pendidikan yang tidak diskriminatif akan menguntungkan baik bagi perempuan maupun laki-laki, yang pada gilirannya akan mempermudah terjadinya kesetaraan (*equity*) dalam relasi antara perempuan dan laki-laki dewasa pada masyarakat yang lebih luas”.

Pendapat di atas telah tertuang dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1 : “Setiap warganegara, baik perempuan maupun laki-laki, mendapatkan kesempatan setara untuk mengecap pendidikan”. Hal ini menunjukkan tidak adanya perbedaan antara perempuan dan laki-laki untuk memperoleh akses pada pendidikan yang berkualitas. Selanjutnya diperkuat dengan adanya UU nomor 2 tahun 1989 tentang pendidikan Nasional dalam Bab III pasal 5 yang menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pendidikan, selanjutnya pasal 7 menyatakan : penerimaan seseorang sebagai peserta didik dalam suatu satuan pendidikan diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi, serta dengan tetap mengindahkan kekhususan satuan pendidikan yang bersangkutan.

Sehubungan dengan hal di atas, pendapat Dewey yang dikutip oleh Rajab (2002) menyatakan bahwa pendidikan berfungsi sebagai alat transformasi sosial. Sifat transformasi tersebut dimungkinkan dengan melalui pengajaran di sekolah yang terorganisir, orang dapat mengenal kemampuan dan kekuatan diri sendiri, serta didorong untuk mempertanyakan berbagai asumsi, serta mencari kebenaran. Arah pendidikan menurut Dewey bermaksud untuk mengembangkan potensi yang ada pada

diri manusia seluas-luasnya sehingga mereka mampu berpikir kritis, dan dapat memberikan penilaian sendiri atas berbagai situasi yang dihadapinya. Dan selanjutnya dapat merefleksikan serta menjadikannya sebagai landasan dalam mengintegrasikan diri bahkan ikut membentuk realitas itu sendiri. Dengan kata lain, idealnya pendidikan akan mengarahkan manusia tidak hanya memiliki kemampuan adaptif terhadap lingkungannya, tetapi dapat **merekonstruksi**, dan bahkan **mendekonstruksinya** sehingga memungkinkan manusia hidup dalam tatanan masyarakat demokratis yang menyediakan peluang yang sama bagi setiap orang baik laki-laki maupun perempuan.

Menurut Arivia (2002) persoalannya adalah dalam pelaksanaannya ternyata pendidikan bukanlah sesuatu yang bebas nilai, karena ia merupakan produk atau konstruksi sosial. Terlebih-lebih ada jenis kelamin dalam masyarakat yaitu perempuan yang tidak selalu diuntungkan akibat konstruksi sosial tersebut. Oleh sebab itu sekolah sebagai lembaga pendidikan formal merupakan lembaga sosial yang amat penting dalam membentuk dan kemudian memposisikan individu laki-laki dan perempuan pada golongan dan strata tertentu dalam masyarakat. Kondisi ini pada gilirannya cenderung menjadi penyebab munculnya berbagai bentuk ketidakadilan di dalam keluarga, masyarakat, dan negara terutama terhadap perempuan yang menurut (Fakih,1996) termanifestasikan dalam bentuk marginalisasi, subordinasi, stereotipe, bebankerja ganda, dan kekerasan.

Pemerintah telah mencanangkan Program Wajib Belajar 6 Tahun pada tahun 1984 dan Program Wajib Belajar 9 Tahun pada tahun 1994. Kedua program tersebut secara bertahap telah berhasil memperluas angka partisipasi pada tingkat pendidikan dasar.

Meskipun kebijakan pendidikan di Indonesia tidak membedakan akses menurut jenis kelamin, namun kenyataannya perempuan masih tertinggal dalam menikmati kesempatan belajar. Sebagai contoh, pada tahun 1980 hanya 63% perempuan melek huruf dibandingkan dengan 80% laki-laki. Sepuluh tahun kemudian presentase melek huruf untuk perempuan meningkat menjadi 79% dan laki-laki 90%. Pada tahun 1998, kesenjangan

melek huruf antara laki-laki dan perempuan semakin mengecil (laki-laki=93,4%, dan perempuan=85,5%). Namun jika dilihat dari jumlah, masih terdapat 11,7 juta perempuan yang buta huruf dibandingkan dengan 5,2 juta laki-laki yang buta huruf.

Perbedaan partisipasi antara perempuan dan laki-laki juga dapat dilihat menurut jenjang pendidikan. Sensus penduduk 1990 menunjukkan bahwa terdapat 32% laki-laki lulusan SD, sementara hanya 28% perempuan yang memiliki ijazah SD. Untuk tingkat SLTP, ada sebanyak 12% laki-laki lulusan SLTP dan hanya 9% perempuan lulusan SLTP. Di tingkat Sekolah Menengah (SM), terdapat 12% laki-laki lulusan SM, sementara hanya 8% perempuan lulusan SM. Pada jenjang Perguruan Tinggi (PT), ada 2% laki-laki yang lulus PT dan hanya 1% perempuan lulusan PT (BPS,1992). Pada tahun 1999, terjadi perubahan, penduduk perempuan yang berhasil menamatkan SD sudah mencapai 33,4% sementara laki-laki yang lulus SD hanya mencapai angka 32,5%. Perempuan yang berpendidikan SLTP 13% sedikit lebih rendah dari laki-laki yang berpendidikan sama yaitu 15%. Penduduk perempuan yang berpendidikan SM sebesar 11,4% dan lebih rendah dari laki-laki yang berpendidikan sama yaitu 15,7%. Sementara penduduk perempuan berpendidikan sarjana sudah mencapai 2,1% masih lebih rendah dari laki-laki yaitu 3,2%.

Ketidak setaraan gender juga terlihat dari angka partisipasi, berdasarkan kelompok usia maupun jenjang pendidikan. Pada tahun 1991, APM laki-laki adalah 84%, sedikit lebih tinggi dari APM perempuan yaitu 83%. Pada tahun 1997, APM perempuan di tingkat SD sebesar 92,8%, lebih rendah dari APM laki-laki yaitu sebesar 97,1% (Pusat Informatik, Depdiknas, 1998). Pada tahun 1997, APM laki-laki di SLTP adalah 57,11% dan 54,7% untuk perempuan. APM laki-laki di tingkat SM adalah 30% laki-laki dan 29,8% untuk perempuan.

Di Sumatera Barat, khususnya dalam tatanan sosial budaya masyarakat Minangkabau yang matrilineal, menempatkan perempuan pada posisi yang tinggi dan terhormat yang terkenal dengan filosofi "*Bundo Kanduang*". Namun sejauh ini beberapa hasil penelitian menyimpulkan

bahwa dalam banyak hal, peran dan posisi perempuan Sumatera Barat masih tidak jauh berbeda dengan permasalahan perempuan di daerah lain. Penelitian tersebut antara lain dilakukan oleh Fatmariza dkk (2002) tentang partisipasi perempuan dalam pembangunan nagari di Sumatera Barat; Suasti (2000) tentang pekerja perempuan pada industri bordiran; Alrafni (2002) tentang sikap politik perempuan. Demikian juga hasil laporan BPS dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan tahun 2002, dinyatakan bahwa di Sumatera Barat masih terdapat ketimpangan antara penduduk perempuan dengan penduduk laki-laki

Pada tahun 2001/2002 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI mencapai 90,53% (termasuk paket A) dan 90,10% (tidak termasuk paket A), tingkat SLTP/MTs 68,92% (termasuk paket B) dan 68,06% (tidak termasuk paket B), tingkat SM/MA 40,23%. Angka untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi ke SLTP/MTs 96,64%, untuk ke SM/MA 57,41% (Diknas Prop.Sumbar,2001). Dari data ini terlihat bahwa sebagian besar siswa tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dan mereka mempunyai peluang untuk mengikuti pendidikan melalui program paket A,B dan C. Menurut data dokumentasi dari BPS, Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) menurut jenjang pendidikan di Sumatera Barat pada tahun 2003 dapat dilihat pada tabel – tabel berikut :

**Tabel 1. APS,APK dan APM SD/MI Menurut Kabupaten/Kota**

No	Kab/Kota	APS		APK		APM	
		LK	PR	LK	PR	LK	PR
1	Kab Kep Mentawai	98.80	98.64	113.58	114.77	97.01	96.60
2	Kab Pesisir Selatan	94.95	97.30	107.87	105.22	90.40	90.99
3	Kab Solok	94.77	96.71	110.67	108.18	92.31	94.36
4	Kab Swi Sijunjung	96.92	95.04	106.31	104.51	92.92	91.48
5	Kab Tanah Datar	96.20	98.61	105.70	102.78	93.04	95.14
6	Kab Padang Pariaman	95.17	93.66	101.24	101.72	90.21	86.72
7	Kab Agam	95.43	97.61	99.65	101.72	92.53	93.64
8	Kab Lima Puluh Kota	96.54	97.34	101.74	102.66	91.70	94.02
9	Kab Pasaman	98.42	99.09	110.49	107.81	97.43	97.51
10	Kota Padang	97.51	98.16	107.07	102.33	89.92	91.46
11	Kota Solok	94.86	98.08	105.36	107.69	91.11	92.31
12	Kota Sawahlunto	98.49	99.21	110.21	103.85	91.82	91.06
13	Kota Padang Panjang	98.7	96.44	99.05	106.96	90.43	92.01
14	Kota Bukittinggi	97.40	100	99.10	105.25	87.03	92.01
15	Kota Payakumbuh	98.62	99.26	96.08	106.13	88.85	92.38
<b>TOTAL</b>		<b>96.52</b>	<b>97.38</b>	<b>105.79</b>	<b>104.66</b>	<b>92.22</b>	<b>92.98</b>

Sumber : Data Susenas 2003 BPS Propinsi Sumatera Barat .

**Tabel 2. APS, APK dan APM SLTP/MTs menurut Kabupaten/Kota**

No	Kab/Kota	APS		APK		APM	
		LK	PR	LK	PR	LK	PR
1	Kab Kep Mentawai	96.10	98.23	102.45	92.75	69.17	61.21
2	Kab Pesisir Selatan	83.52	92.99	94.63	90.29	66.11	73.61
3	Kab Solok	79.28	88.77	63.83	80.04	48.39	58.95
4	Kab Swi Sijunjung	65.81	78.87	65.11	74.80	46.06	60.22
5	Kab Tanah Datar	87.34	93.64	82.26	103.15	73.40	82.53
6	Kab Padang Pariaman	86.53	82.33	85.93	84.46	64.06	57.93
7	Kab Agam	93.09	84.72	97.33	99.61	79.64	69.99
8	Kab Lima Puluh Kota	73.38	92.63	76.56	92.63	50.79	69.51
9	Kab Pasaman	83.12	84.44	77.47	82.23	62.61	66.12
10	Kota Padang	94.41	94.60	106.84	102.63	75.11	74.01
11	Kota Solok	80.72	91.88	75.33	98.87	59.54	76.77
12	Kota Sawahlunto	88.80	91.23	99.11	97.63	64.89	70.20
13	Kota Padang Panjang	95.91	100	109.96	91.41	77.22	71.53
14	Kota Bukittinggi	87.74	95.54	94.71	95.54	68.36	64.41
15	Kota Payakumbuh	91.94	95.90	103.11	92.75	67.58	75.88
<b>TOTAL</b>		<b>84.78</b>	<b>88.81</b>	<b>85.82</b>	<b>90.09</b>	<b>64.21</b>	<b>67.96</b>

Sumber : Data Susenas 2003 BPS Propinsi Sumatera Barat .

**Tabel 3. APS,APK dan APM SLTA Menurut Kabupaten/Kota**

No	Kab/Kota	APS		APK		APM	
		LK	PR	LK	PR	LK	PR
1	Kab Kep Mentawai	56.61	51.77	43.03	37.19	29.56	27.81
2	Kab Pesisir Selatan	58.42	68.32	47.72	72.11	38.89	61.31
3	Kab Solok	41.41	64.16	39.90	59.05	30.68	46.78
4	Kab Swi Sijunjung	41.88	42.53	38.86	36.06	31.71	31.19
5	Kab Tanah Datar	56.25	74.02	68.77	72.71	53.13	63.63
6	Kab Padang Pariaman	58.73	67.72	62.48	72.05	44.72	53.59
7	Kab Agam	61.63	78.08	71.79	68.26	49.34	59.22
8	Kab Lima Puluh Kota	55.37	48.70	49.26	50.41	40.01	36.74
9	Kab Pasaman	44.05	45.73	40.15	44.39	31.20	34.03
10	Kota Padang	78.85	87.34	77.32	93.94	63.11	73.19
11	Kota Solok	67.54	85.17	81.61	88.91	59.72	76.38
12	Kota Sawahlunto	64.20	78.93	65.51	91.72	43.98	68.64
13	Kota Padang Panjang	80.47	89.15	104.75	111.65	71.11	73.90
14	Kota Bukittinggi	81.69	85.14	105.21	95.99	73.35	70.25
15	Kota Payakumbuh	73.39	72.75	86.94	90.80	61.30	66.45
<b>TOTAL</b>		<b>58.22</b>	<b>68.21</b>	<b>58.46</b>	<b>69.37</b>	<b>44.82</b>	<b>54.92</b>

Sumber : Data Susenas 2003 BPS Propinsi Sumatera Barat .

Dari tabel di atas terlihat bahwa APS (Angka Partisipasi Sekolah) di Sumatera Barat, penduduk perempuan pada tahun 2003 untuk semua jenjang pendidikan ternyata lebih tinggi dibanding laki-laki.

Selanjutnya jumlah penduduk yang masih buta huruf di beberapa kota di Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini:

**Tabel 4. Persentase Penduduk berumur 10 – 44 tahun yang Buta Huruf menurut Jenis kelamin tahun 2003.**

	Kabupaten Kota	Usia 10 - 44			Usia 7 - 24		
		LK	PR	Rata2	LK	PR	Rata2
1	Kab Kep Mentawai	5,97	9,34	7,66	7,53	9,15	8,34
2	Kab Pesisir Selatan	3,29	7,45	5,37	4,74	3,86	4,30
3	Kab Solok	2,77	4,61	3,69	4,53	5,77	5,15
4	Kab Swl Sijunjung	8,04	15,00	11,52	8,75	5,01	6,88
5	Kab Tanah Datar	3,23	4,84	4,04	2,70	1,40	2,05
6	Kab Padang Pariaman	3,62	7,53	5,58	4,29	1,17	2,73
7	Kab Agam	2,43	5,47	3,95	2,61	2,77	2,69
8	Kab Lima Puluh Kota	1,66	2,99	2,33	2,05	1,72	1,89
9	Kab Pasaman	4,04	7,04	5,54	10,98	6,30	8,64
10	Kota Padang	1,02	2,18	1,60	1,95	0,46	1,21
11	Kota Solok	1,33	3,23	2,28	2,04	1,97	2,01
12	Kota Sawahlunto	2,10	4,10	3,10	2,35	1,44	1,90
13	Kota Padang Panjang	0,46	2,23	1,35	0,96	0,00	0,96
14	Kota Bukittinggi	0,73	2,68	1,71	0,97	1,29	1,61
15	Kota Payakumbuh	2,23	4,10	3,17	1,96	0,90	1,43
	<b>Sumatera Barat</b>			<b>6,29</b>			<b>5,18</b>

Sumber : Data Susenas 2003 – HPS-Sumbar

Dari data di atas terlihat bahwa penduduk pada usia sekolah (7-24 tahun), lebih banyak laki-laki yang mengalami buta huruf dibandingkan perempuan. Oleh sebab itu seharusnya sasaran pendidikan harus lebih ditekankan pada penduduk laki-laki, terutama melalui pendidikan non formal baik paket A, B maupun paket C, sedangkan pada penduduk berusia 24 tahun ke atas, keadaan buta huruf lebih banyak dijumpai pada penduduk perempuan.

Dari uraian terdahulu dijumpai sejumlah faktor yang mempengaruhi kesenjangan gender dalam praktek pendidikan yang relatif tidak berubah sejak 1970 an. Salah satu faktor utama adalah faktor sosial budaya yang sangat sulit untuk dirubah dalam waktu yang singkat. Untuk itu diperlukan studi kebijakan yang bertujuan untuk mengungkap sebab terjadinya kesenjangan, dan merumuskan upaya sistematis guna mengurangi kesenjangan gender yang ada.

Data penelitian tahun 2003 yang dilakukan oleh PSW-UNP, telah diperoleh profil sementara provinsi Sumbar yang berasal dari 9 kabupaten/kota dijumpai data proporsi siswa laki-laki lebih banyak dibanding siswa perempuan di semua tingkatan kelas kecuali di kelas 6. Demikian juga dengan proporsi mengulang kelas dan proporsi putus sekolah laki-laki relatif lebih banyak dibandingkan dengan siswa perempuan. Data



yang ditemukan menggambarkan bahwa secara proporsional, jumlah siswa laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan siswa perempuan. Akan tetapi, mengulang kelas dan putus sekolah tetap proporsinya lebih banyak dialami oleh siswa laki-laki di semua tingkatan kelas.

Untuk tingkatan SMA / MA juga menunjukkan bahwa proporsi siswa laki-laki lebih kecil dari siswa perempuan, sedangkan mengulang kelas dan putus sekolah relatif banyak dialami oleh laki-laki. Berbeda dengan profil SMA/MA, proporsi siswa laki-laki di SMK jauh lebih besar dari siswa perempuan. Hal ini lebih banyak disebabkan oleh SMK yang ada juga lebih banyak yang bersifat SMK teknologi. Selanjutnya mengulang kelas dan putus sekolah relatif banyak dialami oleh laki-laki.

Mutu pendidikan juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan guru, karena melalui pendidikan guru yang lebih baik atau memenuhi standar minimal yang disyaratkan akan mempengaruhi profesionalitas guru yang secara langsung bertanggungjawab mentransfer nilai-nilai pendidikan kepada siswa. Untuk standar minimal pendidikan guru SD/MI adalah D-II Keguruan ke atas yang pada tahun 2002 tercatat 67,21%, artinya lebih dari separoh guru SD/MI secara akademis layak untuk mengajar. Semi layak artinya dengan tingkat pendidikan D-II non Keguruan ke atas 30,41% dan tidak layak dengan tingkat pendidikan di bawah D-II sebanyak 2,38%.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah dan data pembuka wawasan terlihat bahwa pada sekolah-sekolah di Sumbar pada semua jenjang dan jalur pendidikan telah terjadi kesenjangan gender, terutama dalam hal tinggal kelas dan putus sekolah. Data tersebut merupakan hasil sementara karena baru mengungkap data di 9 kabupaten/kota di Sumatera Barat. Kebijakan pendidikan yang adil gender perlu dilakukan dengan menggunakan metoda yang tepat. Untuk itu perlu dirumuskan upaya sistematis guna mengurangi kesenjangan gender yang ada

### **C. Tujuan**

1. Secara umum studi ini bertujuan untuk melengkapi hasil studi terdahulu dengan mengumpulkan dan menganalisis data pendidikan yang terpilah di semua kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat, dengan mempergunakan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Policy Outlook and Plan of Action (POP). Sasaran akhir adalah melengkapi profil pendidikan yang responsif gender di seluruh kabupaten/kota provinsi Sumbar
2. Secara khusus, studi ini bertujuan untuk melakukan kajian mendalam tentang penyebab terjadinya kesenjangan gender bidang pendidikan, dengan mempergunakan pendekatan kualitatif. Kajian terhadap tiga isu yang terkait erat dengan adanya ketimpangan gender, yaitu : akses terhadap semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan; mutu dan efisiensi pendidikan; serta penjurusan dan program studi.

### **D. Pentingnya Penelitian**

Untuk mengatasi rendahnya kualitas sumber daya yang ada, perlu diupayakan program-program antara lain: "Pengembangan kebijakan pendidikan yang berperspektif gender ". Hal ini harus direalisasikan dengan memberi kesempatan yang sama kepada warga negara baik laki-laki maupun perempuan untuk berpartisipasi di semua jenjang dan jenis pendidikan, tanpa terkecuali. Sejalan dengan ekspansi pendidikan yang melanda masyarakat dunia sejak awal abad yang lalu, maka angka partisipasi perempuan dalam segala jenjang dan jenis pendidikanpun meningkat dengan pesat pula, baik angka absolutnya maupun proporsi perempuan dibandingkan laki-laki. Meskipun demikian hingga kini kesenjangan kesempatan pendidikan antara laki-laki dan perempuan tetap menandai dunia pendidikan .

Sesuai dengan konsep gender terungkap bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai hak dan kewajiban yang sama kecuali yang bersifat

kodrati. Aplikasi dari konsep gender ini perlu dipahami oleh masyarakat luas, baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, besar maupun anak kecil. Namun dalam masyarakat tertentu dapat dijumpai nilai, aturan agama ataupun adat kebiasaan yang tidak mendukung dan bahkan melarang keikutsertaan anak perempuan dalam pendidikan formal (Sunarto,2000,116)

Untuk mengatasi kendala dalam memasyarakatkan konsep gender ini ditengah-tengah masyarakat telah dilakukan upaya, baik melalui media massa, media elektronik dan organisasi masyarakat. Namun usaha ini belum membuahkan hasil secara maksimal. Untuk itu perlu dilakukan pembenahan yang mendasar, dengan arti kata memasukkan/memasyarakatkan konsep gender ini melalui pendidikan seperti yang dicanangkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan RI. Namun, kenyataannya APS penduduk perempuan masih lebih rendah dari laki-laki, penduduk yang buta huruf dari tahun ke tahun menunjukkan penurunan, namun penduduk perempuan yang buta huruf masih lebih tinggi dari laki-laki, persentase penduduk perempuan yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi masih rendah dibandingkan dengan laki-laki serta masih ditemukan pada program studi tertentu terlihat kesenjangan gender yang menonjol.

Banyak aspek yang mempengaruhi anak dalam menjalani pendidikan di sekolah baik yang bersifat intern maupun ekstern. Pengaruh ekstern diantaranya, latar belakang pendidikan orangtua (akan berpengaruh pada bimbingan belajar anak di rumah), pekerjaan orang tua, lingkungan bermain anak dan lingkungan pemukimannya, jarak antara rumah dengan sekolah, fasilitas belajar baik di rumah maupun di sekolah. Demikian juga dengan pengaruh sosial ekonomi serta budaya yang ikut berperan serta dalam kesenjangan gender yang terjadi di Sumbar.

Studi yang dilaksanakan adalah untuk melengkapi kegiatan analisis kebijakan pendidikan berwawasan gender dengan menggunakan model analisis GAP dan POP yang telah dilakukan pada tahun 2003, dengan menampilkan data terpilah mengenai pendidikan di setiap kabupaten/kota

yang ada di provinsi Sumatera Barat pada semua jenjang dan jalur pendidikan. Artinya, sebagai hasil analisis GAP dan POP, akan disajikan data terpilah menurut jenis kelamin per kabupaten/kota yang belum terungkap pada tahun 2003.

Kondisi di atas mengisyaratkan bahwa penting sekali dilakukan analisis terhadap kebijakan pendidikan, agar dapat dirumuskan suatu kebijakan pendidikan yang responsif gender di masa mendatang.

### **E. Manfaat Penelitian**

Melalui studi ini diharapkan diperoleh :

1. Profil Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Berwawasan Gender berupa data pendidikan yang terpilah (laki-laki dan perempuan) per kabupaten/kota;
2. Hasil analisis tentang penyebab kesenjangan gender pada bidang pendidikan tingkat provinsi, dilihat dari akses, partisipasi,, manfaat, dan kontrol bagi laki-laki dan perempuan;
3. Draft Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender bidang Pendidikan di tingkat provinsi.

## Lampiran I

**KURIKULUM MAGISTER PENDIDIKAN  
KONSENTRASI PENDIDIKAN KEJURUAN  
(50 SKS)**

Struktur Kurikulum Dan Mata Kuliah	SKS	SEMESTER				Dosen
		1	2	3	4	
<b>I. MATA KULIAH UMUM (10 SKS)</b>						
502 Filsafat Ilmu	3			✓		Diatur oleh Pascasarjana UNP
503 Metode Penelitian Kuantitatif	2					
504 Metode Penelitian Kualitatif	2					
505 Statistik	3					
<b>II. DASAR KEAHLIAN (6 SKS)</b>						
506 Pendekatan Sistemdlm. Pendidikan	3					Diatur oleh Pascasarjana UNP
507 Landasan Ilmiah Ilmu Pendidikan	3			✓		
<b>III. MATA KULIAH KEAHLIAN</b>						
<b>A. WAJIB (21 SKS)</b>						
✓ 601 Filsafat dan Landasan Pend. Kejuruan	3	✓				JJ dan AG SL dan AG KM dan CJ JJ dan SL NJ dan MZ AB dan NJ NS dan CJ
✓ 602 Perencanaan Program Pend. Kejuruan	3	✓				
✓ 603 Evaluasi Program dan Kelembagaan	3	✓				
✓ 604 Rancangan PBM Pend. Kejuruan	3	✓				
✓ 605 Pengelolaan Sekolah Kejuruan	3	✓				
✓ 606 Pengembangan Karir (Pre/inservice)	3	✓				
✓ 607 Teknologi Terapan/Tepat Guna	3	✓				
<b>B. PILIHAN (7 SKS)</b>						
701 Internship/Pengalaman Lapangan	3					UA KR SPN NA CJ IK NR NS
702 Aplikasi Komputer	2					
703 Studi Individu Bidang Keahlian	2		✓			
704 Sistem Informasi Pendidikan Kejuruan	2		✓			
705 Kewirausahaan	2		✓			
706 Psikologi Industri	2		✓			
707 Manajemen Industri	2		✓			
708 Perencanaan Ketenagakerjaan	2		✓			
<b>IV. TESIS (6 SKS)</b>						
801 Seminar Proposal Tesis	1					Diatur oleh Tim Dosen Pend. Kejuruan
802 Seminar Hasil Penelitian	1					
803 Tesis	4					
<b>Jumlah 50 Sks</b>						

## Keterangan:

- ❖ Drs. H. Jalius Jama, M.Ed., Ph.D. = JJ
- ❖ Drs. H. Aljufri B., M.Sc. Ed.D. = AB
- ❖ Drs. H. Syahron Lubis, M.Ed., Ph.D. = SL
- ❖ Drs. Agamuddin, M.Ed., Ph.D. = AG
- ❖ DR. Nizwardi Jalinus, M.Ed. = NJ
- ❖ DR. R. Chandra Jalius, M.Pd. = CJ
- ❖ DR. Maizuar, M.Pd. = MZ
- ❖ DR. Nurhasan Syah, M.Pd. = NS
- ❖ DR. Kasman Rukun, M.Pd. = KR
- ❖ DR. Ungsi AOM, M.Ed. = UA
- ❖ DR. Nasrullah Aziz = NA
- ❖ DR. Suparno, M.Pd. = SPN
- ❖ DR. Nasrun = NR
- ❖ DR. Indrati Kusumaningrum, M.Pd. = IK
- ❖ Prof. Drs. H. Kumaidi, M.A., Ph.D. = KM

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Gender Sebagai Konstruksi Budaya

Kebudayaan mencakup bahasan yang amat luas. Koentjaraningrat (1990) secara lebih jelas menyatakan bahwa kebudayaan meliputi keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupannya yang kemudian dijadikan milik bersama melalui proses belajar. Gender merupakan pemilahan peran laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial yang merupakan bagian dari budaya tersebut. Karenanya gender juga mencakup sistem, gagasan, perlakuan, dan bahkan teknologi yang bias gender (Muthali'in, 2001).

Sebagai konstruksi budaya, gender dapat dijumpai pada banyak budaya etnis di Indonesia. Di antaranya dalam budaya Jawa, Sunda, Bali, Minangkabau, Madura, Batak, dan Bugis dengan populasi pendukung budaya yang relatif banyak secara mudah dapat dijumpai konstruksi gender. Dalam budaya etnis tersebut semuanya menempatkan perempuan untuk bekerja di sektor domestik, sementara dominasi sektor publik ada pada pihak laki-laki (Soewondo, 1984).

Menurut Mosser (1989) gender adalah “ perbedaan laki-laki dan perempuan yang dititik beratkan kepada perilaku, harapan, status dan peranan setiap insan laki-laki dan perempuan yang ditentukan oleh struktur sosial dimana ia berada.” Peranan gender timbul akibat perbedaan persepsi masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan yang menentukan bagaimana seorang laki-laki dan perempuan berfikir, bertindak dan berperasaan. Peranan laki-laki dan perempuan diwarnai oleh budaya, norma, dan tata nilai yang berlaku ditengah-tengah masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa status dan peranan laki-laki dan perempuan bila ditinjau dari perspektif gender dapat berubah dari satu masyarakat kemasyarakat lain dan dari satu waktu ke waktu lain.

Perbedaan gender tidak menjadi masalah sejauh tidak melahirkan ketidakadilan gender. Namun, Fakih (1996), seorang analisis sosial, mengemukakan bahwa perbedaan gender ternyata telah menyebabkan munculnya berbagai ketidakadilan gender yang terjadi di dalam keluarga, masyarakat dan negara. Secara umum ketidakadilan gender itu termanifestasikan dalam bentuk marginalisasi, subordinasi, stereotipe, beban kerja, dan kekerasan terhadap perempuan.

Budaya suatu masyarakat atau bangsa disosialisasikan agar generasi penerusnya memiliki cara berpikir, berperasaan, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dianut (Salim, 1999). Dengan demikian, nilai-nilai budaya gender yang berwujud cara berpikir, berperilaku, dan berperasaan yang terdapat dalam budaya nasional juga akan ikut disosialisasikan ketika berlangsungnya sosialisasi kebudayaan nasional yang merupakan wujud dari kebudayaan daerah (etnis) dan agama. Salah satu institusi budaya yang melakukan sosialisasi tersebut adalah sekolah, di samping keluarga dan lingkungan masyarakat.

Sekolah sebagai institusi budaya dalam penyelenggaraan pembelajarannya terikat dengan aturan-aturan pemerintah (penentu kebijakan). Sentralisasi melalui dinas pendidikan (Diknas) baik pusat maupun daerah (propinsi, kabupaten/kota), mewarnai hampir seluruh proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Dengan kata lain, budaya gender sebagaimana yang tercermin dalam realitas masyarakat dan kebijakan negara disosialisasikan melalui proses pembelajaran di sekolah.

## **B. Urgensi Kebijakan Pendidikan yang Berperspektif Gender**

Dalam menghadapi globalisasi dan pasar bebas, bangsa Indonesia harus mau untuk melakukan introspeksi terhadap, keunggulan dan kelemahannya. Sejalan dengan itu perlu dilakukan evaluasi terhadap keadaan pendidikan formal, terkait dengan kualitas hasil pendidikan, jenis dan kualitas keterampilan sumberdaya manusianya. Sumberdaya

manusia di Indonesia, harus dapat dibanggakan dan mampu berkompetisi tanpa membedakan gender.

Ketidakadilan gender ditemui di berbagai bidang kehidupan, di antaranya kesehatan, akses terhadap sumber daya, pendidikan, hak asasi, dan sebagainya. Penyebabnya sangat kompleks, salah satu diantaranya berkaitan dengan proses pengambilan keputusan baik di lingkungan domestik maupun publik.

Keputusan di lingkungan rumah tangga akan mempengaruhi alokasi sumber daya yang dikuasai rumah tangga yang bersangkutan, seperti besarnya pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, dan makanan yang diterima anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan. Proses pengambilan keputusan di dalam rumah tangga sangat kompleks dan dipengaruhi banyak faktor termasuk norma sosial dan budaya.

Dalam lingkup publik, sumber daya dialokasikan melalui berbagai kebijakan publik. Alokasi sumber daya dalam lingkup publik pun terbukti tidak memberikan kesempatan yang sama berdasarkan gender. Alasan yang paling sering dikemukakan adalah karena selama representasi berdasarkan gender dalam badan-badan pengambilan keputusan di level publik tidak seimbang. Pilihan-pilihan dan partisipasi perempuan dalam proses kebijakan sangat terbatas akibat proses sosialisasi yang selama ini menyebabkan perempuan harus melalui banyak rintangan ketika akan memasuki arena politik dan kebijakan.

Pada tahun 2002, Kementerian Pemberdayaan Perempuan bekerjasama dengan Bappenas dan CIDA dalam melakukan Pengarusutamaan Gender di berbagai sektor menunjukkan perkembangan positif karena membangun komitmen penyusunan kebijakan dan 32 program yang responsif gender meliputi bidang ekonomi, politik, pendidikan, dan sosial budaya. Dari sekian jumlah tersebut terbagi ke dalam beberapa sektor, yaitu MA, Depkeh, HAM, Keagungan, Depnakertrans, Deptan, Depkes, Depsos, Depdiknas, dan sebagainya. Hal itu belum maksimal karena masih perlu ditingkatkan



jangkauan kebijakan dan programnya yang dimiliki seluruh lembaga tinggi dan tertinggi negara (Supandi, 2002).

Hal itu disebabkan politik dan kebijakan dipercaya sebagai dunia laki-laki, karenanya banyak perempuan merasa inferior di hadapan laki-laki di dalam arena politik dan kebijakan. Bahkan kadang kala memasuki dunia ini masih dianggap sebagai pelanggaran terhadap "kodrat" perempuan. Dalam praktek di masyarakat, masih banyak ditemukan kebijakan-kebijakan publik yang *gender inequality* atau ketidakadilan gender, khususnya di bidang pendidikan yang akan diungkapkan dalam penelitian ini.

Kebijakan publik adalah arah yang harus dipilih untuk memenuhi kepentingan masyarakat yang didasarkan atas keterbatasan sumber daya di satu pihak dan permasalahan yang mendesak di pihak lain, umumnya kebijakan publik selama ini hanya menguntungkan laki-laki dengan atau tanpa merugikan perempuan. Di lain pihak, ada kebijakan yang memberikan dampak positif lebih besar kepada laki-laki dibandingkan perempuan (Sjaifudian, 1996). Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (pemerintahan, organisasi, pemyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran (Ali 1995: 131).

Kebijakan publik yang berkaitan dengan bidang pendidikan mencakup (1) pendidikan dasar dan prasekolah, (2) pendidikan menengah, (3) pendidikan tinggi, dan (4) pembinaan pendidikan dasar sekolah. Dalam *Propenas 2000-2004* diungkapkan bidang pendidikan tersebut harus responsif gender namun kenyataan masih ditemukan kebijakan-kebijakan yang tidak atau belum responsif gender terutama pada tataran pelaksanaan. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian tentang kebijakan-kebijakan di bidang pendidikan apakah sudah responsif gender ataukah belum. Pengarusutamaan Gender dalam

Pembangunan Nasional ini mengacu Instruksi Presiden RI No.9 tahun 2000.

Semua negara diharapkan dapat mencapai sasaran pendidikan dasar untuk semua orang paling lambat tahun 2015 dengan tahapan (a) menghapus perbedaan gender dalam tingkat pendidikan dasar paling lambat tahun 2005 dan (b) menjamin rasio angka partisipasi murni untuk laki-laki dan perempuan paling rendah 85 persen untuk tahun 2000 dan 90 persen untuk tahun 2010 (Rejeki Sumaryoto,2001).

Pada Konferensi Wanita Sedunia keempat yang diselenggarakan di Beijing 1995, istilah "*Gender Mainstreaming*" tercantum dalam "*Beijing Platform of Action*". Untuk menjadikan kepentingan dan pengalaman perempuan dan laki-laki menjadi dimensi integral dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan penilaian kebijakan-kebijakan dalam program pembangunan dan upaya-upaya untuk mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender maka Pemerintah Indonesia melalui GBHN 1999 menyatakan bahwa Pengarusutamaan Gender merupakan kebijakan nasional yang harus diemban oleh lembaga yang mampu mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender.

Strategi ini sangat penting sehingga pemerintah memandang perlu mengeluarkan Inpres yang selanjutnya dikenal dengan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Pemerintah dapat bekerja lebih efisien dan efektif dalam memproduksi kebijakan-kebijakan publik yang adil dan responsif gender kepada rakyatnya, perempuan dan laki-laki.

Kebijakan PUG yang dilakukan adalah Kebijakan Satu Pintu (*One Door Policy*), peningkatan kualitas SDM perempuan, pemba-haruan hukum dan peraturan perundang-undangan, penghapusan kekerasan terhadap perempuan, penegakan HAM bagi perempuan, pemampuan lembaga pemerintah dalam pemberdayaan perempuan, peningkatan kualitas, peran dan kemandirian organisasi perempuan, peningkatan peran serta masyarakat, perluasan jangkauan pemberdayaan

perempuan, dan peningkatan penerapan komitmen internasional (Rejeki Sumartoyo, 2001).

Dalam Laporan Penelitian Kebijakan Bank Dunia *Pembangunan Berperspektif Gender: melalui Kesetaraan Gender dalam Hak, Sumberdaya, dan Aspirasi* dikemukakan ketidaksetaraan gender merugikan kesehatan dan kesejahteraan laki-laki, perempuan, serta anak-anak. Ketidaksetaraan gender mengurangi peluang mengentaskan kemiskinan dan jaminan kemajuan ekonomi serta dapat melemahkan pemerintah suatu negara yang berakibat pula pada buruknya efektivitas kebijakan pembangunannya.

Berkaitan dengan bidang pendidikan dalam kesempatan Dakar ditetapkan 3 butir yang bertujuan menghapus kesenjangan pendidikan bagi perempuan, yaitu (1) menjamin menjelang tahun 2015 semua anak, khususnya perempuan mempunyai akses menyelesaikan pendidikan dasar dan wajib dengan kualitas yang baik, (2) mencapai perbaikan 50% pada tingkat keniraksaraan orang dewasa menjelang tahun 2015, terutama kaum perempuan dan akses yang adil pada pendidikan dasar dan pendidikan berkelanjutan bagi semua orang dewasa, (3) penghapusan kesenjangan gender pada pendidikan dasar dan menengah pada tahun 2005 dan mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan pada tahun 2015 dengan fokus pada kepastian sepenuhnya bagi anak perempuan terhadap akses dalam memperoleh pendidikan dasar yang bermutu.

Pendidikan sebagai suatu sistem memperoleh masukan dari supra sistem dan memberikan hasil (keluaran) kepada sistem supra sistem. Masukan yang diperoleh dari supra sistem terdiri dari data nilai, cita-cita, dan nama-nama yang terdapat dalam masyarakat. Diperoleh pula dari orang yang akan menjadi siswa atau mahasiswi guru, dosen, personalia lain dalam pendidikan.

Pendidikan merupakan proses transformasi atau perubahan kemampuan potensial individu peserta didik menjadi kemampuan nyata untuk meningkatkan taraf hidupnya lahir dan batin. Sistem pendidikan

374.0072  
STU  
0

1016/E/2004-5.1(1)

nasional Indonesia bertujuan membangun manusia Indonesia yang utuh sebagai komponen utama dalam pembangunan bangsa tanpa membedakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Meskipun dalam sistem pendidikan dan perundangan yang berlaku tidak membedakan pendidikan yang diberikan kepada anak laki-laki dan perempuan namun kenyataannya isu gender di bidang pendidikan masih terjadi perbedaan perlakuan berdasar gender terjadi di lingkungan pendidikan formal. Peran dan banyak keuntungan serta kesempatan yang masih dinikmati laki-laki dibandingkan perempuan, diskriminasi, pelecehan, marginalisasi, dan sebagainya. Proses sosialisasi dan legitimasi peran dan kedudukan perempuan dan laki-laki yang berbeda menyebabkan perempuan secara internal menghadapi berbagai kendala untuk dapat memanfaatkan hak-hak maupun kesempatan yang terbuka bagi dirinya (Sadli, 1994).

Dalam *Buku Data Pokok Pendidikan Tahun 2001/2002 Pemerintahan Propinsi Sumatera Barat Dinas Pendidikan* belum diungkapkan data terpilah berdasarkan gender tentang jumlah siswa SD, SLTP, dan Sekolah Menengah Umum/Kejuruan Propinsi Sumatera Barat tahun 2001/2002 yang berkaitan dengan jumlah siswa mengulang, siswa putus sekolah dan kondisi guru. Demikian juga *dalam Buku Profil Pendidikan Propinsi Sumatera Barat Dinas Pendidikan tahun 2002/2003* serta *tahun 2003/2004*, data yang ditampilkan belum berperspektif gender sehingga belum terungkap secara jelas proporsi perempuan dan laki-laki, baik dalam hal kualitas maupun kuantitasnya di setiap jenjang pendidikan.

Sementara itu, perencanaan strategis Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat tahun 2001-2005 juga belum menggunakan perspektif gender yang berkaitan dengan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatannya. Hal-hal yang diungkapkan dalam perencanaan itu masih terkesan umum atau tidak berfokus pada gender perspektif, misalnya program yang berkaitan dengan peningkatan mutu dan pemerataan

pendidikan, pembinaan guru, pemberian beasiswa tanpa diungkapkan proporsi untuk laki-laki dan perempuan.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan yang berperspektif gender perlu adanya evaluasi-evaluasi terhadap kebijakan, sistem pendidikan, kurikulum, dan Sumberdaya Manusia di lingkungan pendidikan tentang kesenjangan gender di bidang pendidikan untuk diupayakan solusinya.

### C. Perempuan dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau

Berbicara tentang perempuan Minangkabau, ahli-ahli tentang masyarakat Minangkabau dalam tulisannya mengemukakan posisi dan peranan perempuan Minangkabau yang sentral di dalam keluarga. Peranan tersebut tidak hanya terbatas pada pendidikan anak, tetapi juga dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga melalui penguasaan sumber-sumber ekonomi seperti sawah dan ladang.

Beberapa ahli lain berpendapat bahwa kedudukan perempuan Minangkabau dalam masyarakat Minangkabau cukup tinggi. Hal ini sejalan dengan falsafah samo (duduk sama rendah, tegak sama tinggi). Faktor lain yang memperkuat citra dan kedudukan perempuan Minangkabau adalah perhitungan garis keturunan berdasarkan garis Ibu. Di samping itu yang menarik adalah bahwa adat minangkabau secara normatif mengantisipasi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, karena laki-laki secara fisik dianggap lebih kuat. Dalam sistem sosial budaya Minangkabau ditemukan mekanisme antisipatif tersebut dengan memberikan hak penguasaan sumber-sumber ekonomi yang vital seperti sawah, ladang, dan rumah kepada perempuan. Sehingga kekuatan fisik laki-laki diimbangi dengan tidak berhak mereka atas tanah dan rumah. Untuk itu, laki-laki Minangkabau pergi merantau, sebagaimana ungkapan adat (petatah-petitih):

*Karatau madang di hulu  
Babuah babungo balun  
Marantau bujang dahulu  
Di rumah baguno balun*

Dahulunya perempuan Minangkabau mempunyai hak penguasaan hasil dan sumber-sumber ekonomi, karena kekayaan keluarga terdapat pada perempuan, maka perempuan Minangkabau tampil sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab penuh terhadap keluarganya, ia mengasuh dan membesarkan anak-anaknya. Akan tetapi, dalam keluarga yang tidak banyak mempunyai harta pusaka, maka perempuan atau ibu bekerja mencari nafkah keluarga. Kenyataan ini masih terlihat sampai sekarang dalam peranan ibu-ibu di pasar-pasar di Sumatera Barat. Oleh karena itu perempuan menjadi mandiri, dan aktif dalam ekonomi, (Syarifuddin, 1984).

Secara normatif perempuan Minangkabau mempunyai hak penguasaan hasil dari sumber-sumber ekonomi yang vital seperti sawah, ladang, dan rumah. Namun secara empiris citra, kedudukan, dan nasib perempuan Minangkabau terletak pada dikotomi figur Bundo Kanduang, dengan figur Siti Nurbaya, (Bachtiar, 1983). Figur pertama merupakan lambang kekuasaan perempuan, sedangkan figur kedua, mencerminkan ketidakberdayaan perempuan di bawah jaring-jaring kekuasaan laki-laki baik sebagai mamak, bapak, maupun suami.

Oleh karena semakin berkurangnya faktor-faktor pendukung status dan kedudukan perempuan Minangkabau terutama secara ekonomi, maka pendidikan yang berkualitas dan tidak bias gender terutama bagi perempuan menjadi salah satu faktor yang penting sebagai pengganti faktor ekonomi, sosial, dan budaya diberikan oleh adat Minangkabau yang telah mulai hilang. Dengan demikian, ketinggian status dan kedudukan perempuan dalam masyarakat Minangkabau yang matrilineal dapat dipertahankan.

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Dikatakan kualitatif karena dalam penelitian ini akan diungkapkan: pertama faktor-faktor penyebab terjadinya kesenjangan gender (akses, partisipasi, kontrol dan benefit), sedangkan kuantitatif karena akan diungkapkan/ digambarkan mengenai : Pemerataan kesempatan belajar, Kurikulum dan Proses pembelajaran, penjurusan dan program studi ditinjau dari jenis kelamin ( laki-laki dan perempuan).

### B. Subjek dan Lokasi penelitian

Yang dijadikan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah semua pengambil kebijakan di bidang pendidikan yang meliputi : Kepala Dinas Pendidikan tingkat propinsi dan tingkat Kab/Kota di Sumatera Barat, serta kepala Dinas Pendidikan se Kab/Kota, juga para stakeholder pendidikan. Sedangkan lokasi penelitian untuk data deskriptif adalah seluruh Kantor Dinas pendidikan kab/kota, seluruh Kantor Dinas Kecamatan di Kab/Kota, dengan pertimbangan agar diperoleh data/informasi yang lebih akurat dan lengkap. Sedangkan untuk data kualitatif ditentukan dua daerah tingkat dua di Sumatera Barat yang terdiri atas 15 Kab/Kota. Penentuan lokasi dua daerah sampel untuk studi kualitatif ini ditetapkan berdasarkan kriteria kinerja pendidikan dengan KKG tertinggi dan terendah.

Lokasi untuk pendalaman kesenjangan gender, terpilih kota Padang dan kabupaten Agam (dari IPJ 2002). Selanjutnya sekolah-sekolah sampel pada kedua kota/kabupaten tersebut ditetapkan sebagai berikut : di Padang sekolah yang terpilih adalah SMA yang mewakili sekolah bebas rayon (SMA 1, 2, dan 10); SMA tidak bebas rayon ( 3,4, dan 8); SMK teknologi, bisnis, pariwisata; MAN 2 Padang. Untuk tingkatan SLTP dengan kriteria yang sama dengan SMA ditambah SMP Terbuka. Sedangkan sekolah dasar

ditetapkan sekolah yang mewakili lokasi pusat kota, lingkungan pantai, dan lingkungan bukit/pegunungan.

### C. Teknik dan Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian kualitatif, peneliti yang menjadi instrumen utama, maksudnya pengumpulan data itu tergantung pada peneliti sebagai alat pengumpul data, instrumen dalam penelitian kualitatif merujuk kepada diri peneliti sebagai alat pengumpul data. Sumber data dalam kegiatan ini adalah para kepala sekolah, kepala dinas, guru, siswa yang bermasalah (tinggal kelas) dan putus sekolah, orang tua siswa serta komite sekolah sebagai stake holder. Data yang akan dijaring adalah mengenai sebab terjadinya kesenjangan gender dikaitkan dengan aspek-aspek akses, partisipasi dan kontrol terhadap pendidikan anak.

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan tape recorder sebagai alat perekam dalam pelaksanaan wawancara dan dipandu dengan format wawancara. Disamping itu juga disiapkan alat untuk pencatatan data tertulis .

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara, teknik dokumentasi. Untuk lebih jelasnya data, alat pengumpul data dan teknik pengumpulan data dapat dilihat pada tabel 5

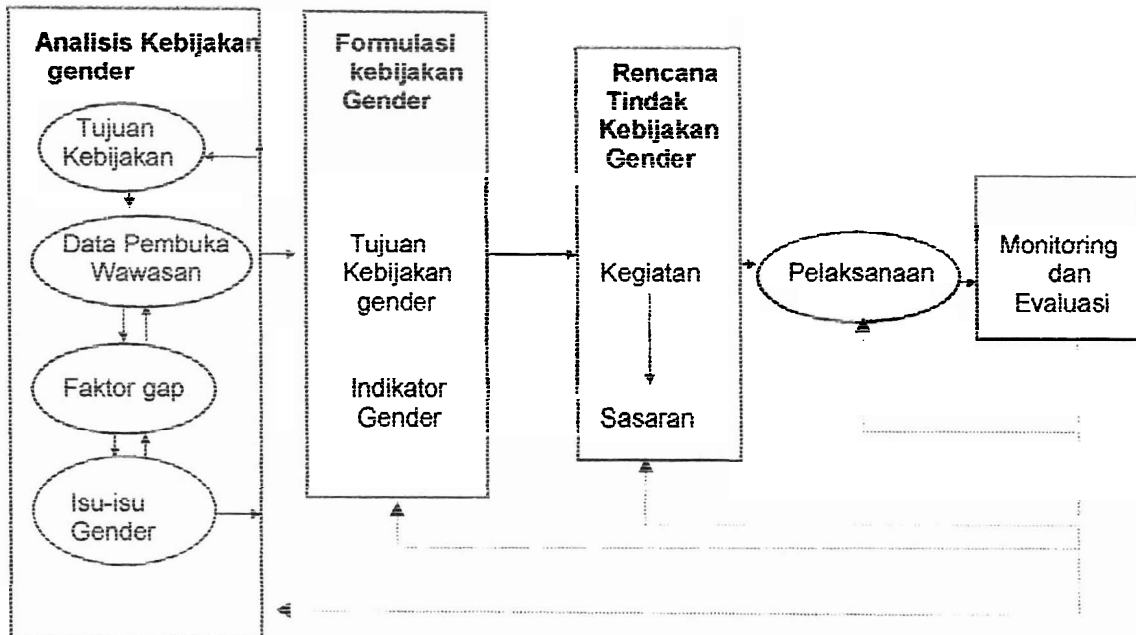
Tabel 5. Data, alat pengumpulan data dan teknik pengumpulan data

No	Data	Alat pengumpul data	Teknik pengumpul data
1.	Faktor penyebab kesenjangan gender	Pedoman wawancara	Wawancara, FGD
2.	Pemerataan kesempatan belajar	Catatan	Dokumentasi
3.	Kurikulum dan Proses Pembelajaran	Catatan	Dokumentasi
4.	Penjurusan dan Program studi	Catatan	Dokumentasi



#### D. Analisis Data

Data Yang sudah terkumpul akan dianalisis menggunakan teknik Gender Analisis Pathway (GAP) dan Policy Outlook and Plan of Action (POP). Alur kerja ini bergerak dari tujuan umum kebijakan, menuju pemahaman yang lebih luas tentang aspek gender, kepekaan gender dan indikator gender. Alur kerja dari GAP dapat dilihat pada bagan 1 berikut :



Dari bagan 1 di atas, dapat dikemukakan kerangka GAP sebagai berikut :

1. Analisis kebijakan yang responsif Gender
2. Reformulasi Kebijakan yang responsif Gender
3. Rencana Aksi/ kebijakan Operasional yang responsif Gender
4. Pelaksanaan Gender
5. Monitoring dan Evaluasi

Selain itu untuk data kualitatif yang akan dianalisis sebagai berikut :

Analisis isi kebijakan: pada tingkat propinsi dilakukan untuk 4 tahun terakhir (2000-2003). Pada tingkat kabupaten/kota (2 kabupaten/kota terpilih) dilakukan analisis isi terhadap kebijakan selama empat tahun terakhir berikut operasionalisasinya dalam bentuk program maupun kegiatan, kebijakan penerimaan guru berkaitan dengan pemberlakuan otonomi daerah. Pada tingkat sekolah, dianalisis kebijakan seperti: (a) Kebijakan

penerimaan murid/ penjurusannya apakah bias gender, netral gender atau responsif gender; (b) Kebijakan sekolah mengatasi masalah putus sekolah (dianalisis secara lebih tajam dalam hubungannya dengan kasus kehamilan, narkoba, kemiskinan, tawuran anak sekolah, mbolos, dll); (c) Kebijakan penugasan guru, apakah bias gender atau tidak; (d) kebijakan pengusulan/pengangkatan sebagai kepala sekolah; (e). Kebijakan mengirim guru mengikuti Diklat (apakah bias gender, netral gender atau responsif gender).

Data yang akan ditampilkan dalam bentuk tabel silang yang memuat indikator kesetaraan gender di bidang pendidikan antar kabupaten/kota Sumatera Barat, dengan memasukkan dimensi perkotaan dan pedesaan.

Tampilkan data dengan menggunakan *scatter block diagram* untuk mengetahui kabupaten/kota yang berada pada posisi diatas rerata tingkat propinsi, atau dibawah rerata tingkat propinsi, baik pada kelompok perempuan maupun laki-laki.(dengan membuat 4 kuadran). Dalam penelitian ini yang dilaksanakan adalah kegiatan-kegiatan berikut, Analisis Kebijakan, Reformulasi Kebijakan dan Rencana Aksi, guna melengkapi data sebelumnya sehingga didapat data yang sesungguhnya. Sedangkan Pelaksanaan Gender dan Monitoring dan Evaluasi tidak termasuk dalam kegiatan penelitian ini.

## BAB IV

### ANALISIS PROGRAM PENDIDIKAN SUMATRA BARAT

#### A. Kebijakan Pembangunan Pendidikan

Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia salah satu pihak yang memiliki peran strategis adalah Dinas Pendidikan. Hal ini sesuai dengan kebijakan strategis pemerintah di bidang pendidikan nasional yang mencakup empat hal yaitu, peningkatan mutu, pendidikan, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan relevansi pendidikan, serta peningkatan efisiensi dan efektivitas pendidikan. Atas dasar itu Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Barat merumuskan Visi pendidikan Sumatra Barat, yakni "Pendidikan yang mandiri, berkualitas, dan berbudaya dalam usaha menunjang tercapainya masyarakat madani dalam wadah negara kesatuan republik Indonesia"

Berdasarkan visi tersebut Dinas Pendidikan Sumatra Barat menjabarkan dalam bentuk misi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Barat yang tetap mengacu pada prioritas pembangunan Sumatra Barat, yaitu: (1). Peningkatan mutu pendidikan dasar melalui kendali mutu, di samping penuntasan wajib belajar 9 tahun; (2). Peningkatan mutu SMA melalui pengembangan wawasan keunggulan; (3). Peningkatan mutu dan relevansi SMK melalui penerapan kurikulum berbasis kompetensi dan kurikulum berbasis meluas dan mendasar; (4).Peningkatan profesionalisme tenaga kependidikan; (5). Peningkatan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah; (6). Pengembangan pendidikan berbasis masyarakat; (7). Melengkapi sarana prasarana sekolah terutama untuk kegiatan belajar mengajar yang sangat membantu guru menciptakan KBM yang kondusif.

Sehubungan dengan visi-misi pendidikan tersebut, dinas pendidikan provinsi Sumatra Barat dalam Rencana Strategis tahun 2001-

2005 telah menyusun kebijakan yang mengacu kepada 4 strategi pokok kebijakan pemerintah di bidang pendidikan sebagai berikut:

*1. Usaha peningkatan mutu pendidikan*

Kegiatan yang akan dilakukan adalah meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan profesionalisme tenaga kependidikan, melengkapi secara bertahap sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan lainnya, membenahi manajemen pendidikan serta menjalin hubungan kerja sama dengan masyarakat

Peningkatan profesionalisme tenaga kependidikan dilakukan melalui pendidikan, pelatihan dan pembinaan secara berkelanjutan terukur dan sesuai dengan kebutuhan tenaga kependidikan guna mampu menunjang efisiensi dan efektifitas pendidikan, sehingga diharapkan mampu menciptakan tamatan yang menguasai kompetensi dasar, yang dilandasi dengan sikap dan budi pekerti luhur serta memiliki keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk hidup di masyarakat maupun di dunia usaha/dunia industri.

Pengadaan sarana dan prasarana ditujukan untuk mendukung standar pelayanan minimal antara lain rasio buku/siswa 1:1; rasio kelas/lab 9:1; rasio lokal/rombongan belajar 1:1 Hal ini bertujuan untuk menunjang kemudahan anak menguasai konsep-konsep dasar melalui kreativitas siswa dalam pembelajaran dengan menggunakan prinsip "*learning by doing*".

Pembenahan manajemen pendidikan dilakukan dalam rangka lebih memberdayakan potensi sekolah dan potensi masyarakat untuk lebih berperan melalui pengembangan manajemen pendidikan berbasis sekolah dan manajemen pendidikan berbasis masyarakat, serta manajemen kelas. Harapannya adalah terciptanya "*learning society*" serta kemandirian sekolah.

*2. Pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan*

**Sasaran utama** kegiatan ini adalah untuk penuntasan wajib belajar 9 tahun dan pemberian kesempatan yang sama bagi setiap warga

masyarakat untuk memperoleh pendidikan baik melalui jalur sekolah maupun luar sekolah. Salah satu cara adalah meningkatkan kemampuan daya tampung melalui pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), penambahan Ruang Kelas Baru (RKB), pengembangan SKB, PKBM serta mengembangkan pola wajar dikdas yang sesuai antara lain SMP/MTS Terbuka. Tentu saja pengembangan daya tampung harus diikuti dengan pemenuhan kebutuhan tenaga, sarana, fasilitas pembiayaan serta perkembangan sekolah ke depan. Penuntasan Wajar Dikdas tetap memperhatikan mutu pendidikan sehingga mampu mendukung terciptanya SDM yang berkualitas. Ditinjau dari penduduk usia sekolah untuk tahun 2003 dari setiap jenjang pendidikan dapat dilihat pada Tabel 6.

**Tabel 6. Keadaan Penduduk Menurut Usia Sekolah**

Kecamatan	Proporsi					
	Usia 7 - 12		Usia 13 - 15		Usia 16 - 18	
	L	P	L	P	L	P
<b>Kabupaten:</b>						
1. Kep. Mentawai	5848	5154	2695	1972	2798	1866
2. Pesisir Selatan	26924	28411	13956	15331	14888	10909
3. S o l o k	32076	36422	16186	15268	15947	16164
4. Sw/Sijunjung	23503	23354	10068	11659	9593	8944
5. Tanah Datar	22751	20736	11377	9071	9216	11088
6. Pd.Pariaman	35163	25227	16198	13726	14211	16820
7. Agam	32036	29624	12519	11901	10458	11520
8. Limapuluh Kota	20976	21844	9006	6903	9438	8491
9. Pasaman	45981	40206	20194	16377	19827	17099
<b>Kota :</b>						
1. Padang	52677	44775	20707	18354	25404	28242
2. S o l o k	3579	4173	1520	1946	1713	2138
3. Sawahlunto	3437	3298	1572	1265	1528	1690
4. Pd. Panjang	3354	2616	1124	1619	1516	1502
5. Bkt. Tinggi	5773	5620	2838	2242	2976	3688
6. Payakumbuh	6575	6244	2927	3366	3736	3651
<b>Jumlah</b>	<b>320653</b>	<b>297704</b>	<b>142887</b>	<b>131000</b>	<b>143249</b>	<b>143812</b>
<b>Total</b>	<b>618357</b>		<b>273887</b>		<b>287061</b>	

Sumber: Susenas 2003, BPS Prop. Sumbar

### 3. Peningkatan relevansi pendidikan

Relevansi pendidikan merupakan kesepakatan program pendidikan mencakup dengan kehidupan di masyarakat, dengan dunia usaha/dunia industri dan pendidikan yang lebih tinggi. Relevansi dengan lingkungan masyarakat dicapai antara lain melalui pengembangan

kurikulum muatan lokal baik menyangkut budaya, olah raga, bahasa maupun keterampilan /kerajinan. Sedangkan relevansi dengan dunia usaha/dunia industri akan dikembangkan melalui PSG, berupa kompetensi yang diwujudkan melalui penerapan kurikulum berbasis kompetensi dan kurikulum berbasis kemampuan dasar yang meluas. Untuk relevansi dengan pendidikan yang lebih tinggi diutamakan penguasaan kemampuan akademik guna menunjang kemampuan lulusan mengikuti pendidikan di perguruan tinggi.

#### 4. *Peningkatan efisiensi dan efektivitas pendidikan*

Efisiensi dan efektivitas pendidikan akan mendukung tercapainya peningkatan mutu dan relevansi pendidikan. Untuk tingkat SD/MI dilakukan revitalisasi dan re-grouping sekolah guna meningkatkan efisiensi efektivitas tenaga, sarana dan biaya. Untuk itu perlu dilakukan pemetaan sekolah dalam rangka pembentukan gugus sekolah, pembinaan dan pemerataan tenaga kependidikan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Di tingkat SMP/MTs dan SLTA peningkatan efisiensi dan efektivitas pendidikan dapat dilakukan dengan menerapkan standar pelayanan minimal dengan memanfaatkan potensi yang ada secara optimal guna menunjang pembelajaran.

Guna mengimplementasikan kebijakan tersebut, telah disusun program dan kegiatan untuk tahun 2001-2005, berikut

##### 1. *Program dan pembinaan Pendidikan Dasar dan Prasekolah*

- (a). Memperluas daya tampung dengan memperhitungkan keseimbangan jangkauan antara SD/MI dan SMP/MTs;
- (b). Peningkatan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi masyarakat kurang mampu dengan pengembangan pola belajar yang relevan;
- (c). Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan;
- (d). Memperluas pendidikan prasekolah melalui peningkatan partisipasi masyarakat;
- (e). Meningkatkan imtaq, akhlak, moral dan sikap mental setiap peserta didik;
- (f). Meningkatkan tiga kemampuan

dasar, Matematika, IPA, dan Bahasa; (g). Meningkatkan kesejahteraan, profesionalitas, kemandirian guru dan tenaga kependidikan lainnya; (h). Menyempurnakan pelaksanaan kurikulum yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional dengan mempertimbangkan kurikulum muatan lokal yang sesuai dengan kondisi Sumatera Barat/ kabupaten/kota

2. *Program pembinaan Menengah Umum*

(a). Meningkatkan mutu pendidikan sejalan dengan perluasan daya tampung dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan potensi daerah ; (b). Melengkapi kebutuhan sarana dan pra-sarana pendidikan ; (c). Menyediakan beasiswa secara selektif dan berkelanjutan ; (d). Menerapkan sistem dan standar penilaian nasional secara bertahap agar berkualitas, sehingga lulusan SMA dapat bersaing secara nasional ; (e). Peningkatan efisiensi dan efektivitas PBM melalui penilaian proses belajar dan manajemen sekolah

3. *Program pembinaan pendidikan Menengah Kejuruan*

(a). Memperluas jangkauan dan daya tampung SMK dengan tetap memperhatikan potensi dan kebutuhan daerah ; (b). Meningkatkan kemampuan siswa SMK melalui pelaksanaan program sistem ganda ; (c). Meningkatkan relevansi pendidikan SMK sesuai dengan kebutuhan dunia kerja ; (d). Melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana SMK ; (e). Meningkatkan kemampuan lulusan SMK melalui penerapan kurikulum berbasis kompetensi

4. *Program peningkatan kemampuan profesionalisme dan manajemen tenaga kependidikan*

(a). Peningkatan kemampuan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan melalui pendidikan dan pelatihan ; (b). Meningkatkan demokratisasi dan desentralisasi pendidikan melalui pemberdayaan

komite sekolah; (c). Melaksanakan kegiatan dalam rangka otonomi manajemen pendidikan ; (d).Pengembangan kemampuan profesional guru dibidang penguasaan materi pelajaran melalui pelatihan

5. *Program peningkatan manajemen pendidikan*

(a). Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan melalui kegiatan pelatihan ; (b). Meningkatkan demokratisasi dan desentralisasi pendidikan melalui pemberdayaan komite sekolah ; (c). Meningkatkan pelaksanaan manajemen pendidikan berbasis sekolah ; (d). Meningkatkan otonomi manajemen pendidikan di setiap sekolah ; (e). Pengembangan komite/dewan sekolah dan gugus kendali mutu

6. *Program peningkatan mutu dan pemerataan Pendidikan Dasar dan Menengah*

(a). Penyusunan program perluasan daya tampung melalui pembangunan USB dan RKB dengan melibatkan masyarakat ; (b). Pengembangan kurikulum muatan lokal untuk kabupaten/kota ; (c). Penyusunan program dengan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pendidikan melalui komite sekolah ; (d).Melibatkan masyarakat dalam menyusun kebutuhan sarana dan prasarana dalam menunjang pembelajaran

**B. Data Pembuka Wawasan**

**1. Pendidikan Formal**

Pendidikan formal berfungsi mengembangkan potensi siswa dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Pendidikan formal meliputi pendidikan dasar ( pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pendidikan menengah ( meliputi

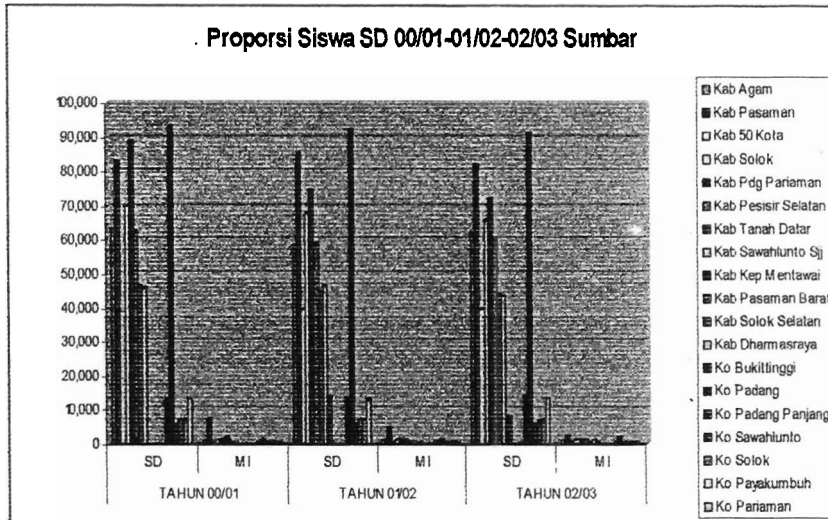


Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah dan Kejuruan ) dan lain-lain. Berikut ini akan dikemukakan secara berturut-turut masing-masing jenjang pendidikan.

**a. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah**

**1). Proporsi**

**(a). Proporsi Siswa SD/MI tahun 00/01- 01/02- 02/03**



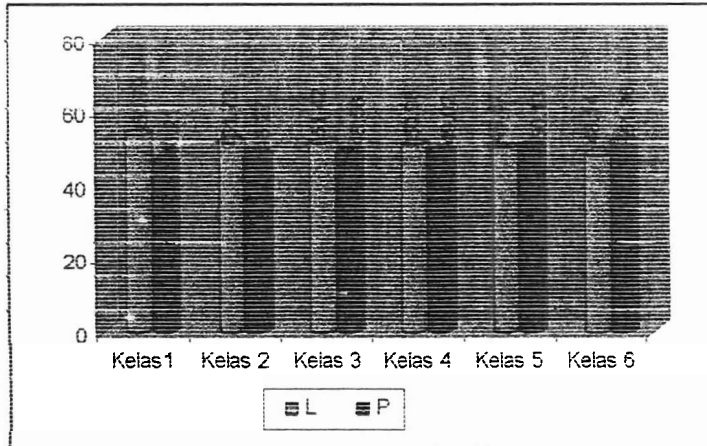
Sumber: Profil Dinas Pendidikan prov Sumbar 00/01- 01/02 – 02/03

Berdasarkan data pada grafik, dapat dilihat bahwa persentase mengulang kelas pada SD/MI di Prop Sumatra Barat dapat dijelaskan sebagai berikut: (a). Tahun ajaran 00/01 : SD sebanyak 8,7%, pada MI sebanyak 2,7%, sedangkan secara keseluruhan SD/MI sebanyak 8,5%; (b). Tahun ajaran 01/02 : SD sebanyak 7,9%, pada MI sebanyak 3,3%, sedangkan secara keseluruhan SD/MI sebanyak 7,9%; (c). Tahun ajaran 02/03 : SD sebanyak 4,5%, pada MI sebanyak 3,9%, sedangkan secara keseluruhan SD/MI sebanyak 4,4%.

Dibandingkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) mengulang kelas untuk SD/MI yaitu maksimal 2%, maka persentase mengulang kelas tersebut masih terlalu tinggi. Walaupun demikian jika dilihat perkembangan setiap tahunnya, pada SD, persentase tersebut terus

menurun, namun tidak demikian pada MI yang setiap tahunnya terus cenderung menaik.

**(b). Proporsi Siswa SD/MI Tahun 2003/2004**

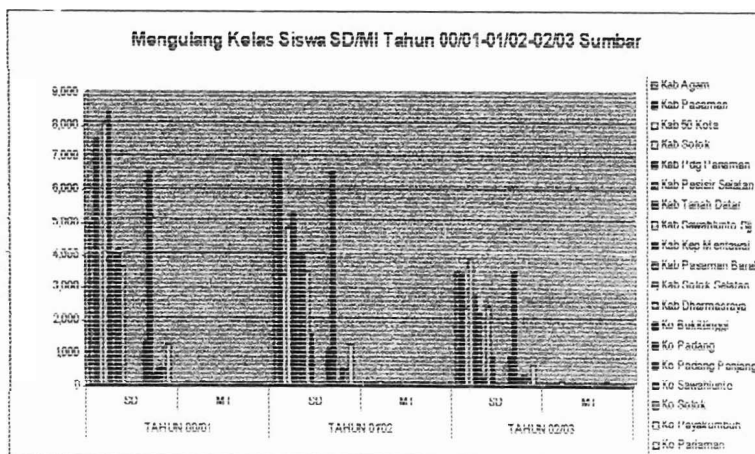


Sumber: Diolah dari data Dinas Pendidikan Kab/Kota prov Sumbar 2004

Berdasarkan diagram di atas, terlihat proporsi siswa laki-laki sedikit lebih banyak dari perempuan, namun pada tingkatan kelas tertinggi proporsi siswa perempuan lebih banyak dari pada laki-laki. Kalau dilihat per Kabupaten/Kota di Sumbar proporsi siswa laki-laki secara umum lebih tinggi dari siswa perempuan dan sedikit lebih menyolok di Kota Payakumbuh yaitu 54% siswa laki-laki dan 46 % perempuan.

**2). Mengulang Kelas Siswa SD/MI**

**(a). Mengulang Kelas Siswa SD/MI Tahun 00/01 - 01/02 - 02/03**

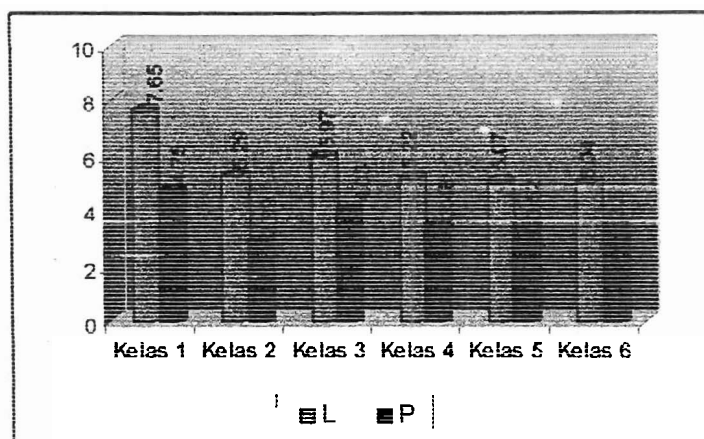


Sumber: Profil Dinas Pendidikan prov Sumbar 00/01- 01/02 – 02/03

Dari grafik di atas, terlihat bahwa persentase mengulang kelas pada SD/MI di Prov Sumatra Barat dapat dijelaskan sebagai berikut: (a). Tahun ajaran 00/01 : SD sebanyak 8,7%, pada MI sebanyak 2,7%, sedangkan secara keseluruhan SD/MI sebanyak 8,5% ; (b). Tahun ajaran 01/02 : SD sebanyak 7,9%, pada MI sebanyak 3,3%, sedangkan secara keseluruhan SD/MI sebanyak 7,9% ; (c). Tahun ajaran 02/03 : SD sebanyak 4,5%, pada MI sebanyak 3,9%, sedangkan secara keseluruhan SD/MI sebanyak 4,4%.

Dibandingkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) mengulang kelas untuk SD/MI yaitu maksimal 2%, maka persentase mengulang kelas tersebut masih terlalu tinggi. Walaupun demikian jika dilihat perkembangan setiap tahunnya, pada SD persentase tersebut terus menurun, namun tidak demikian pada MI yang setiap tahunnya terus cenderung menaik.

**(b). Mengulang Kelas Siswa SD/MI Tahun 2003/2004**



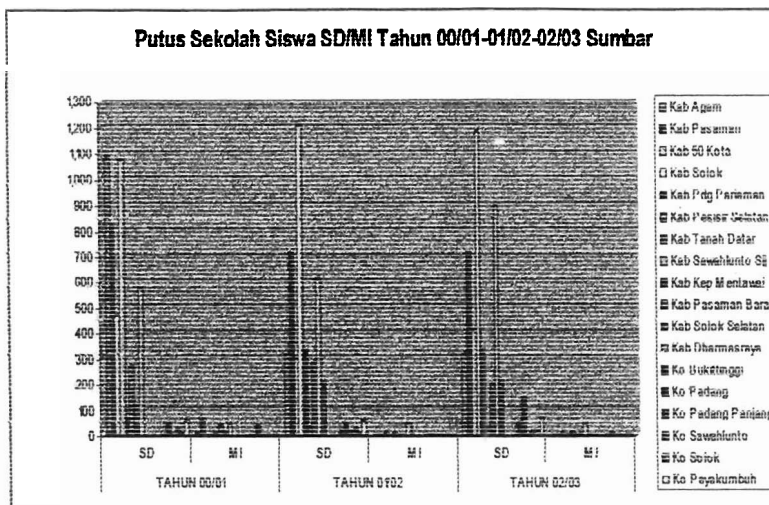
Sumber: Diolah dari data Dinas Pendidikan Kab/Kota prov Sumbar 2004

Berdasarkan diagram di atas, dapat dilihat bahwa semakin tinggi tingkatan kelas ternyata jumlah siswa laki-laki yang mengulang kelas juga menurun, namun proporsi siswa laki-laki ini tetap lebih tinggi dari siswa perempuan yang mengulang. Kalau dilihat per kabupaten/kota di Sumbar, proporsi siswa mengulang laki-laki secara umum lebih tinggi dari siswa perempuan. Dari data tersebut dapat juga dikemukakan siswa mengulang kelas lebih banyak berasal dari wilayah pada kabupaten dari pada wilayah

perkotaan. Dari enam tingkatan kelas pada Sekolah dasar, ternyata persentase mengulang kelas baik kelompok laki-laki maupun perempuan berada di atas Standard Pelayanan Minimum (SPM) sebesar maksimal 2%. Rata-rata untuk Sumbar persentase mengulang siswa laki-laki lebih besar dari perempuan (5,89%>3,79%).

### 3). Putus Sekolah Siswa SD/MI

#### (a). Putus Sekolah Siswa SD/MI Tahun 00/01 - 01/02 - 02/03

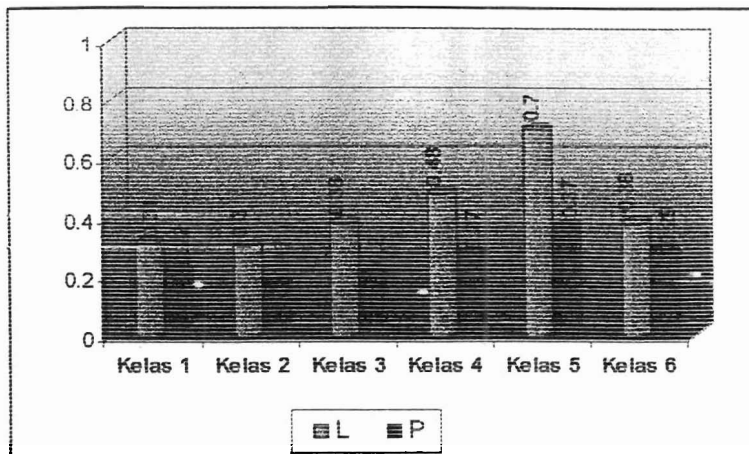


Sumber: Profil Dinas Pendidikan prov Sumbar 00/01- 01/02 – 02/03

Berdasarkan grafik di atas, untuk angka putus sekolah pada SD/MI dapat dijelaskan sebagai berikut: (a). Tahun ajaran 00/01 : SD sebanyak 0,8%, pada MI sebanyak 1,4%, sedangkan secara keseluruhan SD/MI sebanyak 0,8% ; (b). Tahun ajaran 01/02 : SD sebanyak 0,7%, pada MI sebanyak 0,5%, sedangkan secara keseluruhan SD/MI sebanyak 0,7% ; (c). Tahun ajaran 02/03 : SD sebanyak 0,7%, pada MI sebanyak 0,6%, sedangkan secara keseluruhan SD/MI sebanyak 0,7%.

Dibandingkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) putus sekolah untuk SD/MI yaitu maksimal 1%, maka persentase putus sekolah tersebut sudah mengembirakan. Walaupun pada tahun ajaran 2000/2001 persentase putus sekolah pada MI berada di atas SPM, namun pada tahun ajaran berikutnya cenderung menurun.

(b). Putus Sekolah Siswa SD/MI Tahun 2003/2004



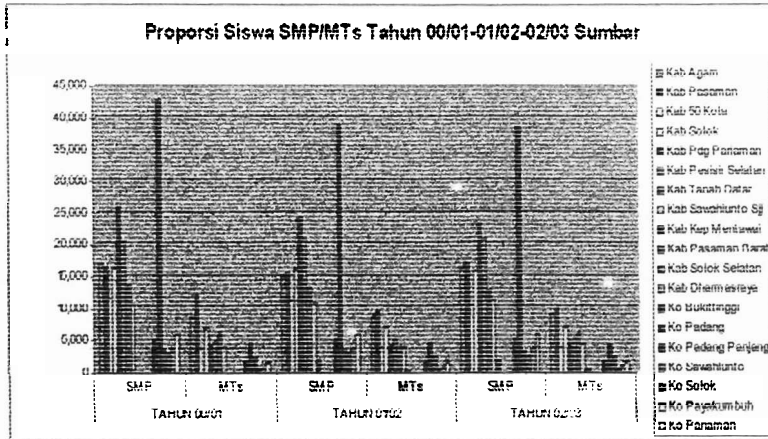
Sumber: Diolah dari data Dinas Pendidikan Kab/Kota prov Sumbar 2004

Pada diagram di atas tentang kondisi siswa yang putus sekolah pada tahun ajaran 2003/2004, terlihat bahwa pada setiap tingkatan kelas proporsi siswa laki-laki yang putus sekolah lebih besar dari pada siswa perempuan. Semakin tinggi tingkatan kelas proporsi siswa laki-laki putus sekolah semakin meningkat, namun pada siswa perempuan proporsi ini berfluktuasi. Selanjutnya bila dilihat per kabupaten /kota, angka putus sekolah laki-laki jauh lebih besar dari siswa perempuan. Proporsi putus sekolah siswa laki-laki lebih besar terjadi pada wilayah kabupaten dari pada wilayah perkotaan. Namun apabila dibanding-kankan dengan Standard Pelayanan Minimum (SPM) sebesar 1%, ternyata persentase baik putus sekolah siswa laki-laki maupun perempuan pada setiap tingkatan kelas berada dibawah SPM. Rata-rata persentase siswa putus sekolah (DO) untuk Sumbar adalah :0,42% untuk laki-laki dan 0,25% untuk perempuan..

**b. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.**

**1). Proporsi Siswa SMP/MTs**

**(a). Proporsi Siswa SMP/MTs Tahun 00/01 - 01/02 - 02/03**

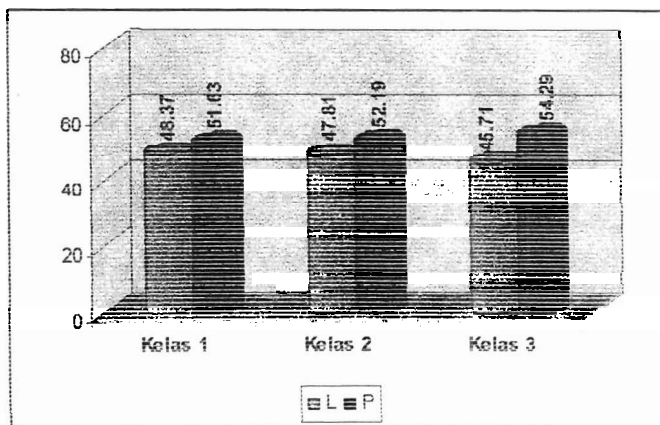


Sumber: Profil Dinas Pendidikan prov Sumbar 00/01- 01/02 – 02/03

Berdasarkan data grafik di atas, untuk tahun ajaran 2001/2002 jumlah siswa SMP cenderung berkurang dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun pada tahun ajaran 2002/2003 angka ini naik sedikit. Pada siswa MTs demikian juga dan pada tahun ajaran 2002/2003 cenderung menaik kembali. Secara keseluruhan dapat dikemukakan bahwa jumlah siswa SMP/MTs pada tahun ajaran 2001/2002 menurun dibandingkan dengan tahun ajaran 2000/2001, namun pada tahun ajaran 2002/2003 menaik kembali

**(b). Distribusi Siswa SMP/MTs Tahun 2003/2004**

**Tabel 10. Proporsi Siswa SMP/MTs Berdasarkan Kelas dan Jenis Kelamin**

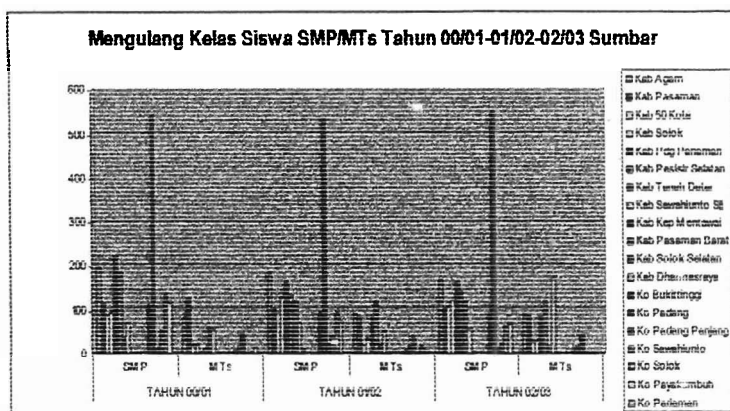


Sumber: Dinas Pendidikan Kab/Kota Tahun 2004

Diagram di atas, menunjukkan bahwa, jumlah siswa laki-laki lebih sedikit dari pada siswa perempuan , baik dilihat pertingkatan kelas maupun per Kab/kota di Sumbar, kecuali Kota Sawahlunto proporsi siswa laki-laki lebih besar dari pada siswa perempuan ( 53%>47%). Ada kecenderungan proporsi siswa laki-laki pada tingkatan kelas yang lebih tinggi menurun, ini menunjukkan siswa laki-laki memiliki kemampuan bertahan yang sangat kurang dibandingkan perempuan.

## 2). Mengulang Kelas Siswa SMP/MTs

### (a). Mengulang Kelas Siswa SMP/MTs Tahun 00/01 - 01/02 - 02/03



Sumber: Profil Dinas Pendidikan prov Sumbar 00/01- 01/02 – 02/03

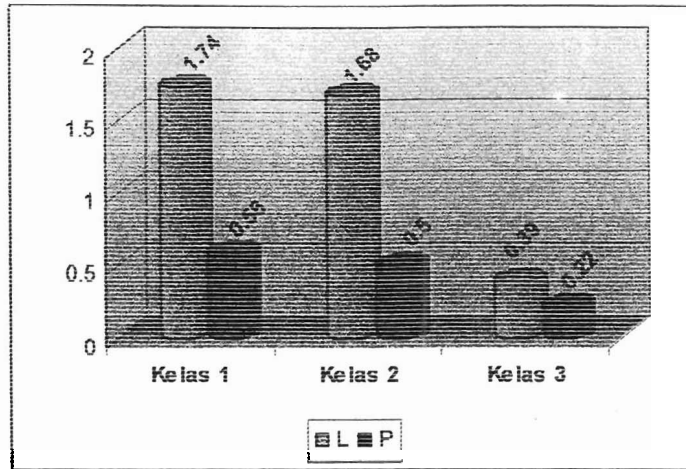
Grafik di atas menunjukkan bahwa, persentase mengulang kelas pada SMP/MTs di Prop Sumatra Barat dapat dijelaskan sebagai berikut :

- (a).Tahun ajaran 2000/01 : Pada SMP sebanyak 1,1%, pada MTs sebanyak 0,7%, sedangkan secara keseluruhan pada SMP/MTs sebanyak 1% ;
- (b).Tahun ajaran 2001/02 : Pada SMP sebanyak 1 % , pada MTs sebanyak 1% , sedangkan secara keseluruhan SMP/MTs sebanyak 1% ;
- (c). Tahun ajaran 2002/03 : Pada SMP sebanyak 1%, pada MTs sebanyak 1,2%, sedangkan secara keseluruhan SMP/MTs sebanyak 1%.

Dibandingkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) mengulang kelas untuk SMP/MTs yaitu maksimal 2%, maka persentase mengulang kelas tersebut sudah menggembirakan yaitu berada di bawah 2%. Secara keseluruhan persentase tersebut setiap tahunnya konstan, walaupun

demikian pada jenjang MTs, siswa yang mengulang kelas dari tahun ke tahun cenderung terus bertambah banyak.

b). Mengulang Kelas Siswa SMP/MTs Tahun 2003/2004



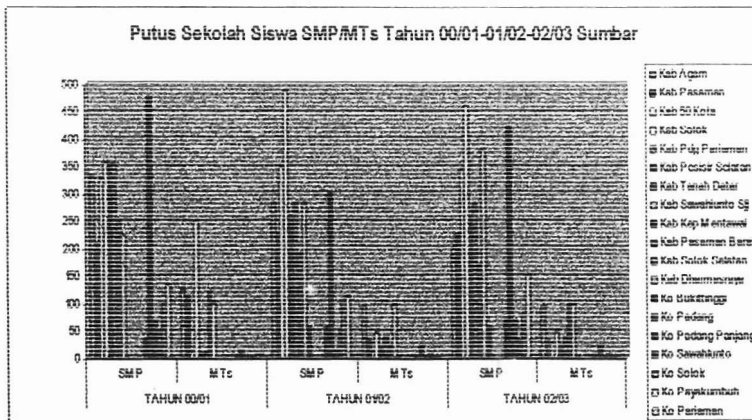
Sumber: Dinas Pendidikan Kab/Kota Tahun 2004

Diagram di atas menunjukkan bahwa, semakin tinggi tingkatan kelas ternyata jumlah siswa mengulang kelas makin sedikit, namun proporsi mengulang siswa laki-laki lebih banyak dari pada siswa perempuan, baik dilihat pertingkatan kelas maupun dilihat per kabupaten/kota di Sumbar. Terdapat beberapa kab/kota dengan persentase mengulang siswa laki-laki sangat menyolok dibandingkan persentase mengulang siswa perempuan, seperti Kab.50 Kota (89%,11%), kab. Tanah Datar (91%<9%) dan Kota Padang Panjang (94%<6%). Rata-rata di Sumbar persentase mengulang siswa laki-laki lebih tinggi dari siswa perempuan (1,27%>0,44%). Ditinjau dari persentase mengulang kelas siswa laki-laki maupun perempuan di setiap tingkatan kelas, ternyata persentasenya masih berada dibawah Standard Pelayanan Minimum (SPM) 2%. Hal ini dapat diartikan bahwa kualitas pendidikan SMP/MTs di Sumbar dapat dikategorikan baik.



### 3). Putus Sekolah Siswa SMP/MTs

#### (a). Putus Sekolah Siswa SMP/MTs Tahun 00/01 - 01/02 - 02/03

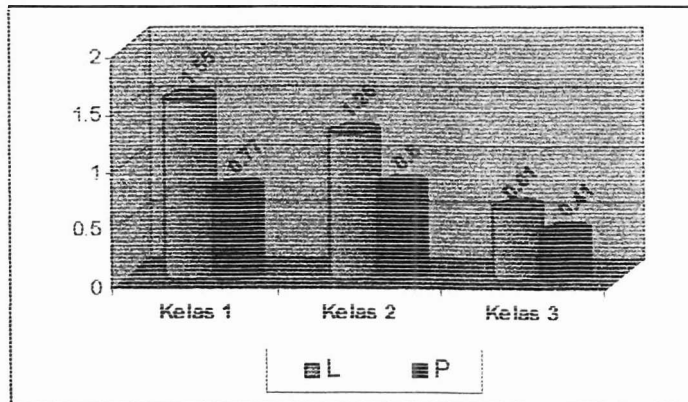


Sumber: Profil Dinas Pendidikan prov Sumbar 00/01- 01/02 – 02/03

Grafik di atas menunjukkan, untuk angka putus sekolah pada SMP/MTs dapat dijelaskan sebagai berikut: (a). Tahun ajaran 00/01 : Pada SMP sebanyak 1,7%, pada MTs sebanyak 1,3%, sedangkan secara keseluruhan SMP/MTs sebanyak 1,6% ; (b). Tahun ajaran 01/02 : Pada SMP sebanyak 1,6%, pada MTs sebanyak 0,7%, sedangkan secara keseluruhan SMP/MTs sebanyak 1,2% ; (c).Tahun ajaran 02/03 : Pada SMP sebanyak 1,7%, pada MTs sebanyak 0,8%, sedangkan secara keseluruhan SMP/MTs sebanyak 1,5%.

Dibandingkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) putus sekolah untuk SMP/MTs yaitu maksimal 1%, secara umum persentase putus sekolah tersebut cukup memprihatinkan, walaupun setiap tahunnya terjadi penurunan. Namun pada jenjang MTs persentase tersebut cukup menggembarakan, yaitu terjadi penurunan terus setiap tahunnya dan pada tahun 2002/2003 telah berada di bawah standar pelayanan minimal.

(b). Putus Sekolah Siswa SMP/MTs Tahun 2003/2004



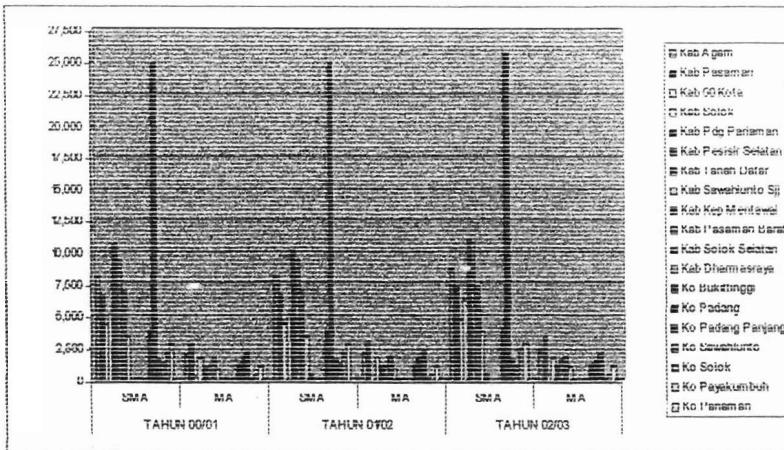
Sumber: Dinas Pendidikan Kab/Kota SUMBAR Tahun 2004

Diagram di atas, menunjukkan bahwa pada setiap tingkatan kelas proporsi siswa laki-laki yang putus sekolah lebih besar dari pada siswa perempuan. Semakin tinggi tingkatan kelas proporsi siswa laki-laki dan perempuan yang putus sekolah juga semakin menurun. Namun apabila dilihat per kabupaten/kota angka putus sekolah laki-laki jauh lebih besar dari siswa perempuan. Rata-rata persentase siswa putus sekolah (DO) untuk Sumbar adalah :1,14% untuk laki-laki dan 0,66% untuk perempuan. Disamping itu dari lampiran 31. juga terlihat angka putus sekolah daerah kabupaten lebih tinggi dari pada daerah kota. Ditinjau dari SPM (1%), ternyata untuk setiap tingkatan kelas persentase putus sekolah siswa laki-laki berada di atas SPM, sedangkan putus sekolah siswa perempuan berada dibawah SPM. Dari data di muka terlihat bahwa angka mengulang kelas berhubungan secara signifikan dengan angka putus sekolah. Dalam hal ini selain kondisi siswa , juga perlu diperhatikan proses pembelajaran di kelas dan lingkungan keluarga yang merupakan faktor-faktor penentu bagi pencapaian hasil belajar siswa.

**c. Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah**

**1). Proporsi Siswa SMA/MA**

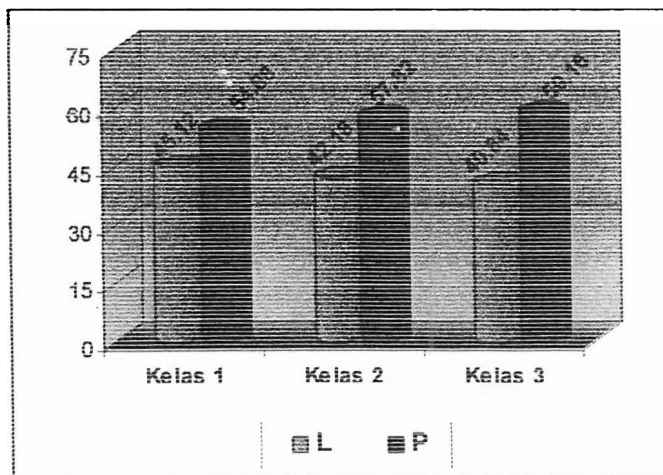
**(a). Distribusi Siswa SMA/MA Tahun 00/01- 01/02- 02/03**



Sumber: Profil Dinas Pendidikan prov Sumbar 00/01- 01/02 – 02/03

Berdasarkan data pada diagram di atas, pada tahun ajaran 2001/2002 jumlah siswa SMA cenderung menaik, demikian juga pada siswa MA. Pada siswa SMK walaupun pada tahun ajaran 2001/2002 menaik dibandingkan tahun sebelumnya, namun pada tahun 2002/2003 cenderung menurun. Secara keseluruhan dapat dikemukakan bahwa jumlah siswa SMA/MA/SMK terus menaik setiap tahunnya.

**(b). Distribusi Siswa SMA/MA Tahun 2003/2004**

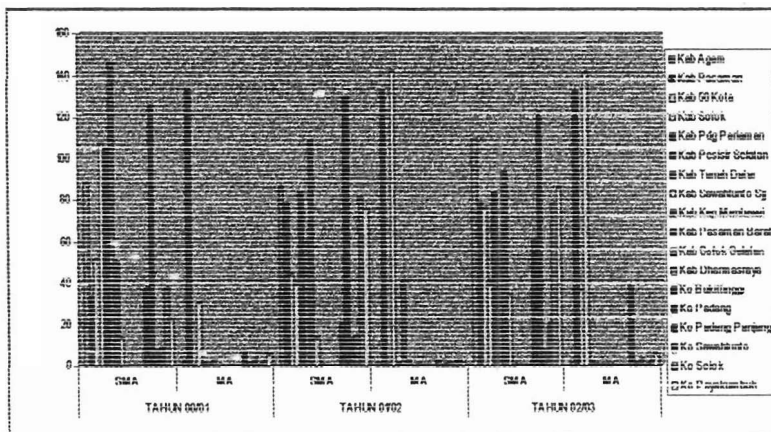


Sumber: Diolah dari data Dinas Pendidikan Kab/Kota prov Sumbar 2004

Diagram di atas menunjukkan, kesenjangan proporsi siswa laki-laki dan perempuan semakin tajam baik dilihat per tingkatan kelas maupun per kabupaten/kota di Sumbar, kecuali kota Bukittinggi proporsi siswa laki-laki lebih besar dari pada perempuan (56%>44%). Semakin tinggi tingkatan kelas semakin besar kesenjangan proporsi siswa laki-laki dari pada siswa perempuan. Disisi lain proporsi siswa perempuan di Kota Padang Panjang dua kali lipat proporsi siswa laki-laki., hal yang sama juga terjadi di kota Sawahlunto. Ini berarti partisipasi siswa laki-laki dalam bidang pendidikan untuk jenjang pendidikan sekolah menengah lebih rendah dari pada perempuan.

## 2). Mengulang Keias SMA/MA

### (a). Mengulang Keias Siswa SMA/MA Tahun 00/01 - 01/02 - 02/03



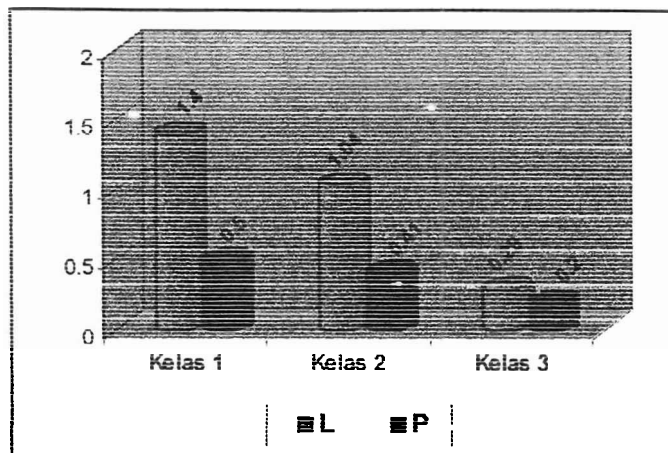
Sumber: Profil Dinas Pendidikan prov Sumbar 00/01- 01/02 – 02/03

Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa persentase mengulang kelas pada SMA/MA/SMK di Prop Sumatra Barat dapat dijelaskan sebagai berikut: (a).Tahun ajaran 00/01 : Pada SMA sebanyak 0,9%, pada MA sebanyak 1%, pada SMK 0,6%, sedangkan secara keseluruhan pada SMA/MA/SMK sebanyak 0,8% ; (b). Tahun ajaran 01/02 : Pada SMA sebanyak 0,9%, pada MA sebanyak 1,7%, pada SMK 0,6%, sedangkan secara keseluruhan SMK sebanyak 0,9% ; (c).Tahun ajaran 02/03 : Pada SMA sebanyak 1%, pada MA sebanyak 1,8%, pada SMK 0,9%, sedangkan secara keseluruhan SMK sebanyak 1%. Dibandingkan dengan Standar

Pelayanan Minimal (SPM) mengulang kelas untuk SMA/MA yaitu maksimal 2%, maka persentase mengulang kelas tersebut sudah menggembirakan yaitu sudah berada di bawah 2%.

Namun demikian jika dilihat dari perkembangan setiap tahunnya secara keseluruhan, persentase tersebut terus menaik. Secara parsial kenaikan tersebut terjadi pada jenjang MA. Pada jenjang SMA dan SMK kenaikan hanya terjadi pada tahun ajaran 2002/2003 saja.

#### (b). Mengulang Kelas SMA/MA Tahun 2003/2004

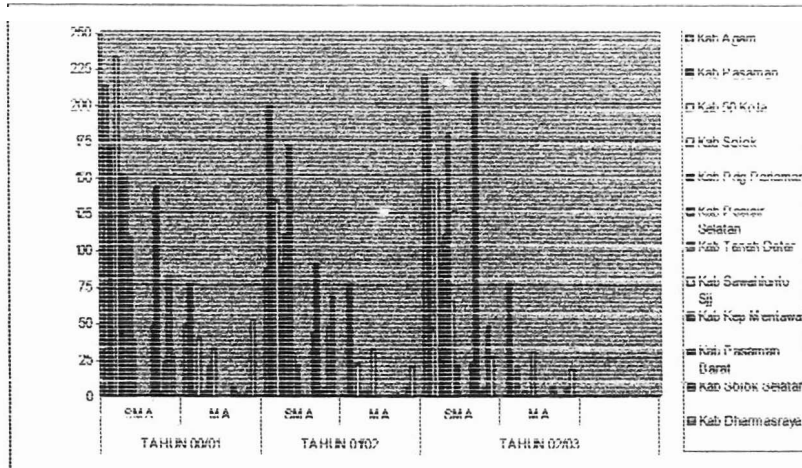


Sumber: Diolah dari data Dinas Pendidikan Kab/Kota prov Sumbar 2004

Dari diagram di atas, dapat dilihat bahwa semakin tinggi tingkatan kelas ternyata jumlah siswa yang mengulang kelas laki-laki menurun, namun proporsi siswa mengulang laki-laki tetap lebih tinggi dari siswa perempuan. Kalau dilihat per kabupaten/kota di Sumbar proporsi siswa mengulang laki-laki secara umum lebih tinggi dari siswa perempuan. Ada beberapa Kab/kota proporsi mengulang siswa laki-laki sangat menonjol dibandingkan siswa perempuan seperti Kab.Pasaman (83%>17%), Pd.Panjang (95%>5%). Rata-rata untuk Sumbar persentase mengulang kelas siswa laki-laki lebih besar dari perempuan (2,2%>0,85%). Ditinjau dari SPM, ternyata persentase mengulang kelas siswa baik laki-laki maupun perempuan per tingkatan kelas berada di bawah SPM, artinya proses pendidikan yang dilaksanakan selama ini sudah dapat dikategorikan baik.

### 3). Putus Sekolah SMA/MA

#### (a). Putus Sekolah(DO) Siswa SMA/MA Tahun 00/01- 01/02- 02/03.

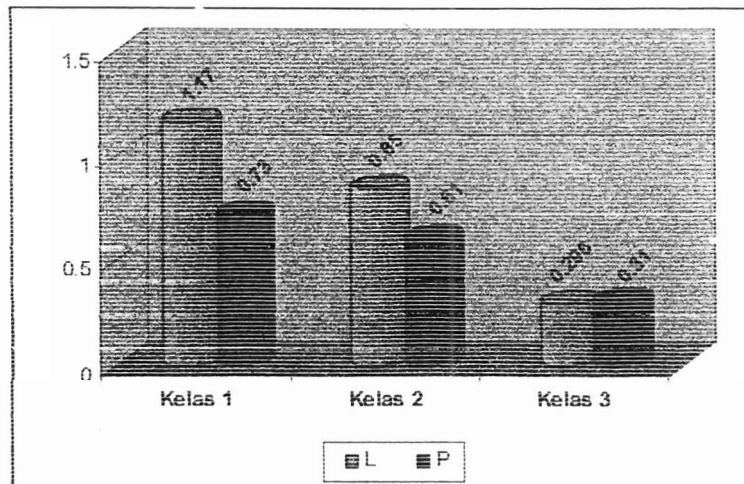


Sumber: Profil Dinas Pendidikan prov Sumbar 00/01- 01/02 – 02/03

Grafik di atas menunjukkan, untuk angka putus sekolah pada SMA/MA/SMK dapat dijabarkan sebagai berikut: (a). Tahun ajaran 00/01 : Pada SMA sebanyak 1,7%, pada MA sebanyak 1,6%, pada SMK sebanyak 1,8%, sedangkan secara keseluruhan SMA/MA/SMK sebanyak 1,7% ; (b). Tahun ajaran 01/02 : Pada SMA sebanyak 1,3%, pada MA sebanyak 0,9%, pada SMK sebanyak 1,9%, sedangkan secara keseluruhan SMA/MA/SMK sebanyak 1,5% ; (c). Tahun ajaran 02/03 : Pada SMA sebanyak 1,4%, pada MA sebanyak 0,8%, pada SMK sebanyak 1,5%, sedangkan secara keseluruhan SMA/MA/SMK sebanyak 1,4%.

Dibandingkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) putus sekolah untuk SMA/MA/SMK yaitu maksimal 1%, maka persentase putus sekolah tersebut terutama pada SMA dan SMK masih berada di atas 1%, namun pada jenjang MA persentasenya sudah menggembirakan berada di bawah 1% dan setiap tahunnya terus menurun.

(b). Putus Sekolah Siswa SMA/MA Tahun 2003/2004.

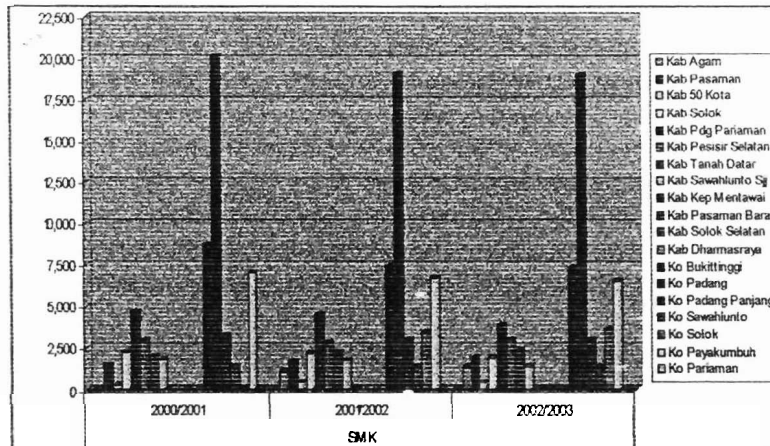


Sumber: Diolah dari data Dinas Pendidikan Kab/Kota prov Sumbar 2004

Diagram di atas menunjukkan, bahwa pada setiap tingkatan kelas proporsi siswa laki-laki yang putus sekolah lebih besar dari pada siswa perempuan. Semakin tinggi tingkatan kelas proporsi siswa laki-laki dan perempuan yang putus sekolah juga semakin menurun. Namun apabila dilihat perkabupaten /kota angka putus sekolah laki-laki jauh lebih besar dari siswa perempuan, lebih menonjol pada wilayah kabupaten Pasaman Barat. Rata-rata persentase siswa putus sekolah (DO) untuk Sumbar adalah :1,92% untuk laki-laki dan 1,03% untuk perempuan. Ditinjau dari Standard Pelayanan Minimum, dapat dikemukakan bahwa untuk siswa laki-laki kelas 1, persentase putus sekolah berada di atas SPM, sedangkan untuk kelompok lain pertingkatan kelas persentase putus sekolahnya berada di bawah SPM. Ini berarti kemampuan bertahan siswa laki-laki pada tingkatan kelas rendah kurang dibandingkan siswa perempuan.

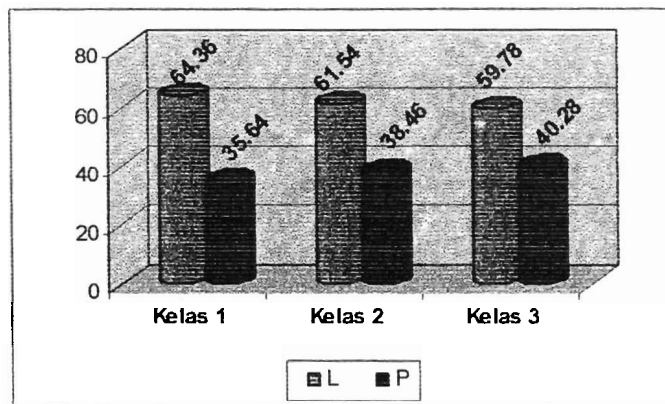
#### 4). Sekolah Menengah Kejuruan

##### (a). Proporsi Siswa SMK Tahun 00/01- 01/02- 02/03



Sumber: Profil Dinas Pendidikan prov Sumbar 00/01- 01/02 – 02/03

##### (b). Proporsi Siswa SMK Tahun 2003/2004.



Sumber: Dinas Pendidikan Kab/Kota prov Sumbar tahun 2004

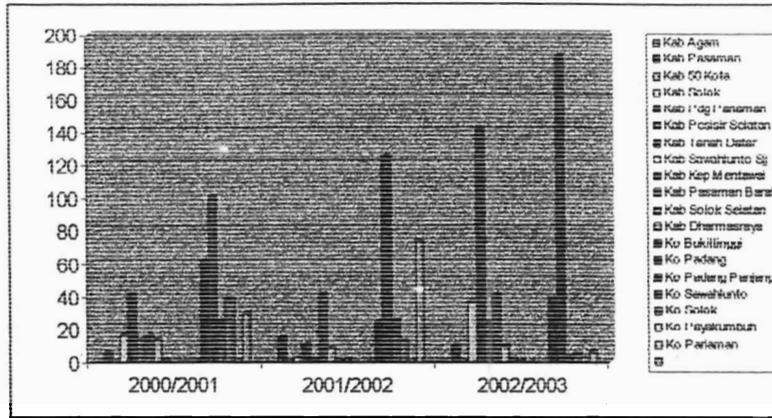
Diagram di atas menunjukkan, gap proporsi siswa laki-laki dan perempuan semakin tajam dilihat dari tingkatan kelas, namun per kabupaten/kota di Sumbar, siswa laki-laki dan perempuan hampir berimbang. Hal ini disebabkan karena SMK teknologi lebih didominasi oleh siswa laki-laki, sementara untuk SMK Busana dan Boga lebih didominasi perempuan, SMK Bisnis dan manajemen hampir menuju keberimbangan antara siswa laki-laki dan perempuan. Untuk Kab 50 Kota dan Kota Padang Panjang persentase siswa perempuan sangat minim ( $8\% < 92\%$ ) Lain halnya dengan kab. Pd.Pariaman persentase siswa perempuan berbeda tajam



berbeda tajam dengan laki-laki (85 %>15%). Hal ini disebabkan oleh variasi SMK yang ada di masing-masing kab/kota .

### 5). Mengulang Kelas Siswa SMK

#### (a). Mengulang Siswa SMK Tahun 00/01- 01/02- 02/03

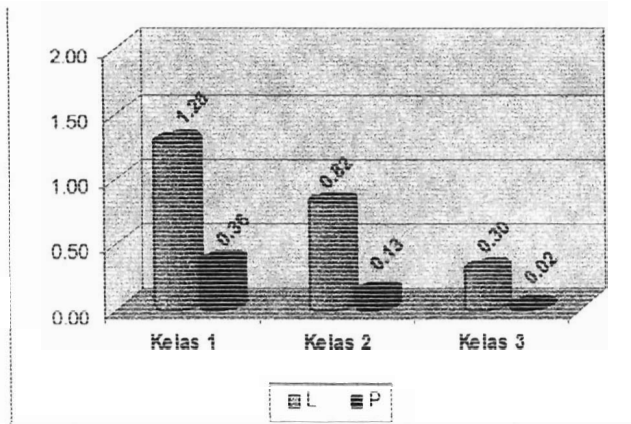


Sumber: Profil Dinas Pendidikan prov Sumbar 00/01- 01/02 – 02/03

Mengulang kelas SMK dapat dijelaskan sebagai berikut :

(a). Tahun 00/01 : 0,6% (b). Tahun ajaran 01/02 juga 0,6% sedangkan tahun ajaran 02/03 : sebesar 0,9%. Secara keseluruhan keadaan tersebut mencapai 0,7%. Dibandingkan dengan SPM yang maksimal 2% maka persentase mengulang kelas di tingkat SMK dapat dikatakan sudah berada di bawah syarat minimal.

#### (a). Distribusi Mengulang Siswa SMK Tahun 2003/2004

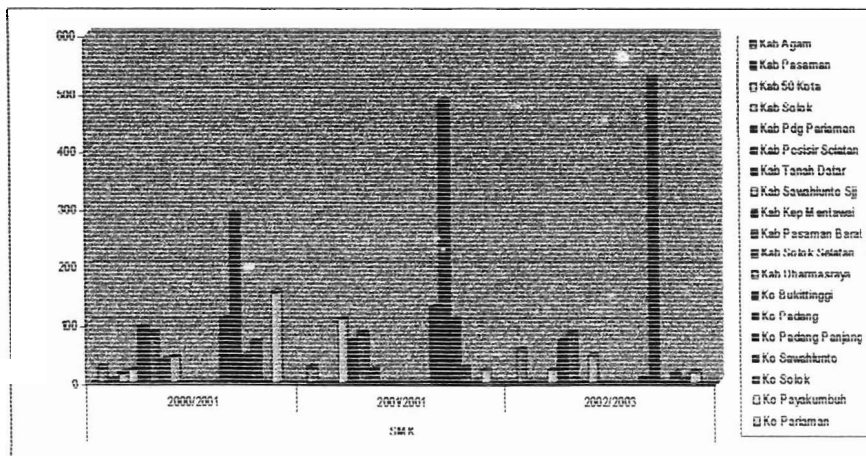


Sumber: Dinas Pendidikan Kab/Kota 2004

Diagram di atas berasal dari data pada Tabel 14, menunjukkan, bahwa semakin tinggi tingkatan kelas ternyata jumlah siswa yang mengulang kelas laki-laki juga menurun, namun proporsi siswa mengulang laki-laki tetap lebih tinggi dari siswa perempuan. Kalau dilihat per kabupaten/kota di Sumbar proporsi siswa mengulang laki-laki secara umum lebih tinggi dari siswa perempuan, kecuali Kab.Pd.Pariaman angka mengulang siswa perempuan lebih tinggi dari pada siswa laki-laki (75%>25%). Hal ini disebabkan karena SMK yang ada di Kabupaten ini didominasi oleh siswa perempuan. Lain halnya di Kota Padang proporsi mengulang siswa laki-laki berbeda secara tajam dengan siswa perempuan (95%>5%), pada hal SMK yang ada di kota ini sangat bervariasi. Ditinjau persentase mengulang kelas per tingkatan kelas dan dibandingkan dengan Standard Pelayanan Minimum (SPM), ternyata persentase mengulang kelas berada dibawah SPM. Hal ini berarti kualitas pendidikan yang dilaksanakan sudah dapat dikategorikan baik. Rata-rata untuk Sumbar persentase mengulang siswa laki-laki lebih besar dari perempuan (0,80%>0,17%).

## 6). Putus Sekolah Siswa SMK

### (a). Putus Sekolah (DO) Siswa SMK Tahun 00/01- 01/02- 02/03



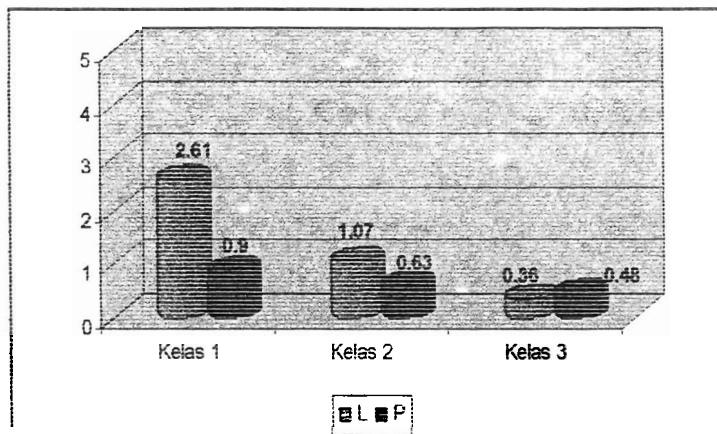
Sumber: Profil Dinas Pendidikan prov Sumbar 00/01- 01/02 – 02/03

Angka putus sekolah pada SMK dapat dijelaskan sebagai berikut :

- (a). Tahun ajaran 00/01 sebanyak 1,8%; (b) tahun ajaran 01/02 sebanyak 1,9%; (c). Tahun ajaran 02/03 sebanyak 1,5%. Dibandingkan dengan

Standar Pelayanan Minimal (SPM), sekolah untuk SMK maksimal disarankan 1%, maka persentase putus sekolah tersebut belum mencapai batas toleransi SPM.

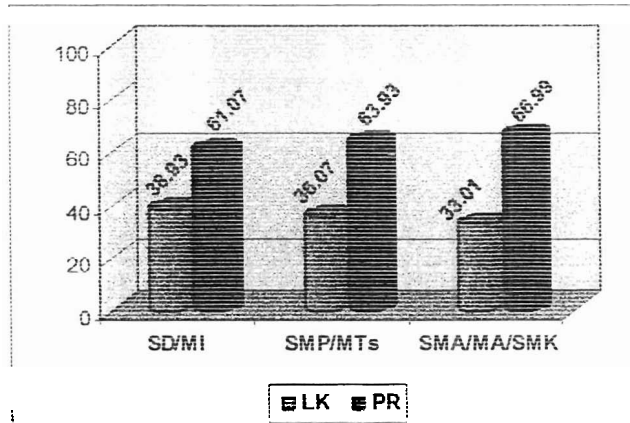
**b). Distribusi Putus Sekolah (DO) Siswa SMK Tahun 2003/2004**



Sumber: Profil Dinas Pendidikan prov Sumbar 00/01- 01/02 – 02/03

Diagram di atas berasal dari data pada Tabel 15. menunjukkan, bahwa pada setiap tingkatan kelas proporsi siswa laki-laki yang putus sekolah sedikit lebih besar dari pada siswa perempuan. Semakin tinggi tingkatan kelas proporsi siswa laki-laki dan perempuan yang putus sekolah juga semakin menurun. Namun apabila dilihat perkabupaten /Kota angka putus sekolah laki-laki jauh lebih besar dari siswa perempuan, namun ada kab/kota yang siswa perempuannya tidak ada yang putus sekolah (DO) seperti : Kab.50 Kota, Kota sawahlunto, Kota Pariaman. Rata-rata persentase siswa putus sekolah (DO) untuk Sumbar adalah :1,35% untuk laki-laki dan 0,67% untuk perempuan, berarti untuk siswa laki-laki jenjang pendidikan SMK Sumbar berada di atas SPM. Ditinjau dari Standard Pelayanan Minimum, dapat dikemukakan bahwa untuk siswa laki-laki kelas 1 dan kelas 2, persentase putus sekolah berada di atas SPM, sedangkan untuk kelompok lain per tingkatan kelas persentase putus sekolahnya berada di bawah SPM. Ini berarti kemampuan bertahan siswa laki-laki kurang dibandingkan siswa perempuan.

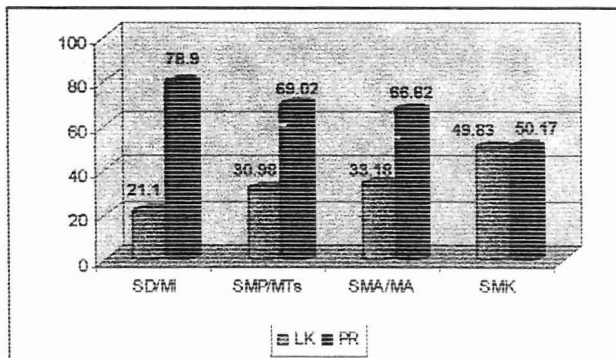
### 7). Penerima Beasiswa Tahun 2003/2004



Sumber: Diolah dari data Dinas Pendidikan Kab/Kota prov Sumbar 2004

Diagram dari data pada tabel lampiran 38 menunjukkan, bahwa dari 3358 siswa SD/MI penerima beasiswa terdiri atas 38,93% laki-laki dan 61,07% perempuan. Untuk jenjang SMP/MTs dari 3473 orang penerima beasiswa, sebanyak 66,07% laki-laki dan 63,93% perempuan. Selanjutnya pada jenjang SMA/MA/SMK dari 2318 penerima beasiswa, sebanyak 33,01% laki-laki dan 66,99% perempuan.

### 8). Proporsi Guru Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2003/2004



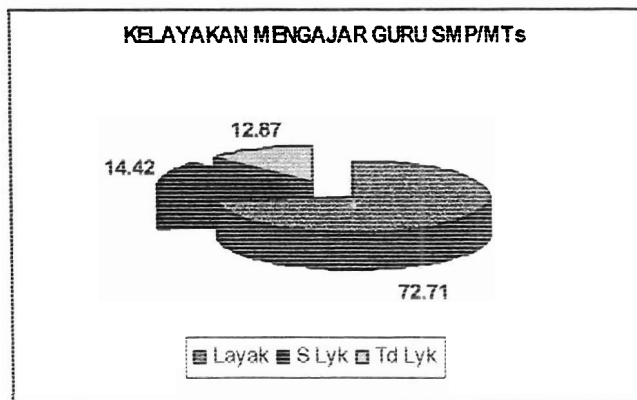
Sumber: Diolah dari data Dinas Pendidikan Kab/Kota prov Sumbar 2004

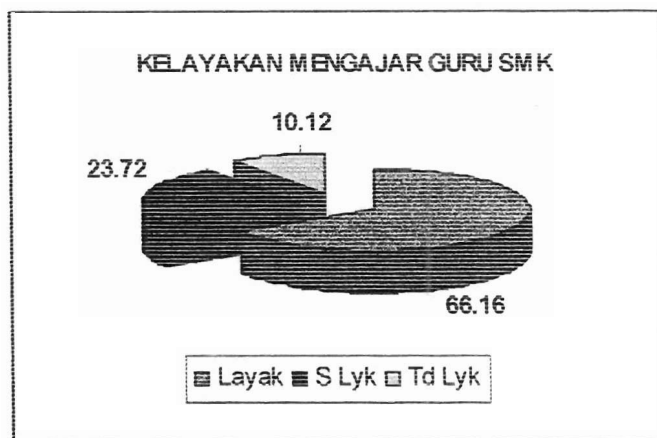
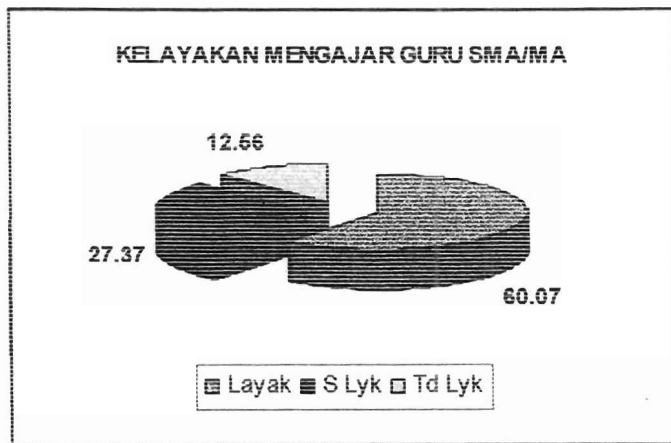
Diagram di atas menunjukkan, bahwa pada setiap jenjang pendidikan proporsi guru perempuan jauh lebih banyak dari pada guru laki-laki, namun pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, terlihat proporsi jumlah guru perempuan juga semakin menurun. Apabila dilihat proporsi guru di masing-

masing Kab/kota ternyata jumlah guru perempuan selalu lebih banyak dari jumlah guru laki-laki Rata-rata untuk Sumbar proporsi guru perempuan jauh lebih besar dari pada guru laki-laki. (72%>28%).

#### 9). Kelayakan Mengajar Guru Tahun 2003/2004

Berikut ditampilkan kelayakan mengajar para guru dari berbagai jenjang pendidikan di Sumatera Barat tahun 2003/2004 :

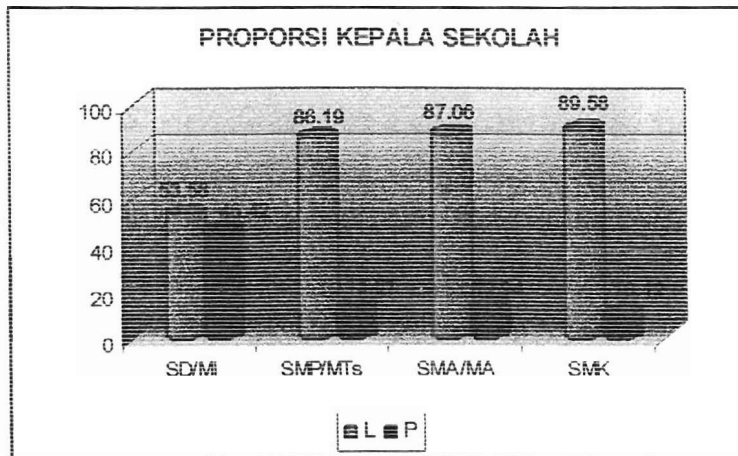




Sumber: Diolah dari data Dinas Pendidikan Kab/Kota prov Sumbar 2004

Dari grafik-grafik di atas terlihat bahwa pada tahun ajaran 2003/2004 di Sumatera Barat masih terdapat 4,86% guru SD/M; 12,87% guru SMP/MTs; 12,56% guru SMA/ MA; serta 10,12% guru SMK yang tidak layak mengajar. Sedangkan yang tingkat kelayakan mengajarnya adalah semi layak terdapat 27,67% guru SD/MI; 14,42 guru SMP/MTs; 27,37% guru SMA/MA dan 23,72% guru SMK. Namun semua data tersebut belum terlihat secara terpisah antara guru laki-laki dan perempuan.

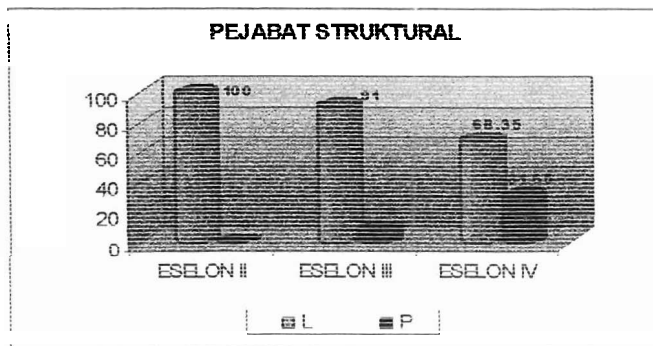
**10). Proporsi Kepala Sekolah Berdasarkan Jenjang Sekolah dan Jenis Kelamin Tahun 2003/2004**



Sumber: Diolah dari data Dinas Pendidikan Kab/Kota prov Sumbar 2004

Diagram di atas menunjukkan, bahwa pada setiap jenjang pendidikan proporsi Kepala Sekolah perempuan jauh lebih kecil dari pada laki-laki, namun semakin tinggi jenjang pendidikan proporsi Kepala Sekolah perempuan juga semakin menurun. Apabila dilihat proporsi Kepala Sekolah di masing-masing Kab/kota ternyata jumlah Kepala Sekolah perempuan selalu lebih sedikit dari pada Kepala Sekolah laki-laki Namun untuk Kab.Pasaman persentase Kepala Sekolah perempuan sangat minim yaitu hanya 1,14% ( hanya satu orang dari 88 orang Kepala Sekolah). Rata-rata untuk Sumbar Kepala Sekolah Perempuan jauh lebih sedikit dari pada laki-laki. ( $38,28\% < 61,72\%$ ).

**11). Proporsi Pejabat Struktural Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin Tahun 2003/2004**



Sumber: Diolah dari data Dinas Pendidikan Kab/Kota prov Sumbar 2004

Diagram di atas menunjukkan, bahwa semakin rendah eselon maka jumlah perempuan yang menduduki jabatan struktural meningkat. Namun di Sumatera Barat tidak satupun perempuan yang menduduki eselon II, tetapi di beberapa Kab/kota ada juga kaum perempuan yang menduduki jabatan eselon III di lingkungan Dinas Pendidikan. Apabila dilihat proporsi perempuan yang memegang jabatan struktural sampai ke eselon IV di masing-masing Kab/kota ternyata jumlah laki-laki tetap lebih banyak dari pada perempuan, namun sudah ada peningkatan proporsi perempuan. Rata-rata untuk Sumbar proporsi pejabat struktural perempuan jauh lebih kecil dari pada laki-laki yaitu (24,06% : 75,94%).

## **2. Pendidikan Non Formal**

Pendidikan non formal berfungsi mengembangkan potensi siswa dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Pendidikan non formal meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan dan lain-lain. Analisis kebijakan pendidikan non formal berwawasan gender belum dapat dilakukan secara optimal karena minimnya data pendidikan non formal yang terpilah gender.

### **. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

Pendidikan anak usia dini merupakan upaya pelayanan pendidikan bagi anak usia 0-6 tahun yang dilaksanakan di lingkungan yang berpengaruh terhadap proses tumbuh kembang anak, dengan maksud agar anak kelak memiliki kesiapan memasuki pendidikan dasar. Lingkungan tersebut antara lain keluarga, sekolah ataupun tempat-tempat pengasuhan anak. Tujuan program PADU antara lain, memperluas dan memperbaiki keseluruhan perawatan dan pendidikan anak dini usia, terutama bagi anak-anak yang sangat rawan dan kurang beruntung. Perawatan bagi anak usia dini merupakan upaya untuk memberikan pengasuhan, perlindungan dan pemeliharaan kepada anak agar terlindungi dari berbagai ancaman



penyakit, kekurangan gizi, tindak kekerasan dan penelantaran serta tindakan lain yang menyebabkan kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi secara wajar.

Tabel berikut menggambarkan jenis dan angka keterlayanan program PAUD tersebut:

**Tabel. 7 : Ratio dan Angka Keterlayanan PAUD di SUMBAR**

No	Lembaga	Jumlah Penduduk	Ratio	Jlh Lembg	Terlayani	Belum Terlayani	Dibthkan
1.	Posyandu(0-5 th)	548.301	1:30	6626	198.760(36,25)	349.541(63,75)	11.651
2.	BKB (0-5 th)	548.301	1:30	28.139	28.139(5,13%)	520.162(94,87%)	2.823
3.	TPA (0-3 th)	353.762	1:30	31	1.565(0,44%)	352.197(99,56%)	7.045
4.	Klp Bermain (3-4th)	189.709	1:32	34	1.079(0,56%)	188.630(99,44%)	5.895
5.	RA (4-6 th)	293107	1:25	310	7611 (2,6%)	285.496(97,4%)	6.382
6.	TK (4-6) th	293107	1:25	1331	50.606/17,27%	242.501/82,73%	6.382

*Sumber: Dinas Pendidikan prov Sumbar 2003*

### (1). Posyandu

Posyandu merupakan wahana kesejahteraan ibu dan anak yang berfungsi sebagai tempat pelayanan terpadu yang mencakup aspek perawatan kesehatan dan gizi, terutamabagi ibu hamil dan anak usia 0-5 tahun. Data Posyandu di atas menunjukkan bahwa masih diperlukan penambahan posyandu guna melayani pendidikan anak-anak usia 0-5 tahun, akses layanan pendidikan bagi anak-anak pada Posyandu baru mencapai 36,25% dengan demikian sekitar 63,75% lagi belum terlayani.

### (2). Bina Keluarga Balita (BKB)

BKB yang merupakan lembaga swadaya masyarakat yang merupakan kelompok beranggotakan para orang tua yang memiliki anak usia 0-5 tahun, yang pengelolaannya dilakukan oleh kader. Di banyak tempat kegiatan BKB dan Posyandu dilakukan secara terpadu, namun dari angka keterlayanan pada tabel di atas, menunjukkan bahwa baru 5,13% BKB yang aktif, sehingga perlu adanya penambahan lembaga ini sebanyak 28.139

### **(3). Taman Penitipan Anak (TPA)**

TPA merupakan tempat pelayanan perawatan dan pendidikan terhadap anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk waktu tertentu bagi anak yang orang tuanya berhalangan. Dari tabel 1. terlihat jumlah lembaga TPA masih sangat sedikit, yaitu dengan tingkat keterlayanan baru 0,44%, sedangkan 99,56% lainnya masih belum terlayani.

### **(4). Kelompok Bermain/Play group**

Jumlah kelompok bermain baru mencapai 34 buah guna melayani 1.079 anak atau 0,56% dengan ratio 1 : 32 dari jumlah penduduk usia 3-4 tahun sebanyak 189.709 anak. Dengan demikian masih banyak lagi diperlukan lembaga Play Group

### **(5). Taman Kanak-Kanak (TK)**

Pendidikan di TK adalah membantu meletakkan dasar ke arah pengembangan sikap, perilaku, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta anak untuk pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya. Dari tabel 16 diketahui bahwa baru 17,27%, masih dibutuhkan sebanyak 6382 TK lagi guna melayani kebutuhan pendidikan jenjang ini

### **(6). Raudhatul Athfal (RA)**

Tujuan penyelenggaraan RA sama halnya dengan TK, adalah untuk membantu meletakkan dasar bagi perkembangan sikap, perilaku, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta anak untuk pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya. Bedanya hanya terletak pada nuansa keagamaannya. Dari tabel 1. terlihat bahwa persentase keterlayanan anak pada lembaga ini masih sangat rendah yaitu 2,6%, masih sangat banyak dibutuhkan keberadaan lembaga ini.

### b. Pendidikan Keaksaraan Berkelanjutan

Kondisi penduduk buta aksara dipengaruhi oleh faktor ekonomi, geografis, putus sekolah dan lain-lain. Data Sumbar tentang kondisi penduduk digambarkan sebagai berikut:

**Tabel .8**  
Persentase penduduk 10 tahun ke atas menurut kelompok umur dan kemampuan baca tulis

No	Kelomp Umur	Dapat baca tulis				Tdk dpt baca tulis	
		Hrf latin		Hrf lainnya		L	P
		L	P	L	P		
1.	10 – 14	98,46	99,95	0,30	0,09	1,24	0,36
2.	15 - 19	99,28	99,33	0,02	-	0,70	0,67
3.	20 - 24	98,28	98,61	0,38	0,16	1,34	1,2
4.	25 - 29	98,81	98,20	-	-	1,18	0,80
5.	30 – 34	99,06	98,48	-	0,28	0,94	1,24
6.	35 – 39	98,95	96,47	0,02	0,09	1,04	3,44
7.	40 - 44	97,82	93,52	0,28	0,64	1,90	5,84

Sumber: Rencana Aksi PUS Dinas Pendidikan Sumbar 2003

Dari tabel di atas terlihat bahwa kemampuan baca tulis huruf latin laki-laki pada usia dewasa berada di atas perempuan. Penduduk usia 10 tahun ke atas yang tidak mampu membaca dan menulis mencapai 4% lebih. Laki-laki buta huruf sekitar 3,01%, angka ini lebih rendah dari perempuan yang mencapai 5,69%.

Selanjutnya dapat dilihat proporsi penduduk kota dan desa yang berdasarkan jenis kelamin berkaitan dengan melek huruf di setiap kabupaten/kota

**Tabel .9**  
Proporsi Penduduk Umur 10 tahun ke atas Melek Huruf Menurut Kab/kota, Desa/kota dan Jenis Kelamin

No	KAB/KOTA	Dapat membaca menulis				Tidak dapat membaca menulis				Total
		Kota		Desa		Kota		Desa		
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Kab Kep Mentawai	3.310	3.636	20.856	17.128	42	87	1.492	2.053	48.604
2	Kab Pess Selatan	19.051	17.702	130.742	124.708	210	209	4.890	11.248	308.762
3	Kab Solok	12.513	15.882	146.925	150.089	160	320	4.374	7.696	337.960
4	Kab Sawahlunto Sji	10.661	11.384	101.768	92.701	0	363	9.825	18.011	244.713
5	Kab Tanah Datar	13.550	16.510	103.151	117.333	0	141	3.892	6.672	261.249
6	Kab Pdg Pariaman	32.343	32.145	118.384	132.717	268	268	5.378	13.151	334.434
7	Kab Agam	34.343	39.003	118.123	124.568	0	1.200	3.802	8.264	329.303
8	Kab 50 Kota	3.571	3.876	120.347	122.315	152	152	1.939	3.741	258.093
9	Kab Pasaman	23.066	23.979	160.903	162.161	458	1.376	7.295	12.715	391.954
10	Ko Padang	238.429	255.553	38.316	40.695	1.534	3.945	1.322	2.642	582.436
11	Ko Solok	17.481	19.593	136	122	228	633	9	25	38.227
12	Ko Sawahlunto	10.740	11.873	8.519	9.142	96	513	317	385	41.585
13	Ko Pdg Panjang	12.607	14.316	1.853	2.202	67	377	0	0	31.422
14	Ko Buikittinggi	35.311	37.769	0	0	280	1.039	0	0	74.379
15	Ko Payakumbuh	25.644	26.760	12.055	12.583	441	922	417	759	79.581
	<b>Sumatra Barat</b>	<b>492.422</b>	<b>529.981</b>	<b>1062059</b>	<b>1108464</b>	<b>3.916</b>	<b>11.545</b>	<b>44.952</b>	<b>87.363</b>	<b>3360702</b>

Sumber: Rencana Aksi PUS Dinas Pendidikan Sumbar 2003

Dilihat dari lokasi tempat tinggal, proporsi buta huruf penduduk usia 10 tahun ke atas di daerah pedesaan lebih besar (11%) bila dibandingkan dengan daerah perkotaan (4,7%). Proporsi ini mengindikasikan bahwa penyebab terjadinya buta huruf juga ditentukan oleh letak geografis, di samping faktor kemiskinan dan dari wawancara mendalam yang dilakukan pada dua kab/kota dengan IPJ tinggi dan rendah yaitu kota Padang dan Kab Agam, informasi tambahan diperoleh bahwa faktor budaya juga ikut menjadi penyebab besarnya angka buta huruf perempuan dibandingkan laki-laki terutama di pedesaan.

Kemudian dilihat dari faktor lokasi tempat tinggal dan jenis kelamin, penduduk perempuan di desa (87,363) merupakan kelompok penduduk yang memiliki angka buta huruf lebih besar dari laki-laki di desa (44.952), demikian juga dengan perempuan di kota (11.545).

### c. Pendidikan Kesetaraan

Pelayanan pendidikan kesetaraan dimaksudkan untuk: (a). Mendukung penuntasan wajib belajar 9 tahun bagi peserta didik usia sekolah dari anak petani/nelayan miskin, santri salafi, anak jalanan, pekerja anak, etnik minoritas/pulau2 terpencil, anak lapas/eks lapas, anak PSK/eks PSK. ; (b). Melayani peserta didik dewasa yang berasal dari petani & nelayan, santri salafi, karyawan, etnik Minoritas/pulau2 terpencil dan kelompok masyarakat bermasalah sosial/hukum/ekonomi.

**Tabel .10. Program Paket A dan B**

	Uraian	Jlh penddk	Paket A	Paket B
1	Jumlah kelompok belajar	Tdk dpt	123	345
2	Jumlah warga belajar	baca tulis	2.352	6.322
3	Penyelenggara	147.776		
	▪ SKB		7	7
	▪ PKBM		11	35
	▪ Pondok Pesantren		25	12

Sumber: Profil Pendidikan Sumatra Barat 2003/2004

Tingkat keterlayanan program kesetaraan menunjukkan jumlah warga belajar Paket A dan Paket B, adalah sebesar 16,25%. Kemudian

dibandingkan dengan jumlah siswa SD/MI dan SMP/MTs relatif sangat kecil. Untuk Paket A sebesar 0,27% dari jumlah siswa SD, demikian juga dengan jumlah warga belajar Paket B sebesar ,73% dari jumlah siswa SMP.

(1). *Kejar Paket A*

Standar Pelayanan Minimal untuk pendidikan kesetaraan adalah: (a).Perluasan dan pemerataan kesempatan belajar pada Paket A sebesar 100% terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang tidak tertampung di SD/MI, (b). Angka putus belajar pada Paket A adalah 1% dari jumlah warga belajar yang terdaftar.

(2). *Kejar Paket B*

Standar Pelayanan Minimal untuk pendidikan kesetaraan adalah: (a).Perluasan dan pemerataan kesempatan belajar pada Paket B sebesar 100% terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang tidak tertampung di SMP/MTs ; (b). Angka putus belajar pada Paket A adalah 1% dari jumlah warga belajar yang terdaftar.

**c. Life Skill**

Jumlah penduduk Sumatra Barat pada tahun 2002 menurut hasil Susenas 4.289.647 jiwa, dari jumlah tersebut yang termasuk usia angkatan kerja sebanyak 1.77.217 jiwa dan yang terlayani dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel .11. Penduduk Bekerja dan Tingkat Kesempatan Kerja**

No	Kab/kota	Laki-Laki		Perempuan		Total	
		Bekerja	TKK (%)	Bekerja	TKK (%)	Bekerja	TKK (%)
1	Kab Kep Mentawai	18.611	98.78	4.870	97.48	23.481	98.51
2	Kab Pess Selatan	99.910	95.07	37.992	87.11	136.902	92.72
3	Kab Solok	109.720	97.26	71.237	93.60	180.957	95.79
4	Kab Sawahlunto Sjj	89.188	99.17	45.098	95.05	134.287	97.75
5	Kab Tanah Datar	82.138	96.25	45.127	90.24	127.265	94.03
6	Kab Pdg Pariaman	92.711	95.39	58.760	94.75	151.471	95.14
7	Kab Agam	101.902	96.22	70.723	94.64	172.625	95.57
8	Kab 50 Kota	92.577	96.81	61.833	92.92	154.450	95.21
9	Kab Pasaman	130.333	97.93	86.681	94.45	217.014	96.51
10	Ko Padang	162.472	90.82	79.254	83.45	214.726	88.27
11	Ko Solok	10.797	90.15	4.804	85.27	15.601	88.59
12	Ko Sawahlunto	12.579	93.08	6.499	89.98	19.078	92.00
13	Ko Pdg Panjang	9.147	93.06	5.882	89.90	15.029	91.80
14	Ko Bukittinggi	22.792	93.57	14.690	85.49	37.482	90.23
15	Ko Payakumbuh	24.941	94.45	14.962	89.76	39.903	92.64
<b>Sumatra Barat</b>		<b>1.058.818</b>	<b>95.58</b>	<b>608.412</b>	<b>91.43</b>	<b>1.667.230</b>	<b>94.02</b>

Sumber: Rencana Aksi PUS Dinas Pendidikan Sumbar 2003

Perbandingan jumlah penduduk usia kerja dengan jumlah penduduk usia kerja yang terlayani diperoleh kesimpulan bahwa jumlah penduduk yang tidak terlayani secara kuantitatif sebesar 105.987 jiwa (5,98%) dan sudah terlayani 1.667.230 jiwa (94,02 %). Pada perbandingan TKK antar kab/kota di atas terlihat bahwa Kep. Mentawai menduduki peringkat (98.51%) yang berarti bahwa 100 orang angkatan kerja 98 orang bekerja, kemudian hampir sebagian besar perempuan di Kep. Mentawai aktif bekerja.

Pada umumnya pekerjaan yang mereka lakukan adalah pertanian dengan teknologi rendah. Kota Padang berada pada posisi terendah dengan TKK sebesar 88,27 %. Kota Padang sebagai ibu kota provinsi Sumatra Barat, merupakan sentral aktivitas perekonomian yang diminati oleh para pencari kerja tetapi lapangan pekerjaan yang terbatas sehingga tingkat kesempatan kerjanya rendah.

Berdasarkan data Susenas 2002, penduduk bekerja dengan pendidikan SLTA ke atas baru mencapai 475.189 orang atau 28,50 % sedangkan yang lain dengan pendidikan SLTP ke bawah ada yang belum sekolah. Rendahnya pendidikan tenaga kerja mencerminkan masih rendahnya mutu pekerjaan yang dilakukan masyarakat yang mengakibatkan lambannya perkembangan ekonomi masyarakat.

Kegiatan life skill yang terlayani dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel. 12. Data Pokok Program Kejar Usaha Sumbar 2002**

No	Kegiatan	Jumlah	Peserta
1	Kelompok Kejar Usaha		133
2	Warga Belajar		1645
	Laki-laki		743
	Perempuan		902
3	SKB	1	
	PKBM	70	
	Pondok Pesantren	5	
	Ormas Masyarakat	31	
	Perorangan	207	
	Lainnya	15	

Sumber: Rencana Aksi PUS Dinas Pendidikan Sumbar 2003

Dari data pokok program kejar usaha di atas hanya dapat diambil kesimpulan bahwa ada 133 kejar usaha yang melayani 1645 warga belajar

yang diselenggarakan oleh SKB , PKBM, pondok pesantren dan seterusnya namun jumlah sasaran dicapai dan jumlah warga belajar yang sudah berhasil belum dapat diungkapkan.

### **3. Analisis Materi Pelajaran Sekolah Dasar : Mutu dan Relevansi Pendidikan**

#### *(1). Bahan Ajar Muatan Lokal*

Berdasarkan SK Kanwil Depdikbud Provinsi Sumatra Barat Nomor 012.08.C.1994 tanggal 1 Februari 1994, dan disesuaikan dengan SK Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Barat nomor KPTS 001/08.KP/2002 tanggal 11 November 2002 tentang Kurikulum muatan lokal pendidikan Dasar, mata pelajaran Budaya Alam Minangkabau atau disingkat dengan BAM menjadi salah satu mata pelajaran muatan lokal yang wajib diberikan mulai dari kelas tiga sekolah dasar (SD) sampai kelas tiga sekolah menengah pertama (SMP). Pembelajaran BAM bertujuan agar tata nilai budaya alam Minangkabau yang berlaku di Ranah Minang dapat dilestarikan. Tujuan itu sangat mulia, hanya saja dalam cukup banyak hal nilai-nilai tradisional masih mengandung bias gender yang pada kasus-kasus tertentu cenderung diskriminatif terhadap perempuan.

Sehubungan dengan itu, peneliti menganalisis buku BAM yang dipakai mulai dari kelas tiga SD sampai kelas tiga SMP yang diterbitkan oleh penerbit Angkasa Raya Padang, dan Usaha Ikhlas Bukittinggi. Penulis buku ini berjumlah enam orang, semuanya laki-laki. Analisis buku difokuskan pada dua aspek yaitu peran dan posisi laki-laki dan perempuan yang tergambar dalam kalimat maupun ilustrasi gambar. Peran dilihat dalam tiga kategori yaitu peran reproduktif (domestik), peran produktif (publik), dan peran sosial kemasyarakatan. Sementara posisi dilihat dari kategori penentu kebijakan dan bukan penentu kebijakan.

(a). Peran

Tidak berbeda dengan kondisi buku-buku pelajaran lainnya yang pernah dianalisis, buku BAM juga dan bahkan menggambarkan secara lebih ketat pemilahan peran laki-laki dan perempuan. Perempuan mendominasi peran reproduktif dalam wilayah domestik, sedangkan laki-laki mendominasi peran produktif dalam wilayah publik. Hal ini ditemukan misalnya dalam ilustrasi yang menggambarkan hanya laki-laki yang berada di sawah pada halaman 30 (buku BAM kelas 1 SMP, Angkasa Raya Padang), dan pada halaman 85 (buku BAM kelas IV SD, Usaha Ikhlas, Bukittinggi). Sementara perempuan di ranah domestik tergambar dalam ilustrasi dimana seorang perempuan meletakkan air minum untuk dua orang laki-laki yang sedang berbincang-bincang di rumah kalimat dengan judul gambar "Sumando sedang memperbincangkan sesuatu dengan mamak" pada halaman 51 (buku BAM kelas VI SD, Usaha Ikhlas, Bukittinggi). Pada ilustrasi yang lain ditemukan seorang ibu yang mengasuh bayinya pada halaman 103 (buku BAM Kelas III SD, Usaha Ikhlas, Bukittinggi).

Dalam model yang berbeda, domestikasi perempuan terlihat jelas disosialisasikan dalam buku BAM kelas tiga SMP, Usaha Ikhlas, Bukittinggi pada halaman 24 dalam topik Fungsi Adat dan Penerapannya, yang dimulai dengan kato pusako: *sigai mencari anau, anau tatap sigai baranjak, datang dek bajapuik, pai dek baanta, ayam putih tabang siang, basuluah mato hari, bagalanggan jo mato rang banyak*. Selanjutnya dijelaskan oleh penulis tentang posisi perempuan dalam perkawinan dan perceraian, berikut kutipannya:

"... Kalau terjadi perceraian, laki-laki (suami) yang meninggalkan rumah. Bekas istri tetap tinggal di rumah bersama anak dan keluarganya. Hal itu menunjukkan adat Minangkabau sangat menghargai perempuan atau kaum Ibu yang lemah. Jika istri yang pergi kalau terjadi perceraian, ia akan menderita karena secara kodrati ia makhluk yang lemah dibandingkan dengan laki-laki

Kutipan kalimat di atas secara jelas menggambarkan bias gender yang sangat kental dalam menafsirkan nilai-nilai adat tentang laki-laki dan



perempuan di Minangkabau. Kalimat tersebut juga mengandung makna bahwa dalam perspektif penulis buku, perempuan sangat tergantung baik secara sosial maupun ekonomi kepada orang lain (laki-laki). Padahal dalam kenyataannya perempuan Minangkabau adalah perempuan yang mandiri. Hal ini dapat diamati dalam kehidupan sosial masyarakat Minangkabau dimana perempuan mempunyai kemandirian yang lebih baik dibandingkan dengan perempuan dalam masyarakat lain terutama dalam kemiskinan keluarga dan ketiadaan suami karena bercerai atau meninggal. Bahkan dalam cukup banyak kasus ibu tunggal banyak berhasil mendidik anak-anak mereka menjadi "orang".

Selanjutnya dalam peran sosial kemasyarakatan hampir semua buku BAM memperlihatkan adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini misalnya dapat dilihat dalam kegiatan-kegiatan yang terkait dengan upacara adat seperti turun mandi, aqikah, perkawinan, dimana laki-laki dan perempuan berperan bersama. Hanya saja dalam beberapa aspek tetap terlihat pembagian peran domestik bagi perempuan dan publik bagi laki-laki.

Pemisahan yang ketat antara wilayah peran laki-laki (publik) dan perempuan (domestik) dalam adat Minangkabau dapat dilihat dalam kato adat berikut ini:

*Karatau madang di hulu  
Babuah babungo balun  
Marantau bujang (laki-laki) dahulu  
Di rumah baguno balun*

Artinya, secara adat laki-laki diberi keleluasaan dan di support untuk memasuki dunia luar, yang biasanya tidak hanya dimanfaatkan untuk mencari uang (berdagang) tetapi juga dimanfaatkan untuk menuntut ilmu. Hal ini disinyalir sebagai salah satu penyebab mengapa rasio gender dalam pendidikan di Sumatra barat relatif tinggi. Sementara perempuan tetap berada di lingkungan rumah gadangnya dalam arti perannya yang utama adalah dalam ranah domestik, sebagaimana kato adat berikut:

*Bundo kanduang limpapeh rumah nan gadang  
Sumarak dalam nagari  
Hiasan di dalam kampuang  
Umbun puro pagangan kunci*

Sehubungan dengan itu, Postel dalam (Fatmariza, 1999) menyatakan bahwa rantau (publik) adalah dunianya laki-laki, sedangkan kampung (domestik) adalah dunianya perempuan. Dengan merantau laki-laki minangkabau menjadi lebih dimamis dan mobilitasnya tinggi, sebaliknya kaum perempuan menjadi statis atau mobilitasnya relatif rendah.

Selanjutnya adat Minangkabau juga mempunyai dua sudut pandang yang berbeda dengan tujuan yang berbeda dalam memberi pengajaran kepada anak laki-laki dan anak perempuan. Perempuan dididik untuk menyiapkan mereka pada peran domestiknya, sedangkan anak laki-laki dididik untuk menyiapkan dirinya memasuki dunia publik, yang dapat dibaca dalam kutipan *kaba* berikut ini

*Sanyampang baranak parampuan, aja mangaji jo manyurek, aja mayukie jo batanun, tahu malukih manarawang, tahu disuri mato karok, tahu dipakan rabah tagak, tahu diamba jo nan asin, kok inyo indak baitu, gadang sasalan kamudian, agak suka buliah minantu, antah kok jadi sumbarangnyo*

*Kalau baranak laki-laki, baru barumua anam tahun, siang masukkan ka sikola, patang di rumah diajari, malam disuruhnyo ka surau, duo tigo jarek tatahan, salah satu manganai juo. Kok sampai balig baraka ditambah juo pangajian, ajari banatu nak kanduang, limbago pakaian urang muda (Kaba Rancak Di Labuah, Pamuncak 1998:78)*

Artinya:

Jika punya anak perempuan ajar mereka mengaji dan menulis. Ajar menenun, membordir, menjahit, arif bijaksana, pandai memasak, kalau tidak begitu akan terjadi penyesalan di kemudian hari karena sulit mendapatkan jodoh, kecuali laki-laki sembarangan

Jika punya anak laki-laki, usia enam tahun masukkan ia ke sekolah, sore ajari di rumah, malam mengaji di surau, dengan persiapan maksimal, maka dapat diyakini anak laki-laki akan berhasil, belajar tetap dilanjutkan sampai dewasa

Dari kaba tersebut di atas tercermin perbedaan pendidikan dan harapan adat minangkabau terhadap anak laki-laki dan anak perempuan, dimana anak perempuan dipersiapkan untuk berperan di dunia domestik menjadi istri dan *bundokanduang*, sedangkan laki-laki dipersiapkan untuk berperan di dunia publik menjadi *niniak mamak*, *alim ulama*, dan *cadiak pandai*.

#### (b) Posisi

Posisi dalam penelitian ini difokuskan pada kedudukan laki-laki dan perempuan dan perannya sebagai pengambilan keputusan baik dalam wilayah domestik maupun wilayah publik. Perbedaan peran dan wilayah peran laki-laki dan perempuan yang relatif berbeda akan berpengaruh terhadap posisi mereka sebagai pengambil keputusan. Berdasarkan analisis terhadap buku BAM dapat dikemukakan beberapa aspek terkait dengan posisi laki-laki dan perempuan sebagai pengambil keputusan baik di dalam rumah tangga, maupun di luar rumah, atau dalam masyarakat dan pemerintahan.

Mengamati topik "kepemimpinan dalam masyarakat minang-kabau" dalam buku BAM kelas 1 SMP, Angkasa Raya, Padang, baik dalam kalimat maupun dalam gambar yang ditampilkan pada halaman 16-17 yang menjadi pemimpin hanya laki-laki. Pemimpin dalam masyarakat Minangkabau terdiri dari *tungku tigo sajarangan*, yaitu *niniak mamak*, *alim ulama* dan *cadiak pandai*. Hal yang hampir sama juga ditemukan dalam buku BAM kelas 3 SMP, Usaha Ikhlas, Bukittinggi pada ilustrasi gambar halaman 38. Persoalannya adalah, dalam zaman yang semakin modern dan perubahan yang terjadi penulis buku tetap menafikan keberadaan perempuan dalam konstelasi kepemimpinan dalam masyarakat Minangkabau. Menurut hemat penulis dengan pendidikan yang semakin baik maka perempuan Minangkabau dapat berperan sebagai pemimpin dalam posisi *cadiak pandai* dan *alim ulama*.

Di dalam rumah tangga laki-laki baik sebagai Bapak (*sumando*) atau sebagai *mamak* mempunyai posisi yang relatif tinggi. Karena itu dalam

cukup banyak hal terutama dalam "memberi pengajaran" laki-laki lebih berperan. Hal ini dapat ditemukan dalam buku BAM kelas III SD, Usaha Ikhlas, Bukittinggi, dalam topik "Nasihat mak datuak tentang berbicara". Di samping tokoh utamanya atau pemberi pelajarannya adalah mak datuak (laki-laki), yang diberi pelajaran dalam hal ini tokohnya juga laki-laki yaitu Budi, dan Ihsan. Secara lebih jelas penulis buku menggambarkan ilustrasinya pada halaman 16.

Dalam buku yang sama pada topik "berbicara dengan orang lain" semua tokohnya juga laki-laki, dan satu laki-laki dewasa yang dapat dilihat dalam gambar pada halaman 22 dimana gambar tersebut menceritakan bagaimana seorang anak berbicara dengan anak lebih kecil, sesama besar dan dengan orang tua. Ilustrasi ini akan menjadi lebih baik apabila tokoh-tokohnya terdiri dari laki-laki dan perempuan, sehingga dapat disosialisasikan kesetaraan dalam menghargai antar sesama. Namun dalam topik "sopan santun" sudah terlihat lebih setara yang dapat dilihat dalam gambar pada halaman 27.

Sebuah kesimpulan yang dapat ditarik dari buku BAM kelas III SD, Usaha Ikhlas, Bukittinggi ini adalah bahwa si pemberi pelajaran adalah laki-laki. Artinya laki-laki digambarkan punya posisi (ilmu pengetahuan, kedudukan, kekuasaan, moral) lebih tinggi. Sementara perempuan di samping sangat sedikit juga diposisikan sebagai orang yang tidak mempunyai power.

Selanjutnya dalam perundingan atau musyawarah dalam rumah terlihat bahwa yang ikut bermusyawarah adalah laki-laki, baik dalam posisinya sebagai mamak, sumando, ataupun sebagai kemenakan. Hal ini dapat ditemukan dalam gambar-gambar pada buku BAM kelas VI SD Usaha Ikhlas, Bukittinggi pada halaman 51, dan 57, 63 dengan judul gambar "Sumando sedang memperbincangkan sesuatu dengan mamak di rumah gadang Minangkabau", dan "Mamak dan kemenakan sedang bermusyawarah di rumah gadang", "Mamak sedang menunjuki kemenakan laki-laki dan kemenakan perempuan di dampingi oleh ibunya". Dalam

gambar terakhir, meskipun dua dari empat tokoh yang ada adalah perempuan, mereka hanya berada pada posisi sebagai penerima (pasif).

## *(2) Buku Ajar Terbitan Lokal*

Berdasarkan observasi yang dilakukan terhadap beberapa sekolah dan wawancara dengan beberapa orang guru, secara umum buku-buku yang dipakai di Sekolah Dasar di Sumatra Barat terdiri dari buku-buku paket dari Departemen Pendidikan Nasional, buku-buku yang diterbitkan oleh penerbit di Sumatra Barat, dan buku-buku yang diterbitkan oleh penerbit di Pulau Jawa.

Berikut penerbit buku-buku pelajaran SD yang umumnya dipakai di Sekolah Dasar di Sumatra Barat:

0. Grafindo (Bandung)
0. Intan Pariwara (Klaten)
0. Tiga Serangkai (Solo)
0. Yudhistira (Jakarta)
0. Usaha Ikhlas (Bukittinggi, Sumbar)
0. Angkasa Raya (Padang, Sumbar)
0. Tiga Sari Utama (Padang, Sumbar)
0. Gunung Bungsu (Padang)

Dalam penelitian ini buku-buku pelajaran SD yang dianalisis terdiri dari buku-buku yang diterbitkan oleh penerbit di Sumatra Barat. Hal ini karena buku-buku yang diterbitkan di Jawa sudah pernah dianalisis oleh peneliti-peneliti di Pulau Jawa. Selanjutnya dari sekian banyak buku-buku pelajaran SD yang diterbitkan di Sumatra Barat, analisis difokuskan pada buku matapelajaran Bahasa Indonesia, PPKn, dan IPS, dengan pertimbangan ketiga mata pelajaran tersebut relatif banyak menggambarkan dinamika kehidupan masyarakat yang sarat dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat, yang diasumsikan juga akan sarat dengan nilai-nilai gender.

Gender dengan bias yang terkandung di dalamnya merupakan konstruksi yang merasuk ke berbagai aspek dalam pendidikan tidak terkecuali dalam buku-buku pelajaran sekolah. Bias gender tersebut akan disosialisasikan oleh guru-guru kepada siswa melalui pembelajaran di sekolah. Buku-buku pelajaran yang memuat materi pembelajaran baik terbitan Depdiknas maupun buku-buku yang diterbitkan oleh berbagai penerbit baik nasional maupun lokal yang dipakai di Sekolah Dasar relatif banyak memuat konsep bias gender. Jika dikelompokkan bias gender yang dimaksud mensosialisasikan (1) peran reproduktif bagi perempuan, peran produktif bagi laki-laki, (2) wilayah domestik bagi perempuan, wilayah publik bagi laki-laki, dan (3) sifat feminin bagi perempuan, sifat maskulin bagi laki-laki. Bias gender tersebut termanifestasi dalam berbagai rumusan baik kalimat, topik cerita, gambar, suasana, permainan, peran, dan profesi.

#### **a. Analisis Gender Terhadap Buku Pelajaran Bahasa Indonesia SD**

Analisis terhadap buku pelajaran Bahasa Indonesia SD/MI dengan melihat kepada tiga peran yaitu:

##### *(1). Peran Gender dalam Kategori Peran Produktif dan Peran Reproduksi*

Sumber: Buku Bahasa Indonesia untuk kelas I SD, oleh Magdalena. Penerbit Angkasa Raya Padang

Sebahagian kalimat dan gambar-gambar yang terdapat di dalam buku pelajaran Bahasa Indonesia sudah menggambarkan kesetaraan gender, namun masih cukup banyak pembagian peran yang sangat kental antara laki-laki dan perempuan yang dapat diamati dalam beberapa cuplikan kalimat dan gambar-gambar di bawah ini:

"Bunda membeli labu, labu akan dikupas, susi ambilkan pisau"

"Kue ibu onde-onde"

"Ibu hidangkan makanan"

"Ayah seorang petani, ayah sedang mencangkul"

Kalimat-kalimat di atas menggambarkan polarisasi pembagian kerja antara perempuan, termasuk anak perempuan dengan laki-laki secara tegas. Perempuan dan anak perempuan melakukan peran reproduktif, yaitu peran yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif dan pelayanan terhadap anggota keluarga. Sementara laki-laki digambarkan melakukan peran produktif, dalam arti melakukan kegiatan yang disebut "bekerja". Konsep bekerja secara umum dalam pemahaman masyarakat cenderung hanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang dapat menghasilkan uang atau bernilai ekonomis.

Di samping itu, laki-laki juga digambarkan melakukan pekerjaan yang memerlukan tenaga yang kuat. Akan tetapi dalam realitas kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat Sumatra Barat, perempuan tidak hanya bekerja di sektor domestik. Pekerjaan bertani, berdagang tidak hanya dilakukan oleh laki-laki.

Gambaran yang hampir senada juga dapat ditemukan dalam buku yang diterbitkan oleh penerbit Usaha Ikhlas.

Sumber buku bahasa Indonesia kelas 1 SD, oleh Ramayulis dkk.

Penerbit Usaha Ikhlas Bukittinggi.

"Ibu menjahit baju Agus"

"Abang membetulkan atap"

"Ibu menanam bunga"

"Ia memanggil-manggil ibunya, Rupanya ibu sedang memasak di dapur"

"Ibu menggoreng ikan"

"Nenek membelah kayu"

"Belikan ibu bawang di warung"

Tidak berbeda dengan paparan pada buku untuk kelas 1 SD, buku Bahasa Indonesia untuk kelas 2 SD juga memuat kalimat-kalimat yang mencerminkan polarisasi pembagian kerja.

Sumber buku bahasa Indonesia kelas 2 SD, oleh Ramayulis dkk.

Penerbit Usaha Ikhlas Bukittinggi.

"Ayah ke kebun ibu ke pasar"

"Ayah telah berangkat ... kantor"

Selanjutnya di dalam buku Bahasa Indonesia untuk kelas 5 SD oleh Syarifudin. Penerbit Grafindo ditemukan gambaran perbedaan gender dalam topik dan penokohan seperti:

"Keluarga Sederhana" Cerita yang menggambarkan kesuksesan seorang anak yang menjadi sarjana dari keluarga miskin karena kerja keras ayahnya. Tidak ada kalimat yang menyatakan bagaimana pula peran ibunya

Tidak hanya di dalam kalimat-kalimat lepas, polarisasi peran laki-laki dan perempuan juga mewarnai cerita-cerita yang ditampilkan. Seperti di dalam cerita yang berjudul "Keluarga Sederhana", menonjolkan peran produktif seorang ayah (mencari uang) sehingga mengantarkan anaknya mencapai kesuksesan. Nilai yang terkandung di dalam cerita ini memperkuat persepsi anak didik bahwa peran ayah dalam "bekerja" menghasilkan uang sangat menentukan, dan sebaliknya peran ibu tidak ditampilkan secara berimbang. Bahkan dengan kalimat-kalimat yang dipakai, semakin memperlihatkan ketidakberartian peran perempuan.

Mencermati buku bahasa Indonesia mulai dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD yang diterbitkan oleh penerbit Usaha Ikhlas Bukittinggi, ditemukan bahwa polarisasi pembagian kerja gender masih relatif banyak ditemukan sebagaimana kutipan-kutipan kalimat dan gambar-gambar yang dipaparkan. Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan tetap terbatas dan dibatasi hanya pada peran reproduktif seperti kalimat "Ibu sedang memasak di dapur", "Ibu menggoreng ikan", Nenek membelah kayu". Sedangkan laki-laki digambarkan melakukan peran produktif "Ayah ke kebun", "Ayah telah berangkat ... kantor".

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, realitas peran perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat sesungguhnya sudah sangat beragam. Cukup banyak perempuan yang bekerja di kebun, di kantor, di pasar sebagai pencari nafkah untuk kebutuhan hidup keluarga. Akan tetapi



karena peran reproduktifnya yang belum seimbang dengan laki-laki menjadikan beban kerja perempuan semakin berat.

*(2). Wilayah Peran Gender Domestik dan Publik*

Pembagian peran antara laki-laki dan perempuan pada gilirannya juga menyebabkan munculnya pembagian wilayah peran laki-laki dan perempuan yaitu wilayah domestik bagi perempuan dan wilayah publik bagi laki-laki. Pembagian wilayah peran itu dapat diamati dalam kutipan kalimat berikut:

Sumber: Buku Bahasa Indonesia untuk kelas I SD, oleh Magdalena.  
Penerbit Angkasa Raya Padang

"Bunda ke kedai"

"Ayah pulang dari ladang"

Kedua kalimat di atas membuat batasan yang tegas tentang wilayah peran laki-laki dan perempuan. Bunda ke kedai sangat erat kaitannya dengan peran reproduktifnya untuk menyiapkan makanan atau pelayanan kebutuhan keluarga. Demikian juga halnya dengan ayah yang pulang dari ladang. Ladang adalah wilayah publik dimana seorang laki-laki memainkan peran produktifnya.

Hal yang sama juga ditemukan dalam Buku Bahasa Indonesia untuk kelas 2 SD, oleh Ramayulis dkk. Penerbit Usaha Ikhlas Bukittinggi.

Di dalam latihan, ditemukan soal-soal isian yang secara tegas telah menggiring siswa untuk mengisi dengan kata yang sesuai dengan kategori gender yang dipelajari. Hal ini sebagaimana kutipan di bawah ini:

" Ibu memasak di....."

"Bapak pergi ke....."

"Pak tani bekerja ....."

Pembagian wilayah peran tidak hanya ditemukan di dalam kalimat-kalimat tetapi juga diperkuat melalui soal-soal yang diberikan sebagaimana kutipan soal di atas. Siswa diminta menjodohkan soal

dengan kata-kata yang sudah di sediakan di sebelah kanannya. Pilihan tersebut mengarah pada kedua pembagian wilayah kerja gender. Dengan demikian, siswa tidak mempunyai alternatif jawaban. Hal ini sekali lagi semakin memperkuat keyakinan siswa laki-laki dan perempuan terhadap wilayah perannya masing-masing yang "diharapkan" oleh masyarakatnya.

Selanjutnya di dalam Buku Bahasa Indonesia untuk kelas 3 SD, oleh Ramayulis dkk. Penerbit Usaha Ikhlas Bukittinggi juga ditemukan kalimat dalam bentuk percakapan kegiatan sepulang sekolah (percakapan dua orang anak perempuan), berikut kutipan percakapan mereka:

"Sehabis makan aku istirahat sambil bermain-main dengan adikku. Setelah itu mencuci piring atau membersihkan rumah".

Percakapan tersebut di atas juga menegaskan peran dan wilayah peran seorang perempuan. Anak perempuan akan merasa bersalah bila tidak melakukan pekerjaan tersebut di rumahnya. Namun bagaimana dengan anak laki-laki? Apakah mereka tidak dapat diminta bertanggung jawab sebagaimana yang diminta pada anak perempuan?. Hal ini bagi anak laki-laki akan menyebabkan dirinya merasa tidak enak dan tidak pantas bila turut melakukan pekerjaan rumah seperti yang dilakukan anak perempuan. Karena sejak dini mereka telah tersosialisasi dengan nilai pembagian kerja gender seperti itu mulai dari keluarganya.

Bila hal ini tetap dilestarikan dan disosialisasikan maka ketimpangan gender dalam masyarakat juga akan tetap lestari. Secara lebih tegas pembagian wilayah peran ini ditemukan dalam Buku Bahasa Indonesia untuk kelas 4 SD, oleh Ramayulis dkk. Penerbit Usaha Ikhlas Bukittinggi, diantaranya:

"Kalau kakak memang harus tinggal di rumah dengan ibu"

Kalimat di atas sekali lagi memperkuat keyakinan siswa bahwa tempat anak perempuan, perempuan pada umumnya, dan ibu, adalah di rumah.

### (3). Nilai Gender maskulin dan Feminin

Selain pembagian peran gender, dan wilayah peran gender, di dalam buku pelajaran bahasa Indonesia juga dapat ditemukan pembagian nilai gender yaitu laki-laki maskulin dan perempuan feminin. Pemisahan secara tegas kedua nilai tersebut pada gilirannya akan menimbulkan akibat yang kurang baik terhadap laki-laki maupun terhadap perempuan.

Polarisasi nilai gender dapat diamati dalam kalimat, cerita maupun gambar yang ditampilkan dalam buku Bahasa Indonesia kelas mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 SD yang diterbitkan oleh Penerbit Usaha Ikhlas Bukittinggi.

#### (a). Model /tokoh di dalam bahan pelajaran lebih dominan anak laki-laki

Hal ini dapat diamati dalam beberapa percakapan, cerita, maupun artikel.

“Gembira di Desa” tokohnya Salim, Dali, dan Paman

“Hati-hati Agar Selamat” tokohnya Ahmad, Hamid, Polisi(laki-laki)

“Memancing Ikan” tokohnya Aslim, Tulus, dan seorang teman (laki-laki)

“Nasehat Bu Guru” tokohnya Dani, Tono, Bu Guru

Percakapan, tokohnya: Arif, Rahmat, Rahim

“Terhindar dari Perbuatan Tidak Baik” tokohnya; Taufik, Rahim, Ibu

“Menunggu Hadiah Naik Kelas” tokohnya; Rahmat, Pak Rahmat, Bu Rahmat

Percakapan, tokohnya: Wandu, Alan

#### (b). Anak laki-laki lebih sering didahulukan dalam beberapa kegiatan.

Keadaan ini dapat dilihat dalam kegiatan belajar di kelas, seperti:

Dalam mengajukan pertanyaan, misalnya

"Yanto, coba sebutkan!" kata bu guru sambil menunjuk Yanto.

Selanjutnya, Irwin segera menunjuk, lalu disuruh bu guru menjelaskan.

"Wiwik coba sebutkan tata tertib yang lain!

(c). Anak laki-laki digambarkan lebih pintar

Hal ini dapat diamati dalam percakapan antara dua anak laki-laki dengan Bapak penjual kue berikut kutipannya:

"Apakah dibungkus dengan rapi pak?"

"Pintar kalian. Jikamau membeli makanan harus diperhatikan kebersihannya"

(d). Anak laki-laki cenderung digambarkan melakukan kekerasan

Hal ini dapat diamati dalam kalimat-kalimat, misalnya:

"Dino dan Kalid berkelahi",

gambar yang memperlihatkan anak laki-laki sedang mengganggu anak ayam.

(e). Dalam cerita naik kereta api wisata, ibu digambarkan sangat pasif. Ayah lebih dominan karena semuanya inisiatif dari ayah, sementara Ibu hanya mengikutinya.

(f). Dalam cerita seringkali bila ada anak yang tinggal hanya dengan ibunya digambarkan dalam keadaan miskin

(g). Kegamangan keluarga yang ditinggalkan oleh orang tua laki-laki lebih besar. Keadaan tersebut dapat dilamati dalam cerita yang berjudul "Laut minta korban".

Hal ini memperlihatkan tingginya ketergantungan terutama ketergantungan ekonomi keluarga terhadap ayah

(h). Tokoh laki-laki digambarkan berlaku kasar dan kejam

Hal ini dapat diamati dalam cerita yang berjudul "Pembalasan anak angkat"

- (i). Pada bagian yang lain ditemukan bahwa perempuan digambarkan cengeng dan suka menangis, sementara laki-laki digambarkan tegar. Hal ini dapat dilihat dalam kalimat-kalimat yang terdapat di dalam sebuah artikel yang bercerita tentang kematian seorang nenek. Berikut kalimat yang menggambarkan hal tersebut:

"Ibu tak dapat menahan tangisnya"

"Ia meratap dan melarau-larau".

"Di ruang tengah laki-laki dewasa sudah berkumpul dan membagi pekerjaan"

- (j). Anak perempuan menjadi model dalam topik yang sifatnya lebih menekankan pada sifat kasih sayang, kemiskinan, kesedihan. Hal ini dapat ditemukan misalnya dalam topik

"Keluarga Mak Ijah" Asnah anak mak Ijah digambarkan sangat sedih dan penuh perhatian pada ibunya yang kondisinya miskin, dan sakit

#### **b. Bias Gender Dalam Buku PPKn.**

Buku Kewarganegaraan (PPKn)

penulis Drs. Ramayulis, drs. Ali Dasni, dra. Helmiyarti. penerbit Usaha Ikhlas, tahun 1999, Bukittinggi.

##### *(1) Pada buku jilid 1 untuk kelas I SD*

Pada ilustrasi halaman 13-14-15, terkesan seolah-olah urusan pekerjaan rumah tangga (mencuci piring, membereskan rumah dan halaman) merupakan tugas perempuan.

Akan lebih baik seandainya dalam ilustrasi dan kalimat-kalimat di halaman tersebut juga digambarkan anak laki-laki dan perempuan bersama-sama agar tampak peran gender dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga.

Pada ilustrasi maupun kalimat di halaman 27

Tertulis kalimat sebagai berikut : **“Ini bapak Halim; Bapak Halim petani; ia bekerja di sawah; bapak bekerja untuk keluarga”**, selanjutnya

**“ini ibu Halim; ibu sedang memasak; ibu bekerja untuk keluarga”**.

Keadaan di atas secara tidak sengaja telah mengkondisikan bahwa bapak selalu bekerja di sektor publik dan ibu bekerja di sektor domestik. Dalam kenyataan sekarang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga bukan hanya bapak, akan tetapi ibu juga bekerja mencukupi kebutuhan sehingga bapak dan ibu seharusnya mendapat kesempatan dan peran yang setara dalam bekerja baik di sektor publik ataupun domestik.

Ilustrasi halaman 81.

“Ibu sering menyuruh Salmi. Salmi selalu patuh pada ibunya”.

Kalimat dan ilustrasi di atas menggambarkan stereotipi bahwa perempuan selalu bekerja dan menyelesaikan tugas di sektor domestik.

Oleh sebab itu perlu ditambahkan gambar anak perempuan dan laki-laki yang sedang menyelesaikan pekerjaan rumah tangga agar tampak peran gender dalam kegiatan tersebut.

*(1) buku jilid 2 untuk kelas II SD*

Pada ilustrasi halaman 70, Menghargai Hari Besar Keagamaan

Digambarkan umat Islam yang pergi ke mesjid hanyalah laki-laki, dalam kenyataannya laki-laki dan perempuan juga pergi ke mesjid.

Pada perayaan keagamaan hendaknya diperlihatkan laki-laki dan perempuan sama-sama pergi ke tempat ibadah, khususnya pada saat pergi ke mesjid.

Pelajaran 10., halaman 99

".....Hampir tiap minggu Pak Arman sekeluarga bergotong royong membersihkan rumah dan pekarangan. Pak Arman dan Didi membersihkan pekarangan." ..... "Ayu membantu ibu membersihkan rumah. Mengepel lantai dan mengelap kaca jendela. Merapikan perabot rumah, serta membersihkan dapur dan alat-alat yang biasa dipakai."

Dalam wacana di atas ada stereotipi gender karena karena ibu dan anak perempuan digambarkan bekerja di dalam rumah sedangkan bapak dan anak laki-laki bekerja di luar rumah. Agar tidak stereotip, dalam ilustrasi dapat ditambahkan gambar anak laki-laki dan perempuan bersama membersihkan dapur, menyapu dan menyiram bunga di halaman.

*(3). Buku jilid 3 untuk kelas III SD*

Dalam wacana dan ilustrasi di halaman 24 – 25

"Dalam keluarga, ayah dan ibu sudah jelas rela berkorban setiap saat demi kepentingan seluruh anggota keluarga. Ayah bersusah payah mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga."....."Ibu juga sepanjang hari bekerja menyiapkan segala kebutuhan keluarga. ...."

Dalam ilustrasi digambarkan ayah bekerja di sawah dan ibu bekerja di dapur.

Komentar : dalam wacana terdapat subordinasi terhadap perempuan karena selalu perempuan selalu diidentikkan dengan dapur, tugas membersihkan dan menyiapkan makanan. Padahal tugas dan pekerjaan ini dapat dilakukan baik oleh perempuan maupun laki-laki. Begitu pula dengan pekerjaan di luar rumah, baik di kantor maupun berwiraswasta ataupun bertani, pekerjaan ini juga dapat dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan.

*(4). Buku jilid 5 untuk kelas V SD*

Pada ilustrasi di halaman 73, digambarkan anggota TNI yang kesemuanya adalah prajurit laki-laki. Pekerjaan mempertahankan negara dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, sehingga perlu ditambahkan gambar laki-laki dan perempuan sebagai prajurit TNI yang sedang mempertahankan dan membela negara.

*(5). Buku jilid 6 untuk kelas VI SD*

Pada halaman 46 dalam wacana ditulis sebagai berikut "Setiap kelompok masyarakat mempunyai pimpinan.....Pimpinan harus bijaksana, memiliki pengalaman dan pengetahuan lebih, sehingga mampu bertindak cepat dan tepat". Dalam ilustrasinya tergambar sekelompok kaum laki-laki sedang berdiskusi dan rapat di satu ruang.

Sebaiknya dalam ilustrasi digambarkan juga peserta dan pemimpin perempuan, karena peran pemimpin dapat dipegang oleh laki-laki maupun perempuan

**Nama Buku : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

**Penulis : Drs. Ali Dasni, Amru Zein, Zarneti, S.Pd., Zulkasli, S.Pd.,  
Dra. Magdalena. Penerbit Gunung Bungsu Padang, tahun 2000.**

*(1). Buku kelas 1 SD*

Pada halaman 15, tampilan tentang Sumatra barat diilustrasikan gambar penari Minang adalah perempuan.

Untuk kegiatan kesenian umumnya dan menari khususnya dapat dilakukan baik oleh laki-laki atau perempuan, sehingga perlu ditampilkan juga penari atau penyanyi perempuan dan laki-laki.

Pada halaman 22. Pelajaran 4 : Keberanian

Diilustrasikan pada gambar kegiatan anak perempuan sepulang sekolah adalah mencuci piring, kegiatan ini menunjukkan stereotipi perempuan yang selalu bekerja di dapur, mencuci piring . Kegiatan



semacam ini dapat dikerjakan bersama-sama anak laki-laki dan perempuan. Oleh sebab itu perlu ditambahkan ilustrasi gambar yang menampilkan anak laki dan perempuan yang sedang bersama-sama melakukan pekerjaan di dapur dan mencuci piring.

Selanjutnya pada wacana di halaman 62 tercantum kalimat sebagai berikut :*"Upik anak Bundo Fatimah. Rumahnya rapi dan bersih. Upik membantu bundo. Membersihkan kamar. Menyapu halaman. Mencuci piring. Pakaian disimpan dalam lemari .....*".

Komentar : semua apa yang dilakukan oleh Upik dapat juga dilakukan oleh anak laki-laki , oleh karena itu perlu juga digambarkan anak laki dan perempuan yang sedang mengerjakan semua kegiatan yang dilakukan oleh upik agar nampak kesetaraan gendernya.

*(2). Buku kelas 2 SD*

Halaman 3. Anak perempuan mengajar adiknya membuat PR

Halaman 58. Ilustrasi membantu fakir miskin dilakukan oleh Rini

Kegiatan – kegiatan tersebut tidak hanya dapat dikerjakan oleh anak perempuan , anak laki-lakipun dapat mengerjakan kegiatan tersebut sehingga dalam wacana maupun ilustrasi gambar perlu dijelaskan peran yang dapat dikerjakan baik oleh anak laki maupun perempuan secara benar agar tidak bias gender.

Pada halaman 71, baik wacana maupun ilustrasi menggambarkan keadaan dan peran yang tidak bias gender.

Kegiatan gotong royong di dalam rumah dikerjakan secara bersama-sama oleh ayah, ibu, anak laki-laki maupun anak perempuan.

**Nama Buku : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

**Penulis : Masrial, S.Pd., penerbit Tiga Sari Utama**

*(1). Buku kelas 1 SD*

Pada halaman 11 dan 12, wacana dan gambar sangat bias gender seperti kutipan berikut : ".....pukul lima pagi Nana sudah bangun. Merapikan tempat tidur.....mandi pakai sabun.....shalat subuh .....membantu ibu membersihkan rumah dan halaman....nana pergi sekolah setelah sarapan pagi. ....Budi kakak Nana berjalan kaki ke sekolah dengan pakaian rapi dan indah".

Segala hal yang dilakukan oleh nana dapat juga dikerjakan oleh budi. Oleh karenanya dapat diilustrasikan kegiatan yang dilakukan oleh mereka secara bersama.

Pada halaman 28, terdapat kalimat berikut : ".....ayah sedang tidur. Kita jangan ribut. Ayah perlu istirahat. Tadi ayah bekerja. Lelah sekali "

Bekerja tidak hanya dilakukan oleh ayah, ibupun dapat bekerja dan pada saat istirahat, sama-sama perlu mendapat ketenangan.

Oleh karenanya kalimat tersebut perlu disesuaikan dengan peran dan tidak bias gender.

Halaman 32. pada ilustrasi gambar 1 (hanya laki-laki yang pergi ke mesjid)– 2 (hanya perempuan bermain tali) – 6 (hanya perempuan yang mencuci piring di dapur).

Ilustrasi gambar hendaknya ditambah, sehingga memperlihatkan peran yang dapat dilakukan oleh kedua jenis kelamin secara nyata.

*(2). Buku kelas 2 SD*

Halaman 28 terdapat wacana dan ilustrasi gambar yang bias gender. Dalam kalimat dinyatakan : "Mengurus rumah bukan hanya tugas ibu saja.

Anak-anak harus ikut membantu”. Namun kenyataan di dalam gambar hanya Wati yang membantu membersihkan rumah.

Kegiatan membersihkan dapat dilakukan oleh anak laki-laki dan perempuan.

Wacana pada halaman 47 : “...Orangtua bekerja keras membanting tulang. Ayah telah berusaha memenuhi keperluan keluarganya. Ibu bekerja mengurus rumah tangga”.

Halaman 15 memperlihatkan pelabelan peran antara laki-laki dan perempuan, namun dalam wacana di halaman 17 telah bagus pemunculan tokoh laki-laki dan perempuan dengan peran yang seimbang.

Bias gender muncul lagi di halaman 38 dalam wacana : “...”...pak Anwar adalah kepala keluarga. Ia mempunyai kewajiban memenuhi kebutuhan keluarganya. Pagi hari pak Anwar sudah pergi bekerja sebagai pedagang. Hasil kerja pak Anwar dinikmati seluruh anggota keluarganya “. ....”bu Anwar wajib mengurus keluarganya. Pagi-pagi bu Anwar sudah bangun. Ia menyiapkan sarapan pagi untuk suami dan anak-anaknya....”.

Di sini nampak polarisasi pembagian kerja secara tegas bahwa laki-laki bekerja di sektor publik sedangkan perempuan di sektor domestik. Kegiatan seperti wacana di atas justru tidak memperlihatkan persamaan derajat.

## **6. Respon Guru Terhadap Pembelajaran**

Mengingat sosialisasi bias gender telah merasuki berbagai aspek kehidupan manusia dan telah berlangsung berabad-abad, dapat dimaklumi, sangat sulit memutus mata rantai sosialisasi bias gender. Berbagai pintu telah diketuk, pakar dari berbagai ilmu sudah mulai menyadari dan bergerak untuk mengeliminasi keadaan ini, namun masih diperlukan usaha yang lebih liat. Dalam bidang pendidikan salah satu usaha yang patut digiatkan menggandeng guru atau orang yang bergerak dalam bidang

pendidikan. Guru SD merupakan salah satu agen yang potensial untuk dinomorsatukan .

Guru dan siswa merupakan dua komponen yang paling penting dalam proses pembelajaran di sekolah. Dalam hal ini guru menjadi ujung tombak dalam serangkaian proses pembelajaran sehingga melalui guru pulalah semua proses sosialisasi dilakukan. Sehubungan dengan itu, materi pelajaran yang bias genderpun akan ikut disosialisasikan kepada siswa. Sementara itu, siswa menjadi subyek yang menerima sosialisasi.

Sebagaimana telah dipaparkan pada bagian terdahulu, gambar, kalimat dan ilustrasi yang terdapat di dalam buku-buku pelajaran masih cenderung bias gender baik dalam kategori peran, wilayah peran maupun nilai-nilai. Menyikapi berbagai bias gender yang terdapat di dalam buku-buku pelajaran SD tersebut, lalu bagaimana guru meneruskan “pelajaran” yang demikian?

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa guru dari beberapa sekolah yang terdapat di Kota Padang berkaitan dengan berbagai persoalan yang terkait dengan bias gender dapat dikemukakan sebagai berikut:

#### **a. Respon Guru Terhadap Bias Gender Dalam Buku Pelajaran**

Pada umumnya guru tidak merasa bahwa adanya perbedaan peran, wilayah peran, dan nilai-nilai yang ada dalam buku-buku pelajaran baik dalam kalimat, topik cerita, tokoh-tokoh, maupun nilai-nilai adalah sesuatu hal yang biasa dan memang begitulah adanya. Guru juga mengatakan bahwa hal itu juga “sesuai dengan budaya masyarakat kita”. Sehingga “kami tidak merasakannya sebagai sesuatu yang salah”. Meskipun dalam realitasnya tidak semua masyarakat atau keluarga sesuai dengan gambaran yang ada di dalam buku-buku pelajaran tersebut.

Masih menurut guru, sejauh ini juga belum ada siswa yang memprotes materi-materi yang membedakan peran gender tersebut, sehingga guru juga tidak merasa perlu mempermasalahkannya. Akan tetapi,

ketika peneliti mencoba menjelaskan dampak yang mungkin terjadi dengan perbedaan tersebut terhadap diri siswa dalam memahami dirinya dan orang lain, maka secara berangsur-angsur guru mulai menyadarinya. Hanya saja menurut mereka, "kami selama ini pada umumnya mengajarkan seperti apa yang ada dalam buku". Kondisi ini memperlihatkan bahwa guru sangat tergantung kepada buku-buku pelajaran, dan kurang dapat mengembangkan termasuk untuk mengkritisi materi-materi pelajaran. Hal ini diasumsikan terjadi karena guru masih belum memahami persoalan gender.

#### **b. Respon Guru Terhadap Bias Gender Dalam Proses Belajar Mengajar**

Beberapa penelitian terdahulu menemukan bahwa bias gender juga ditemukan dalam proses belajar mengajar. Misalnya guru cenderung mendahulukan anak-laki-laki dalam menjawab pertanyaan. Dalam penelitian ini berdasarkan wawancara dengan guru diketahui bahwa bila ada pertanyaan yang diajukan kepada siswa guru tidak pernah berfikir, bahwa mesti yang ditanya lebih dulu adalah anak laki-laki, meskipun ketika guru menyuruh anak laki-laki terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh salah seorang guru: " Meskipun kami menunjuk anak laki-laki untuk pertama kali menjawab pertanyaan yang diajukan, kami tidak pernah berfikir bahwa anak-laki-laki memang harus didahulukan". Namun guru menambahkan penjelasannya bahwa mendahulukan laki-laki merupakan kebiasaan kita di rumah, atau bila ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan laki-laki dan perempuan. Misalnya dalam pertemuan-pertemuan kita lebih sering/biasanya mendahulukan laki-laki untuk mengambil makanan.

Di samping itu pada umumnya guru menyatakan bahwa pada umumnya peringkat sepuluh besar di setiap kelas adalah siswa perempuan. Hal ini menurut mereka karena siswa perempuan lebih rajin dan teliti, sementara anak laki-laki kurang tekun dalam belajar. Namun menurut salah

seorang guru: "sebenarnya anak laki-laki itu lebih pintar dari anak perempuan". Tetapi mereka cenderung nakal.

Dalam pelajaran keterampilan, menurut salah seorang guru keterampilan, tidak ada perbedaan prakarya antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Misalnya bila ada keterampilan menjahit, semua siswa harus melakukannya. Hanya saja menurut guru tersebut, seringkali siswa laki-laki tidak tekun dan tidak teliti dalam mengerjakan tugas-tugasnya sehingga pada umumnya hasil kerja siswa laki-laki tidak sebaik hasil kerja siswa perempuan. Alasan guru tidak membedakan materi antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam mata pelajaran kerajinan, adalah agar semua siswa mempunyai keterampilan dasar yang sama. Dan bahkan mereka menambahkan bahwa "pada umumnya penjahit yang terkenal itu kan laki-laki".

### **c. Respon Guru Terhadap Perilaku Siswa**

Pada umumnya guru mengatakan bahwa anak laki-laki cenderung keras, nakal, dan kasar. Sementara anak perempuan lebih tenang, sopan, dan tekun. Oleh karena itu, dalam menghadapi mereka guru juga harus membedakannya. Menurut guru, dalam hal ini sekolah lebih banyak menyesuaikan dengan apa yang sudah diperoleh siswa di dalam keluarganya. Sehubungan dengan hal itu, perbedaan lingkungan keluarga siswa akan mewarnai perbedaan perilaku siswa pada masing-masing sekolah. Misalnya sekolah yang siswanya dominan berasal dari keluarga nelayan, akan berbeda dengan sekolah yang siswanya berasal dari lingkungan keluarga pedagang, atau pegawai.

Suatu temuan yang menarik cukup menarik dalam penelitian tentang perilaku siswa ini adalah bahwa hampir di semua kelas di sekolah yang diteliti ketua kelasnya adalah laki-laki. Alasan yang dikemukakan pada umumnya adalah anak laki-laki lebih berani sehingga ia bisa mengamankan teman-temannya apalagi bila guru tidak ada.

Lalu bagaimana dengan anak perempuan? Apakah anak perempuan tidak memenuhi kriteria sebagai ketua kelas?. Beberapa orang guru yang diwawancarai mengemukakan bahwa ketua kelas itu dipilih. Namun kecenderungan siswa akan mencalonkan dan memilih siswa laki-laki sebagai ketua kelas. Sehingga sangat jarang ditemukan siswa mencalonkan siswa perempuan untuk menjadi ketua kelas.

Dalam wawancara selanjutnya, beberapa orang guru mengemukakan bahwa ada kecenderungan anak laki-laki yang menjadi ketua kelas akan menunjukkan "kekuasaannya" kepada teman-teman, dan bahkan mereka mengamankan kelas seringkali dengan kekerasan seperti memukul, atau menghardik, dll. Sementara seorang guru kelas yang pernah mengalami membina kelas yang ketua kelasnya seorang perempuan mengatakan bahwa anak perempuan bila menjadi ketua kelas cenderung lebih lembut, dapat mengorganisir teman-teman, kelas menjadi aman, bersih, dan rapi. Hanya saja menurut guru tersebut, anak perempuan yang menjadi ketua kelas sering diremehkan, diolok-olok, dicemooh oleh teman-temannya yang laki-laki. Dan bahkan menurut guru tersebut ketua kelasnya dipanggil dengan "ibuk Zar" (nama guru kelasnya).

### **C. Kesenjangan Gender: Pendalaman Kasus Kota Padang dan Kabupaten Agam**

Sebagaimana diuraikan pada bagian terdahulu beberapa aspek yang mengalami kesenjangan gender diantaranya adalah: proporsi siswa, putus sekolah, mengulang kelas, proporsi kepala sekolah, pejabat struktural di lingkungan kantor Diknas. Pada bahagian ini akan diuraikan analisis data kualitatif dari dua kabupaten/kota terpilih berdasarkan ranking Indeks Pembangunan Gender (IPJ) tertinggi yaitu Kota Padang, dan IPJ ketiga terendah yaitu Kabupaten Agam terkait dengan kesenjangan gender yang terjadi, dilihat dari faktor akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat bagi sumber daya pendidikan.

## 1. Kota Padang

Kota Padang pada tahun 2002 dalam pembangunan gender berada pada ranking 18 secara Nasional yang sekaligus sebagai daerah dengan IPJ tertinggi di Provinsi Sumatra Barat. Artinya, Kota Padang diukur dari indikator pembangunan gender yang terdiri dari harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan proporsi angkatan kerja antara laki-laki dan perempuan sudah relatif seimbang. Hal ini dapat dimaklumi karena Kota Padang adalah ibu kota provinsi, pusat pemerintahan, pusat pendidikan, masyarakatnya cenderung heterogen baik dilihat dari aspek sosial maupun budaya, serta sistem sosial masyarakat sudah mengarah kepada masyarakat perkotaan yang modern.

Meskipun demikian tidak berarti bahwa keseimbangan gender telah terjadi secara merata diseluruh kota Padang. Pada daerah-daerah dengan ciri khas tertentu misalnya secara geografis daerah yang terletak di pinggir kota, pinggir pantai, dan dengan mata pencaharian yang sangat tergantung pada alam, tingkat pendidikan penduduk yang relatif rendah, serta masih kuatnya nilai dan tradisi yang dalam cukup banyak hal bias gender dalam masyarakat pada gilirannya cenderung merugikan pada salah satu jenis kelamin baik terhadap laki-laki, dan terlebih terhadap perempuan. Dalam penelitian ditemukan bahwa kondisi ini relatif banyak berdampak terhadap akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pendidikan bagi laki-laki dan anak perempuan di Kota Padang.

Penduduk Kota Padang berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kota Padang 2003 relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan, yaitu dengan perbandingan 49,65% laki-laki dan 50,35% perempuan. Bila ditinjau dari usia sekolah, ternyata laki-laki lebih banyak 3,35% pada usia 7 – 12 tahun, dan 1,55% pada usia 13 – 15 tahun, sedangkan pada usia 15 – 18 tahun jumlah penduduk laki-laki relatif lebih sedikit. Data ini dapat diartikan bahwa untuk 2 – 3 tahun mendatang penduduk pada usia sekolah SMP dan SMA lebih dominan laki-laki.



### *(1) Faktor Akses*

Hampir pada semua tingkatan sekolah akses laki-laki dan perempuan sudah relatif tinggi, kecuali pada beberapa kecamatan yang secara geografis terletak di pinggir kota, dan masyarakatnya yang relatif homogen, dengan mata pencaharian utama bertani atau nelayan. Bila dilihat dari jenis sekolah, ternyata akses perempuan masih rendah pada jenis sekolah kejuruan teknologi, dan akses laki-laki masih rendah pada sekolah kejuruan seni/bisnis/pariwisata. Hal ini bukan disebabkan oleh sistem seleksi penerimaan siswa, tetapi lebih banyak disebabkan oleh nilai budaya yang stereotip terhadap peran laki-laki dan perempuan.

Persoalan yang timbul dengan kondisi di atas adalah terjadinya ketidaksesuaian antara tenaga kerja yang dihasilkan oleh sekolah kejuruan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh beberapa orang guru bahwa pasar saat ini dan diasumsikan juga pada masa datang membutuhkan tenaga kerja perempuan di bidang teknologi seperti: elektronika, sementara tenaga kerja yang tersedia adalah tenaga kerja laki-laki. Sebaliknya pasar kerja membutuhkan tenaga kerja laki-laki di bidang pariwisata/bisnis, yang tersedia tenaga kerja perempuan. Untuk mengatasi ketimpangan jumlah siswa laki-laki dan perempuan yang pernah dilakukan di SMK teknologi adalah dengan memberikan beasiswa kepada siswa perempuan. Hal yang sama mungkin dapat diterapkan untuk mengatasi kesenjangan gender pada sekolah kejuruan bisnis/seni/pariwisata.

Selanjutnya, dalam beberapa aspek lain yang terkait dengan akses perempuan dan laki-laki dalam pendidikan pada umumnya tidak terdapat kesenjangan, seperti akses terhadap biaya pendidikan, beasiswa, pemilihan jenis sekolah, dan jurusan. Para orang tua, dan siswa mengakui bahwa mereka tidak mendapatkan perlakuan yang berbeda dalam hal itu, dan pertimbangan lebih banyak karena faktor manfaat, dibandingkan faktor jenis kelamin. Akan tetapi dalam beberapa aspek meskipun dialami oleh laki-laki dan perempuan secara bersama-sama, dampak terhadap perempuan cenderung kurang menguntungkan. Seperti jarak sekolah yang

relatif jauh dari tempat tinggal, dalam cukup banyak hal menjadi penghalang bagi perempuan karena ia "perempuan". Sebaliknya tidak menjadi halangan bagi laki-laki. Sebagaimana yang dikemukakan oleh salah seorang siswa SMP bahwa untuk pergi sekolah harus berjalan kaki 5 km, dan kemudian harus naik ojek. Kondisi geografis, dan sarana transportasi yang seperti itu kurang kondusif bagi anak perempuan. Sehingga dalam cukup banyak kasus menyebabkan orang tua enggan untuk melepas anak perempuannya pergi sekolah.

Selanjutnya akses perempuan, dan laki-laki terhadap beasiswa cenderung lebih besar pada perempuan hampir di semua tingkatan sekolah. Seperti untuk tingkat SD/MI 40,3% penerima beasiswa adalah laki-laki, dan 59,7% perempuan. Tingkat SMP/MTs 31,25% laki-laki, dan 68,75% perempuan, sedangkan di tingkat SMA/MA/ASK, penerima beasiswa adalah 16,74% laki-laki, dan 83,26% perempuan. Kenyataan ini berdasarkan wawancara dengan para guru dan beberapa pimpinan sekolah disebabkan oleh jenis beasiswa yang diberikan dengan syarat-syarat yang lebih banyak terpenuhi oleh siswa perempuan, misalnya prestasi. Karena data menunjukkan bahwa hampir di semua sekolah dan semua tingkatan kelas pemegang ranking 10 besar adalah perempuan. Namun karena yang banyak putus sekolah adalah siswa laki-laki, maka perlu dipertimbangkan prioritas pemberian beasiswa kepada anak laki-laki. Hanya saja yang perlu dipelajari adalah apakah putus sekolah anak laki-laki itu karena masalah ekonomi atau tidak. Bila tidak, pemberian beasiswa kepada laki-laki menjadi tidak efektif untuk mengurangi angka putus sekolah anak laki-laki.

Di lihat dari akses guru, data menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan proporsi guru perempuan semakin sedikit. Namun demikian jumlah guru perempuan untuk semua jenjang pendidikan mulai dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah, dan menengah Atas lebih banyak dari guru laki-laki. Demikian juga bila dilihat dari status kepegawaiannya yaitu guru tetap dan guru tidak tetap juga lebih banyak guru perempuan. Akan tetapi bila dilihat dari akses guru perempuan dalam beberapa jabatan seperti menjadi kepala sekolah, atau wakil kepala sekolah, dan jabatan

pimpinan lainnya di sekolah, masih relatif sedikit. Di Kota Padang, kepala sekolah untuk setiap jenjang pendidikan yang dominan adalah laki-laki kecuali untuk sekolah dasar, dari 410 sekolah, 100 orang kepala sekolahnya adalah laki-laki. Untuk tingkat SMP/MTs dari 84 sekolah, 65 diantaranya kepala sekolahnya laki-laki, sementara untuk tingkat SMA/MA dari 48 sekolah terdapat 36 orang kepala sekolah laki-laki.

Rendahnya persentase perempuan menjadi kepala sekolah bila dibandingkan dengan proporsi guru perempuan lebih banyak terkait dengan faktor internal perempuan. Karena bila dilihat dari kebijakan dan aturan tentang pengangkatan kepala sekolah tidak ada diskriminasi terhadap perempuan. Artinya kebijakan cenderung netral gender. Dari data FGD ditemukan bahwa sedikitnya perempuan yang menjadi kepala sekolah menurut beberapa orang guru perempuan adalah karena mereka harus mendahulukan peran reproduksinya daripada karir. Sementara bagi laki-laki tugas-tugas reproduksi tidak menjadi halangan untuk berkarir. Selain itu, juga ada persoalan budaya ketika seorang perempuan harus pergi untuk menjadi kepala sekolah di salah satu wilayah yang jauh dari tempat tinggal keluarganya. Biasanya masyarakat, perempuan itu sendiri, dan terutama laki-laki tidak dapat menerima kenyataan tersebut. Terkait dengan hal ini salah seorang responden laki-laki dengan tegas menyatakan bahwa: "bila masih ada laki-laki, mengapa mesti perempuan?". Pendapat ini ternyata tidak hanya didukung oleh sebahagian laki-laki, tetapi juga masih didukung oleh beberapa responden perempuan. Namun demikian salah seorang responden perempuan yang lain menyatakan bahwa: "dalam cukup banyak kegiatan di sekolah terbukti perempuan mampu, hanya saja laki-laki belum ikhlas menghargai keberhasilan perempuan itu".

Di samping itu, dilihat dari pejabat struktural di Dinas Pendidikan Kota Padang diketahui bahwa baik eselon II, maupun eselon III semuanya laki-laki, hanya pada eselon IV ada empat perempuan dari dua belas jabatan yang ada.

Dari kenyataan di atas dapat disimpulkan bahwa bila dihadapkan pada kondisi dimana perempuan harus memilih salah satu antara karir atau

rumah tangga, biasanya perempuan lebih memilih rumah tangga dari pada karir. Namun ini tidak berarti bahwa masyarakat dan pengambil kebijakan dapat menjadikan fenomena tersebut sebagai justifikasi bahwa kemampuan dan kualitas kepemimpinan perempuan lebih rendah dari laki-laki.

Pelatihan, studi lanjut, dan kegiatan-kegiatan yang menunjang kualitas dan wawasan guru tidak ditemukan adanya kesenjangan gender. Artinya, baik kebijakan yang ada dan implementasinya di lapangan tidak menjadikan perbedaan gender sebagai alasan untuk mendahulukan laki-laki. Hanya saja dalam beberapa permintaan untuk pelatihan adakalanya disyaratkan bagi peserta tidak sedang hamil, menyusui, dan membawa anak. Semua syarat tersebut terkait dengan perempuan. Pada umumnya guru perempuan tidak merasakan bahwa syarat-syarat tersebut sebagai bentuk diskriminasi bagi perempuan.

Dalam hal kepangkatan, juga tidak ditemukan adanya diskriminasi terhadap perempuan. Bahkan menurut beberapa responden karena guru perempuan "rajin", maka guru perempuan cenderung lebih cepat naik pangkat. Sementara guru laki-laki cukup banyak yang lalai mengurus naik pangkatnya. Kenyataan ini menunjukkan bahwa akses perempuan dan laki-laki tidak terdapat kesenjangan. Namun dalam hal-hal tertentu, meskipun pangkatnya sudah tinggi perempuan masih banyak yang belum terlibat dalam pengambilan keputusan di sekolah. Karena kebanyakan pimpinan sekolah dijabat oleh laki-laki.

Di sisi lain, akses perempuan sebagai penulis buku pelajaran masih sangat sedikit. Walaupun menjadi penulis buku, kebanyakan perempuan tidak menjadi penulis utama. Buku-buku lokal pada umumnya ditulis oleh penulis laki-laki, dan salah satu buku pelajaran muatan lokal (Budaya Alam Minangkabau) BAM semua penulisnya laki-laki. Kenyataan ini pada gilirannya tetap akan mempengaruhi kadar bias gender dalam buku-buku pelajaran lokal, yang pada kualitas tertentu bahkan diskriminatif terhadap perempuan.

### *(1) Faktor Partisipasi*

Sejalan dengan proporsi penduduk usia sekolah dasar (7 –12 tahun), proporsi siswa SD juga relatif banyak laki-laki dibandingkan dengan perempuan, namun dalam persentase yang tidak terlalu besar, kecuali di kecamatan Pauh proporsi siswa laki-laki lebih banyak yaitu 1726, dan 1496 siswa perempuan. Angka mengulang kelas bila dibandingkan antara laki-laki dan perempuan, tampak bahwa angka mengulang kelas laki-laki relatif lebih banyak pada semua tingkat kelas dengan perbandingan 64,26% : 35,74%. Namun bila dibandingkan dalam kelompok yang sama, mengulang kelas perempuan dengan jumlah siswa perempuan, proporsi mengulanginya 5,8% . Sementara angka putus sekolah bila dibandingkan antara laki-laki dan perempuan terdapat 67,4%:32,56%. Bila dibandingkan dalam kelompok jenis kelamin yang sama terdapat 11% laki-laki, dan 0,05% perempuan. Artinya, angka putus sekolah anak laki-laki jauh lebih besar dari pada anak angka putus sekolah anak perempuan hampir dalam semua tingkatan kelas.

Berbeda dengan data penduduk usia 13 –15 tahun yang lebih banyak laki-lakinya sebesar 1,55%, proporsi siswa SMP/MTs lebih banyak perempuan dengan perbandingan 52,18% perempuan, dan 47,82% laki-laki. Ini berarti bahwa lebih banyak anak laki-laki usia SMP yang tidak mendapatkan akses pendidikan SMP atau tidak melanjutkan setelah tamat SD di bandingkan anak perempuan. Meskipun demikian, angka mengulang kelas anak-laki tetap lebih besar dibandingkan anak perempuan yaitu 80,88%:19,12%. Bila dibandingkan dalam kelompok jenis kelamin yang sama maka angka mengulang kelas laki-laki terdapat 4,00%, sedangkan mengulang kelas perempuan hanya 0,86%. Demikian juga dengan putus sekolah, angka putus sekolah laki-laki dibandingkan angka putus sekolah perempuan terdapat perbandingan 73,00%:27,00%. Sementara dalam kelompok jenis kelamin yang sama angka putus sekolah anak laki-laki terdapat 1,15%, dan perempuan 0,37%.

Pada kelompok usia SMA jumlah penduduk laki-laki relatif lebih sedikit dari penduduk perempuan, demikian juga proporsi siswa laki-laki hanya 42,19% dibandingkan dengan 57,81% siswa perempuan. Hampir

sama dengan kondisi di SMP, meskipun proporsinya sedikit, angka mengulang kelasnya cenderung lebih besar, yaitu 70,26%:29,74%. Bila dibandingkan dalam kelompok jenis kelamin yang sama terdapat 1,44% laki-laki, dan 0,44% perempuan yang mengulang kelas. Demikian juga dengan putus sekolah, terdapat perbandingan 54,46% laki-laki, dan 45,54% perempuan. Dalam kelompok jenis kelamin yang sama terdapat 0,97% laki-laki, dan 0,59% perempuan.

Selanjutnya dilihat dari proporsi siswa laki-laki dan perempuan di SMK di Kota Padang, dalam SMK kelompok teknologi perbandingan laki-laki dan perempuan terdapat 92,72%:9,65%, SMK bisnis manajemen 59,75%:40,25%, SMK pariwisata 7,64%:92,36%, dan SMK seni dan kerajinan 49,55%:56,45%. Data mengulang kelas untuk dua kelompok SMK pertama yaitu industri, dan manajemen menunjukkan bahwa angka mengulang kelas dan putus sekolah tetap lebih banyak dialami siswa laki-laki dibandingkan siswa perempuan. Meskipun secara umum tidak terdapat alasan yang menguatkan bahwa orang tua dan anak memilih jenis sekolah berdasarkan gendernya, data SMK tetap mengindikasikan adanya perbedaan dominasi proporsi siswa laki-laki dan perempuan yang mencolok untuk dua jenis SMK yaitu SMK teknologi yang bemuansa maskulin, dan SMK seni/kepariwisataan yang bemuansa feminin.

Berdasarkan data hasil FGD dan wawancara dengan berbagai pihak baik orang tua, siswa, masyarakat, guru, maupun penyelenggara pendidikan dapat dikemukakan beberapa faktor yang melatarbelakangi kondisi ketimpangan gender dalam pendidikan di Kota Padang dalam dua kelompok yaitu faktor internal, dan faktor eksternal dimana antara yang satu dengan yang yang lain saling terkait. Pertama, faktor internal faktor yang terkait dengan diri siswa seperti motivasi belajar yang rendah. Menurut para guru, hal ini ditandai dengan ada kecenderungan siswa laki-laki tidak serius dalam belajar, tidak mengerjakan tugas, dan kurang disiplin. Kondisi siswa seperti itu dapat disebabkan oleh rendahnya daya serap/kemampuan intelengensi yang dimiliki, serta rendahnya motivasi. Bila ditelusuri lebih jauh kondisi ini juga sangat terkait dengan makanan dan gizi anak yang juga

sangat terkait dengan faktor ekonomi, pengetahuan/pendidikan orang tua, kondisi yang masyarakat yang kurang menunjang bagi suksesnya pendidikan anak, yang semuanya itu merupakan faktor eksternal.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu faktor yang relatif banyak menyebabkan terjadinya permasalahan pendidikan pada anak, seperti mengulang kelas, dan putus sekolah, terutama pada daerah/kawasan pinggir kota dan pantai. Karena ekonomi orang tua yang sangat terbatas, anak tidak dapat melanjutkan pendidikan, dan bahkan anak "terpaksa" atau "sukarela" bekerja membantu ekonomi keluarga yang dapat mengganggu proses belajar, dan pada akhirnya menyebabkan mereka putus sekolah. Ini bisa terjadi pada anak laki-laki maupun pada anak perempuan. Sebagaimana diungkapkan salah seorang orang tua siswa, seperti kutipan di bawah ini:

"Biaya sekolah sangat mahal, SPPnya mahal, belum lagi harus membeli baju, sepatu, buku-buku. Bila tidak bisa mencukupinya anak tidak boleh masuk sekolah, dan bahkan anak juga tidak mau pergi sekolah kalau dia tidak mempunyai alat yang cukup untuk sekolah. Bila sudah begitu, ya terpaksa tidak sekolah, apa lagi kalau sekolah di sekolah swasta".

Di samping itu, rendahnya pemahaman masyarakat dan orang tua tentang makna pendidikan bagi anak-anaknya juga menjadi salah satu penyebab anak-anak mengulang kelas dan putus sekolah. Tidak banyak orang tua dikalangan anak bermasalah yang membantu anak-anaknya dalam pendidikan. Sebagaimana dikatakan salah seorang siswa yang putus sekolah bahwa: " bagi orang tua terserah saya, mau sekolah atau tidak" . Hal yang sama sebagaimana dikemukakan oleh salah seorang guru BP bahwa:" ada kecenderungan bila anak sudah disekolahkan, orang tua lepas tangan terhadap anaknya, padahal waktu di sekolah sangat terbatas, dan bila terjadi masalah pada anak, sekolah yang disalahkan". Kenyataan ini juga menjadi penyebab timbulnya permasalahan bagi anak di sekolah. Dengan kata lain, pemahaman orang tua tentang tanggung jawabnya terhadap pendidikan anak relatif masih rendah

Data yang menunjukkan bahwa banyaknya anak laki-laki yang mengulang kelas dan putus sekolah dibandingkan anak perempuan, dapat dikemukakan beberapa analisis diantaranya, *pertama*, stereotip tentang anak-laki-laki dan anak perempuan. Stereotip yang pantas ada pada anak perempuan seperti tekun, patuh, teliti, rajin, dll dianggap tidak pantas ada pada anak laki-laki. Sehingga ada kecenderungan anak laki-laki menjadi lebih agresif, nakal, dan kurang disiplin. *Kedua*, ada semacam *frame* bahwa "mengajari" anak laki-laki harus dengan kekerasan. Bila tidak demikian, maka mereka akan tetap nakal. Ini diakui oleh beberapa orang guru, bahwa di sekolah SMK yang jumlah siswa laki-lakinya hanya 10%, permasalahan 90% terjadi pada anak laki-laki. Artinya, guru dan orang-orang yang terlibat dalam pendidikan terperangkap dengan stereotip yang bias gender, yang pada gilirannya akan merugikan salah satu pihak baik laki-laki, maupun perempuan.

Selain faktor-faktor di atas, beberapa hal yang juga dianggap berperan terhadap putus sekolah dan mengulang kelas anak laki-laki adalah semakin banyaknya sarana bermain anak laki-laki seperti *playstation*, VCD, dan untuk beberapa kawasan di kota Padang kegiatan ekonomi seperti menjadi tukang ojek, dan menjadi nelayan juga turut memicu meningkatkan jumlah anak-laki-laki mengulang kelas dan putus sekolah. Sementara putus sekolah anak perempuan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi sebahagian ada yang disebabkan karena perkawinan. Namun jumlahnya tidak banyak. Bagi sebahagian orang tua bila anak perempuan putus sekolah, jalan satu satunya yang biasa dilakukan adalah dengan mengawinkan anak perempuan. Apalagi menurut mereka dua tahun tamat SMP anak perempuannya sudah pantas untuk menikah. Selain itu, mereka juga beranggapan bahwa dengan menikahnya anak perempuannya, berarti "selesai" tanggung jawab orang tua terhadap anak perempuan. Akan tetapi ada kecenderungan orang tua kurang memikirkan lebih jauh masa depan anak-anak mereka setelah perkawinan. Pola pikir seperti ini masih relatif banyak terdapat pada masyarakat yang secara ekonomi, dan pendidikan yang masih tergolong rendah.



Di sisi lain, menurut para guru, dan siswa dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler, maupun organisasi siswa tidak terjadi kesenjangan gender. Pada umumnya yang berprestasi adalah siswa perempuan, sehingga dalam kegiatan-kegiatan sekolah mereka juga banyak berperan, bahkan pada salah satu sekolah SMA pada saat penelitian ketua osisnya perempuan. Namun yang menjadi permasalahan bagi mereka, yaitu kecemasan dalam menghadapi masa depan karena dalam masyarakat masih terdapat bias gender, sehingga mereka khawatir, walaupun berprestasi dalam pendidikan mereka akan mengalami diskriminasi dalam dunia kerja, dan dalam keluarga.

#### *(4) Faktor Kontrol*

Sebagaimana dikemukakan di atas, akses dan partisipasi perempuan terhadap jabatan-jabatan pimpinan di tingkat sekolah masih relatif sedikit. Kenyataan ini menyebabkan perempuan kurang terlibat dalam pengambilan keputusan menyangkut berbagai aturan dan kebijakan pendidikan di sekolah. Hal ini disebabkan karena menurut sebahagian perempuan, mereka lebih mengutamakan keluarga dari pada karir. Padahal dalam salah satu diskusi yang dilakukan dengan para guru dapat diamati bahwa para guru perempuan cenderung lebih *care* dalam menyelesaikan berbagai persoalan antar guru, maupun antar siswa, dibandingkan dengan para guru laki-laki.

Masih kuatnya stereotip dalam masyarakat tentang apa yang pantas, dan apa yang tidak pantas bagi perempuan dan laki-laki, menyebabkan timbulnya kesenjangan gender di sekolah-sekolah kejuruan. Sekolah kejuruan yang maskulin didominasi oleh siswa laki-laki, sekolah kejuruan yang feminin didominasi oleh siswa perempuan. Kondisi ini berdampak kurang menguntungkan bagi lulusan untuk mengakses lapangan kerja.

Relatif besarnya kontrol patriarki di dalam masyarakat dan keluarga menyebabkan banyak perempuan yang berkualitas kurang mendapatkan kesempatan untuk mengaktualisasikan diri sebagaimana

mestinya. misalnya untuk mengikuti pendidikan lanjut, dan menjadi kepala sekolah.

### *(3) Faktor Manfaat*

Pemahaman orang tua akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak tanpa membedakan jenis kelamin, memberi keuntungan yang relatif baik bagi anak perempuan. Hal ini tampak dari relatif tingginya APM anak perempuan. Di samping itu, para guru juga relatif “suka” mendidik anak perempuan karena dinilai lebih patuh dan rajin. Di samping itu, pemberian beasiswa juga semakin meningkatkan partisipasi anak perempuan dalam pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.

Keterbukaan beberapa sekolah untuk menerima siswa perempuan sebagai ketua kelas, ketua osis juga akan semakin meningkatkan kualitas kepemimpinan dan percaya diri perempuan pada masa yang akan datang. Serta dapat “mendidik” masyarakat sekolah untuk semakin menyadari pentingnya kesetaraan dan keadilan gender.

Nilai sosial budaya yang patriarkhis cenderung menguntungkan laki-laki, dan merugikan perempuan terutama dalam mengisi jabatan-jabatan pimpinan di tingkat sekolah, maupun lembaga pendidikan lainnya, dan akses terhadap berbagai pelatihan yang dapat meningkatkan kualitas dan wawasan guru.

## **2. Kabupaten Agam**

Berbeda dari kota Padang, kabupaten Agam pada tahun 2002 dalam pembangunan gender berada pada ranking 215 secara Nasional yang sekaligus sebagai daerah dengan IPJ nomor tiga terendah setelah Kep. Mentawai, dan Kota Sawah Lunto di Provinsi Sumatra Barat. Artinya, Kabupaten Agam diukur dari indikator pembangunan gender yang terdiri dari harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan proporsi angkatan kerja antara laki-laki dan perempuan mengalami kesenjangan gender yang relatif besar. Hal ini terjadi akibat dari kondisi geografis, sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat yang relatif jauh

berbeda dengan kondisi Kota Padang yang menduduki ranking IPJ tertinggi di Sumatra Barat.

Kabupaten Agam memiliki keunikan yang dapat dilihat dari kondisi geografis wilayahnya yang terdiri dari dataran rendah, tinggi, dan pantai. Perbedaan daerah tersebut menyebabkan bervariasinya mata pencaharian penduduk seperti bertani, berdagang, nelayan, dan industri rumah tangga. Sebahagian wilayah Agam terletak di pusat kota (dekat kota Bukittinggi), dan sebahagian lain terletak di pedalaman. Perbedaan kondisi ini juga akan menyebabkan perbedaan dalam sosial dan budaya masyarakat yang pada gilirannya akan turut berpengaruh terhadap kemajuan pendidikan baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Di samping masyarakatnya yang homogen, sebagai salah satu luhak, daerah asal Minangkabau, masyarakat di kabupaten Agam cenderung masih memegang nilai-nilai budaya Minangkabau, dimana perempuan mempunyai peran yang strategis di dalam rumah tangganya. Artinya perempuan dalam masyarakat Minangkabau lebih banyak berperan dalam sektor domestik. Sementara laki-laki berperan di sektor publik, dan kerja nafkah, yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat tentang makna pendidikan bagi laki-laki dan perempuan. Kondisi yang demikian juga akan berperan sangat signifikan terhadap terjadinya kesenjangan gender dalam pendidikan di kabupaten Agam yang dapat dilihat dalam beberapa faktor yaitu faktor akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pendidikan bagi laki-laki dan perempuan di kabupaten Agam.

Penduduk kabupaten Agam relatif lebih banyak perempuan dari pada laki-laki, yaitu dengan perbandingan 51,47% perempuan, dan 48,53% laki-laki. Bila ditinjau dari usia sekolah, berdasarkan data Susenas 2003 ternyata proporsi laki-laki lebih banyak dari pada perempuan pada usia 7 – 12 tahun yaitu dengan perbandingan 32036:29624. Demikian juga pada usia 13 – 15 tahun jumlah laki-laki juga lebih banyak daripada perempuan dengan perbandingan 12519:11901. Sedangkan pada usia 15 – 18 tahun jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan yaitu 10458:11520. Data ini dapat diartikan bahwa

untuk 2 – 3 tahun mendatang penduduk pada usia sekolah SMP dan SMA akan lebih dominan laki-laki.

*(0) Faktor Akses*

Berbeda dengan Kota Padang, akses laki-laki dan perempuan masih relatif rendah, dan bahkan semakin rendah pada tingkatan sekolah yang lebih tinggi. Hal ini dapat dilihat dari data Susenas 2003 dimana APM siswa SD/MI 92,53% untuk laki laki, dan 93,64% untuk perempuan. APM siswa SMP/MTs 79,64% untuk laki-laki, dan 69,99% untuk perempuan. Sedangkan APM siswa SMA/MA 49,34% untuk laki-laki, dan 59,22%. Artinya, masih relatif banyak jumlah anak laki-laki maupun anak perempuan usia 15-18 tahun di daerah ini yang tidak mendapatkan pendidikan SMA/MA/SMK.

Sama halnya dengan di Kota Padang, akses perempuan masih rendah pada jenis sekolah kejuruan teknologi, dan akses laki-laki masih rendah pada sekolah kejuruan bisnis/managemen. Hal ini bukan disebabkan oleh sistem seleksi penerimaan siswa, tetapi lebih banyak disebabkan oleh nilai budaya yang stereotip terhadap laki-laki dan perempuan.

Selanjutnya, dalam beberapa aspek yang terkait dengan akses perempuan dan laki-laki dalam pendidikan pada umumnya tidak terdapat kesenjangan, seperti akses terhadap biaya pendidikan, dan beasiswa. Namun dalam memilih jenis sekolah cukup sering orang tua berpendapat bahwa "sekolah semacam STM lebih pas buat anak laki-laki dibandingkan anak perempuan". Dalam beberapa aspek meskipun dialami oleh laki-laki dan perempuan secara bersama-sama, dampak terhadap perempuan kurang menguntungkan. Seperti jarak sekolah yang relatif jauh dari tempat tinggal, dalam cukup banyak hal menjadi penghalang bagi perempuan karena ia "perempuan". Sebaliknya tidak menjadi halangan bagi laki-laki. Hal ini terutama bagi siswa sekolah SMP yang masih relatif jauh dari kampung mereka, dan tidak memungkinkan mereka untuk kost sebagaimana halnya siswa yang bersekolah di SMA yang pada umumnya terletak di pusat-pusat pemerintahan seperti di Lubuk Basung. Sementara

alat transportasi yang tersedia di kampung-kampung sangat terbatas, dan saat ini yang relatif banyak adalah ojek. Namun dari segi keamanan anak perempuan juga masih rentan.

Dibandingkan dengan Kota Padang, di kabupaten Agam proporsi perempuan dalam akses terhadap beasiswa lebih besar dari pada laki-laki di semua tingkatan sekolah kecuali tingkatan SMA/MA. Dan bahkan semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin banyak proporsi siswa perempuan yang memperoleh beasiswa dibandingkan laki-laki. Data dari Diknas Kabupaten Agam menunjukkan bahwa untuk tingkat SD/MI 39,3% penerima beasiswa adalah laki-laki, dan 60,7% perempuan. Tingkat SMP/MTs 26% laki-laki, dan 74% perempuan, sedangkan di tingkat SMA/MA/ASK, penerima beasiswa adalah 20% laki-laki, dan 80% perempuan.

Kenyataan ini berdasarkan wawancara dengan para guru dan beberapa pimpinan sekolah disebabkan oleh jenis beasiswa yang diberikan dengan syarat-syarat yang lebih banyak terpenuhi oleh siswa perempuan, misalnya prestasi. Menurut para guru pada umumnya pemegang ranking tertinggi di setiap kelas adalah perempuan. Akan tetapi, kebijakan ini perlu dipertimbangkan untuk memprioritaskan beasiswa bagi anak laki-laki, karena besarnya angka putus sekolah anak laki-laki. Agar lebih efektif terlebih dahulu perlu diidentifikasi faktor-faktor apa yang dominan yang menyebabkan anak laki-laki putus sekolah. Bila faktor ekonomi mejadi faktor utama, maka prioritas beasiswa patut dipertimbangkan.

Di lihat dari akses guru, data menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan proporsi guru perempuan semakin sedikit. Namun demikian jumlah guru perempuan untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah masih lebih banyak daripada guru laki-laki, sedangkan untuk tingkat sekolah menengah Atas guru laki-laki lebih banyak dari guru perempuan. Artinya, semakin tinggi tingkat sekolah, guru yang dibutuhkan juga yang berpendidikan lebih tinggi. Sementara yang lebih banyak memenuhi standar tersebut di kabupaten Agam adalah laki-laki. Ini jauh berbeda dengan yang terjadi di kota Padang bahwa di semua tingkatan

sekolah jumlah guru perempuan lebih banyak daripada guru laki-laki. Kenyataan ini dapat disebabkan oleh masih kuatnya nilai-nilai patriarkhis dalam masyarakat, dimana pendidikan yang lebih tinggi bagi perempuan daripada laki-laki belum dapat diterima dengan ikhlas apalagi dalam berumah tangga. Di samping itu, sebagaimana banyak terjadi di dalam masyarakat lainnya, satu hal yang "tidak baik" bagi perempuan adalah pergi bekerja meninggalkan keluarganya (suaminya), sebaliknya merupakan "suatu keharusan" bila seorang istri mengikuti tugas suaminya.

Selanjutnya bila dilihat dari status kepegawaiannya yaitu guru tetap dan guru tidak tetap juga lebih didominasi guru perempuan. Akan tetapi bila dilihat dari akses guru perempuan dalam beberapa jabatan seperti menjadi kepala sekolah, atau wakil kepala sekolah, dan jabatan pimpinan lainnya di sekolah, masih relatif sedikit. Di kabupaten Agam, kepala sekolah untuk setiap jenjang pendidikan yang dominan adalah laki-laki termasuk Sekolah Dasar. Dari 593 sekolah, hanya 188 orang kepala sekolah yang perempuan. Untuk tingkat SMP/MTs dari 103 sekolah, hanya 12 orang perempuan yang menjadi kepala sekolah. Sementara untuk tingkat SMA/MA peneliti tidak dapat mengakses data, karena data terpilah tidak tersedia.

Rendahnya persentase perempuan menjadi kepala sekolah bila dibandingkan dengan proporsi guru perempuan lebih banyak terkait dengan faktor internal perempuan. Karena bila dilihat dari kebijakan dan aturan tentang pengangkatan kepala sekolah tidak ada diskriminasi terhadap perempuan. Artinya kebijakan cenderung netral gender. Dari data FGD ditemukan bahwa sedikitnya perempuan yang menjadi kepala sekolah menurut beberapa orang guru perempuan adalah karena mereka harus mendahulukan peran reproduksinya daripada karir. Sementara bagi laki-laki tugas-tugas reproduksi tidak menjadi halangan untuk berkarir. Selain itu, juga ada persoalan budaya ketika seorang perempuan harus pergi untuk menjadi kepala sekolah di salah satu wilayah yang jauh dari tempat tinggal keluarganya. Biasanya masyarakat, perempuan itu sendiri, dan terutama laki-laki tidak dapat menerima kenyataan tersebut. Masyarakat mengaitkan

persoalan kepemimpinan perempuan dengan agama, sebagaimana disampaikan oleh salah seorang responden perempuan dalam FGD, dinyatakan bahwa:

"Pemahaman keagamaan dan ...agama kita mengajarkan untuk pemimpin itu lebih baik laki-laki, karena pikiran mereka lebih rasional dari perempuan. Perempuan yang mengerti agama tidak akan begitu antusias jadi pemimpin dan melebihi laki-laki. Hal ini disebabkan bukan karena perempuan tidak mampu, tetapi Al-Quran mengajarkan demikian,"laki-laki itu ditinggikan sederajat dari perempuan (surat Al-Kahfi)"

Dari pernyataan di atas dan beberapa penelitian terdahulu dapat dikemukakan bahwa terdapat kecenderungan dalam masyarakat Minangkabau di pedesaan pemahaman keagamaan tentang kedudukan dan peran laki-laki dan perempuan masih sangat bias gender yang terjadi baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Kenyataan ini menjadi semakin tidak menguntungkan karena masih relatif banyak guru yang diharapkan akan menjadi agen sosialisasi kesetaraan gender melalui pendidikan di sekolah, ternyata masih sangat bias gender.

Di sisi lain menurut salah seorang responden (perempuan) bahwa perempuan jarang dijadikan pimpinan, lebih banyak ditentukan atau disebabkan karena faktor internal dari perempuan itu sendiri sebagaimana kutipan pendapatnya berikut ini:

"Perempuan selalu disibukkan dengan urusan anak dan keluarga. Hal ini ditonjolkannya. Misalnya ada rapat, maaf terlambat anak saya.....atau suami saya....., sehingga orang tidak mau memilihnya jadi pemimpin karena disibukkan oleh urusan anak dan suami, bukan karena masalah agama"

Dari pendapat di atas dan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dapat disimpulkan bahwa bila dihadapkan pada kondisi yang demikian biasanya perempuan lebih memilih rumah tangga daripada karir. Namun ini tidak berarti bahwa masyarakat dan pengambil kebijakan dapat menjadikan fenomena tersebut sebagai justifikasi bahwa kemampuan perempuan lebih rendah dari laki-laki.

Tidak jauh berbeda dengan Kota Padang, dalam pelatihan, studi lanjut, dan kegiatan-kegiatan yang menunjang kualitas guru tidak terjadi kesenjangan gender. Artinya, baik kebijakan yang ada dan implementasinya di lapangan tidak menjadikan perbedaan gender sebagai alasan untuk mendahulukan laki-laki. Hanya saja dalam beberapa permintaan untuk pelatihan disyaratkan bagi peserta untuk tidak hamil, menyusui, dan membawa anak. Semua syarat tersebut terkait dengan perempuan. Pada umumnya guru perempuan tidak merasakan bahwa syarat-syarat tersebut sebagai bentuk diskriminasi bagi perempuan.

Dalam hal kepangkatan, juga tidak ditemukan adanya diskriminasi terhadap perempuan. Kenaikan pangkat sangat tergantung dengan jumlah jam mengajar guru. Yang pada umumnya sama untuk setiap guru. Di samping itu, ada kecenderungan guru perempuan lebih "rajin", sehingga mereka lebih cepat naik pangkat. Sementara guru laki-laki cukup banyak yang lalai mengurus naik pangkatnya. Meskipun demikian, ternyata tidak selalu ada korelasi yang signifikan antara pangkat dengan penghargaan atau promosi jabatan bagi guru perempuan. Sehingga perempuan masih sangat sedikit yang terlibat dalam pengambilan keputusan di sekolah. Pada umumnya pimpinan sekolah dijabat oleh guru laki-laki.

Selanjutnya bila dilihat dari pejabat struktural di lingkungan Diknas Kabupaten Agam dapat dikemukakan bahwa dari dua eselon yaitu eselon II dan III tidak satu orangpun perempuan, sementara eselon IV terdapat dua perempuan, dan delapan laki-laki.

Sama dengan di Kota Padang, buku-buku pelajaran lokal yang dipakai di Kabupaten Agam juga berasal dari penerbit dan penulis yang sama. Hal ini juga menunjukkan permasalahan yang sama bahwa akses perempuan sebagai penulis buku pelajaran masih sangat sedikit. Kalaupun menjadi penulis buku, kebanyakan perempuan tidak menjadi penulis utama. Buku-buku lokal pada umumnya ditulis oleh penulis laki-laki, dan salah satu buku pelajaran muatan lokal (Budaya Alam Minangkabau) BAM yang dijadikan mata pelajaran wajib (muatan lokal) mulai dari SD sampai SMP di Sumatra Barat, semua penulisnya laki-laki. Kenyataan ini pada gilirannya



tetap akan mempengaruhi kadar bias gender dalam buku-buku pelajaran lokal, apalagi buku-buku yang terkait dengan nilai-nilai budaya tradisional, yang pada kualitas tertentu bahkan cenderung diskriminatif terhadap perempuan.

#### *(2). Faktor Partisipasi*

Sejalan dengan proporsi penduduk usia sekolah dasar (7–12 tahun), sekolah menengah pertama (13-15 tahun), dan sekolah menengah atas (16-18 tahun, proporsi siswa SD dan SMP juga relatif banyak laki-laki dibandingkan dengan perempuan, namun dalam persentase yang tidak terlalu besar Sedangkan untuk tingkat SMA jumlah perempuan lebih banyak dari pada laki-laki Secara kuantitatif angka mengulang kelas untuk semua tingkatan kelas dan sekolah secara terpisah laki-laki dan perempuan di daerah ini tidak tersedia, namun berdasarkan wawancara dengan para guru dan beberapa pimpinan sekolah diketahui bahwa tidak berbeda dengan kondisi mengulang kelas yang terjadi pada umumnya di Sumatra Barat, di Kabupaten Agam jumlah siswa mengulang kelas proporsinya juga lebih banyak laki-laki dibandingkan dengan proporsi siswa perempuan.

Sementara dilihat dari angka putus sekolah, data Susenas 2003 menunjukkan bahwa persentase putus sekolah anak perempuan jauh lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki yaitu 18,94%:14,78% . Akan tetapi pada tingkat SMP persentase putus sekolah laki-laki sedikit lebih banyak dari perempuan dengan perbandingan 5,19%:4,09%. Demikian juga putus sekolah di tingkat SMA persentase laki-laki relatif banyak dibandingkan perempuan, yaitu 3,53%:2,07%.

Berdasarkan hasil FGD dan wawancara dengan berbagai pihak baik orang tua, siswa, masyarakat, guru, maupun penyelenggara pendidikan dapat dikemukakan beberapa faktor yang melatarbelakangi kondisi ketimpangan gender terutama banyaknya angka putus sekolah dan mengulang kelas anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan di Kabupaten Agam. Pertama, faktor yang berasal dari dalam diri siswa berupa motivasi belajar yang rendah. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh salah seorang kepala sekolah bahwa:

“...anak laki-laki itu seolah-olah banyak yang agak putus asa kalau dia tamat nanti. Mereka mengatakan ‘kalau toh kita nanti jadi sarjana kita akan begini juga’ ....’alah jadi tu awak kasarupo itu juonyo’ , begitu yang terucap dari mulut anak-anak.”

Menurut para guru agak sulit untuk menghilangkan pesimisme anak-anak. Selain karena faktor ekonomi di mana kebanyakan anak-anak di pedesaan terpaksa bekerja dulu untuk mencari uang untuk membayar uang sekolah, biaya sekolah yang terlalu tinggi juga membuat mereka putus asa. Biaya sekolah tidak hanya uang sekolah yang dirasakan berat oleh orang tua, tetapi yang juga cenderung membebani lebih berat adalah biaya buku, pakaian, perlengkapan sekolah, uang pembangunan, dan beberapa pungutan lainnya sehingga totalnya menjadi relatif besar.

Kedua adalah faktor eksternal yang terdiri dari faktor ekonomi orang tua, pendidikan orang tua yang relatif rendah, pengaruh TV, VCD, dan alat-alat permainan seperti playstation, dan kondisi lingkungan yang kurang mendukung terutama adanya kebiasaan masyarakat (laki-laki) di daerah ini duduk di *Lapau* sampai larut malam dengan berbagai kegiatan seperti nonton TV, main domino, atau *maota*. Sebagaimana yang dikemukakan salah seorang kepala sekolah bahwa:

“....situasi lingkungan yang tidak mendukung pendidikan anak,. Karena warung-warung di daerah ini terbuka sampai jam 2 malam, sehingga sebahagian besar anak laki-laki bebas saja pergi ke warung. Kepedulian orang tua dan masyarakat kurang, sehingga anak laki-laki besarnya di warung”.

Kondisi di atas, di satu sisi memberi manfaat positif bagi anak nagari untuk menjalankan kehidupan ekonominya, tempat berkumpul, dan bertukar pendapat, namun disisi lain karena tidak adanya kontrol yang memadai dari orang tua dan masyarakat, maka *lapau* menjadi kondisi yang tidak kondusif bagi pencapaian pendidikan anak-anak di daerah tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya kontrol sosial masyarakat terhadap

pemanfaatan lapau terutama bagi pelajar laki-laki. Hal ini penting karena sebagaimana yang dikemukakan salah seorang Ibu ketika ditanyakan kapan ibu mengontrol anak-anak untuk belajar? ia mengatakan bahwa : "...tidak sempat, karena kadang-kadang anak-anak ini pulang dari lapau jam 11 atau jam 12 malam".....!

Hampir sama dengan yang dialami oleh sebahagian siswa di kota Padang, faktor ekonomi di daerah ini terutama di daerah pantai dan pertanian menjadi faktor utama yang menyebabkan masalah pendidikan bagi anak-anak. Ekonomi yang tidak memadai tidak hanya memaksa anak-laki untuk membantu orang tua bekerja mencari uang, tetapi juga memaksa anak perempuan untuk berhenti sekolah karena harus menjaga adik-adiknya selama orang tua bekerja di ladang. Penelitian Suasti dan Fatmariza 2003 menemukan bahwa ada kecenderungan di daerah ini keluarga miskin mempunyai anak yang jumlahnya relatif banyak yaitu antara 5 sampai 9 orang. Kondisi ini dalam kenyataannya menjadi kendala bagi kebanyakan orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya sampai ke jenjang yang lebih tinggi.

Selanjutnya, berdasarkan data yang menunjukkan bahwa banyaknya anak laki-laki yang mengulang kelas dan putus sekolah dibandingkan anak perempuan, dapat dikemukakan beberapa analisis diantaranya, *pertama*, stereotip yang diyakini oleh banyak orang baik guru, siswa, maupun masyarakat tentang anak-laki-laki dan anak perempuan. Stereotip yang pantas ada pada anak perempuan seperti tekun, patuh, teliti, rajin, dll dianggap tidak pantas ada pada anak laki-laki. Sehingga ada kecenderungan anak laki-laki menjadi lebih agresif, nakal, dan kurang disiplin. *Kedua*, ada semacam *frame* bahwa "mengajari" anak laki-laki harus dengan kekerasan. Bila tidak demikian, maka mereka akan tetap nakal. Ini diakui oleh beberapa orang guru, bahwa di sekolah SMK yang jumlah siswa laki-lakinya hanya 10%, permasalahan 90% terjadi pada anak laki-laki. Artinya, guru dan orang-orang yang terlibat dalam pendidikan terperangkap dengan stereotip yang bias gender, yang pada gilirannya akan merugikan baik terhadap laki-laki, maupun terhadap perempuan.

Sementara putus sekolah anak perempuan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi sebahagian ada yang disebabkan karena perkawinan. Namun jumlahnya tidak banyak. Bagi sebahagian orang tua terutama di pedesaan bila anak perempuan putus sekolah, jalan satu satunya yang biasa dilakukan adalah dengan mengawinkan. Apalagi menurut mereka dua tahun tamat SMP anak perempuannya sudah pantas untuk kawin. Selain itu, mereka juga beranggapan bahwa dengan menikahnya anak perempuan mereka berarti "selesai" tanggung jawab orang tua terhadap anak perempuannya, tanpa memikirkan lebih jauh masa depan anaknya setelah perkawinan. Pola pikir seperti ini masih relatif banyak terdapat pada masyarakat yang secara ekonomi, dan pendidikan masih tergolong rendah.

Di sisi lain, para guru, dan siswa mengakui bahwa dalam kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler, maupun organisasi siswa tidak ditemukan adanya kesenjangan gender. Karena pada umumnya siswa berprestasi adalah siswa perempuan, sehingga dalam kegiatan-kegiatan sekolah mereka juga relatif banyak berperan, seperti mengikuti kejuaraan, pemilihan siswa berprestasi, atau mengikuti kegiatan ko kurikuler maupun ekstra kurikuler. Hanya saja menurut beberapa orang siswa, mereka sangat jarang menemukan guru perempuan yang dapat dijadikan model dalam berprestasi. Karena menurut mereka, sebagaimana juga dikemukakan di atas, guru perempuan cenderung jarang mengaktualisasikan dirinya seoptimal mungkin. Mereka lebih banyak berkiprah dalam hal-hal yang sifatnya sederhana dan kurang prestisius.

### *(3). Faktor Kontrol*

Sebagaimana dikemukakan di atas, akses dan partisipasi perempuan terhadap jabatan-jabatan pimpinan di tingkat sekolah masih relatif kecil. Kenyataan ini menyebabkan perempuan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan menyangkut berbagai aturan dan kebijakan pendidikan di sekolah. Dalam salah satu diskusi yang dilakukan dengan para guru dapat diamati bahwa para guru perempuan cenderung lebih *care* dalam menyelesaikan berbagai persoalan antar guru, maupun antar siswa,

dibandingkan dengan para guru laki-laki yang cenderung “keras” dan terkesan mendominasi.

Masih kuatnya stereotip dalam masyarakat tentang apa yang pantas, dan apa yang tidak pantas bagi laki-laki dan perempuan, menyebabkan timbulnya kesenjangan gender di sekolah-sekolah kejuruan. Sekolah kejuruan yang maskulin didominasi laki-laki, sekolah kejuruan feminin didominasi perempuan. Kondisi ini berdampak kurang menguntungkan bagi lulusan untuk mengakses lapangan kerja. Relatif besarnya kontrol patriarki dan pemahaman agama yang bias gender di dalam masyarakat, dan keluarga menyebabkan banyak perempuan berkualitas tidak mendapatkan kesempatan untuk mengaktualisasikan diri sebagaimana mestinya. Misalnya untuk mengikuti pendidikan lanjut, dan menjadi kepala sekolah.

#### *(4). Faktor Manfaat*

Pemahaman orang tua akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak tanpa membedakan jenis kelamin, memberi keuntungan yang relatif baik bagi anak perempuan. Hal ini tampak dari relatif tingginya APM anak perempuan. Di samping itu, para guru juga relatif “suka” mendidik anak perempuan karena dinilai lebih patuh dan rajin. Di samping itu, pemberian beasiswa juga semakin meningkatkan partisipasi anak perempuan dalam pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.

Keterbukaan beberapa sekolah untuk menerima siswa perempuan sebagai ketua kelas, ketua osis juga akan semakin meningkatkan kualitas kepemimpinan dan percaya diri perempuan pada masa yang akan datang. Serta dapat “mendidik” masyarakat sekolah untuk semakin menyadari pentingnya kesetaraan dan keadilan gender. Nilai sosial budaya yang patriarkhis terutama sangat terasa dalam masyarakat pedesaan, dan masyarakat tradisional cenderung menguntungkan laki-laki, dan merugikan perempuan terutama dalam mengisi jabatan-jabatan pimpinan di tingkat sekolah, maupun lembaga pendidikan lainnya, dan akses terhadap berbagai pelatihan yang dapat meningkatkan kualitas dan wawasan guru perempuan.

#### D. Isu-Isu Kebijakan Gender

Berdasarkan fenomena-fenomena kesenjangan gender serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, dapat diidentifikasi beberapa isu kebijakan gender yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut sebagai berikut :

- (1) Kesenjangan gender yang paling menonjol terjadi pada tingkatan kelas tinggi pada setiap jenjang pendidikan. Meskipun pada tingkatan kelas rendah proporsi laki-laki dan perempuan relative seimbang, namun akibat putus sekolah dan mengulang kelas siswa laki-laki relative lebih besar dari pada perempuan terutama pada tingkatan kelas rendah. Hal inilah yang menyebabkan melebarnya kesenjangan gender pada tingkatan kelas tinggi di setiap jenjang pendidikan.
- (2) Buku pelajaran yang bias gender, analisis bahan pelajaran Bahasa Indonesia, PPKn, IPS, dan Budaya Adat Minangkabau (BAM) yang membahas status dan fungsi perempuan, sajian-sajian dari buku pelajaran tersebut mempertahankan kesenjangan gender dalam waktu lama. Hal ini mengakibatkan perempuan tetap dianggap tidak memiliki mentalitas sebagai warga negara yang produktif atau warga negara besifat domestic
- (3) Kemampuan bertahan menyelesaikan studi bagi perempuan relatif lebih tinggi dari laki-laki. Data membuktikan bahwa angka putus sekolah dan angka mengulang kelas perempuan lebih rendah serta angka kelulusan perempuan yang lebih tinggi dari laki-laki. Hal ini berarti perempuan betul-betul memanfaatkan kesempatan belajar secara optimal.
- (1) Posisi perempuan yang kurang strategis dalam proses pengambilan keputusan di bidang pendidikan menyebabkan kesenjangan gender menjadi terlembagakan (*institutionalized*) dalam berbagai dimensi sistem pendidikan. Sikap para pengelola dan pelaksana pendidikan yang masih bias gender secara konsisten dan berkesinambungan

mengakibatkan terjadinya kesenjangan gender yang bertahan dalam waktu yang lama.

- (3) Ketidak sesuaian ijazah yang dimiliki guru dengan bidang studi yang dibina merupakan salah satu faktor penyebab pelaksanaan proses belajar mengajar tidak berjalan maksimal hingga menyebabkan pencapaian mutu pembelajaran tidak optimal. Hal ini akan berdampak kepada angka mengulang kelas dan putus sekolah yang tinggi khususnya siswa laki-laki, karena suasana belajar yang kurang kondusif dan pengaruh lingkungan negatif yang kuat merupakan salah satu tempat pelarian bagi siswa laki-laki untuk meninggalkan kelas.
- (3) Rendahnya jumlah penulis buku ajar perempuan akan berdampak kepada lambatnya proses menciptakan buku ajar yang responsif gender ditengah-tengah masyarakat.

## BAB V

### REFORMULASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN YANG RESPONSIF GENDER DI SUMATRA BARAT

#### E. Kebijakan Pendidikan yang Responsif Gender

Berdasarkan hasil penelitian tentang "Kebijakan Pendidikan Berwawasan Gender di Sumatra Barat", dan mengacu kepada 2 dari 4 strategi pokok kebijakan pembangunan Pendidikan Nasional yaitu: (1) peningkatan mutu pendidikan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan, (2) peningkatan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, perlu dilakukan:

##### 1. Reformulasi Kebijakan Pendidikan:

- . Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat menuju terciptanya masyarakat berpendidikan yang berkesetaraan dan berkeadilan gender dengan peningkatan anggaran pendidikan yang responsif gender
- . Menciptakan iklim sekolah yang kondusif, dan pendekatan pembelajaran yang manusiawi dan bermutu untuk menciptakan lulusan yang berkualitas
- . Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional, tenaga kependidikan sehingga pendidik mampu berfungsi secara optimal
- . Meningkatkan *responsivitas stake holder* pendidikan terhadap isu-isu gender dalam pendidikan
- . Memberdayakan lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap dan perilaku yang mencerminkan kesetaraan gender
- . Meningkatkan kualitas kerjasama antara sekolah dan keluarga dalam memfasilitasi siswa.



## **2. Program Sinkronisasi dan Koordinasi**

- a. Menyempurnakan statistik pendidikan yang dapat menghasilkan indikator pendidikan yang berwawasan gender pada setiap jenjang dan jenis pendidikan secara berkelanjutan
- b. Memperbaiki sistem pengangkatan kepala sekolah dan pengawas baru yang lebih seimbang sehingga dapat mewujudkan kesetaraan gender
- c. Mempertimbangkan unsur jenis kelamin dalam pengangkatan para pejabat struktural di lingkungan Pendidikan Nasional, mulai dari tingkat pusat, daerah sampai ke jenjang terendah
- d. Mensosialisasikan proses pendidikan dan pembelajaran yang berwawasan gender melalui pelatihan dan pertemuan-pertemuan ilmiah lainnya

## **B. Rencana Aksi Pembangunan Pendidikan yang Responsif Gender**

### **1. Rencana Aksi**

- a. Pembebasan semua biaya pendidikan bagi siswa guna mencapai perluasan dan pemerataan kesempatan pendidikan yang bermutu bagi anak usia pendidikan dasar, dengan cara meningkatkan anggaran pendidikan yang responsif gender.
- b. Memotivasi dan memfasilitasi guru untuk melaksanakan action research pada mata pelajaran yang dibina, sehingga akan ditemukan pendekatan pembelajaran yang lebih efektif dan bermutu. Kemudian mensosialisasikan temuan di lingkungan sekolah dan Diknas bagi temuan yang dapat dipandang memberikan kontribusi yang lebih luas.
- c. Memberikan kesempatan dan fasilitas yang luas kepada guru untuk mengikuti studi lanjut, magang, pelatihan/penataran dan pertemuan ilmiah lainnya dalam upaya menciptakan tenaga kependidikan yang berwawasan luas dan profesional.

- d. Memberikan orientasi terhadap guru-guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK.mengenai pendidikan yang berwawasan gender
- e. Memberikan orientasi terhadap Kepala Sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK, .mengenai manajemen pendidikan yang berwawasan gender
- f. Inventarisasi kelayakan mengajar guru berdasarkan jenis kelamin. Guru yang tidak layak mengajar perlu mengikuti studi lanjut untuk mendapatkan ijazah keguruan yang relevan.
- g. Dinas Pendidikan diharapkan mendistribusikan guru Bimbingan dan Penyuluhan minimal satu orang pada masing-masing sekolah disetiap jenjang pendidikan dan memfungsikannya secara optimal. Komunikasi dan kerjasama dengan ortu siswa perlu ditingkatkan untuk menekan angka putus sekolah dan mengulang kelas.
- h. Peningkatan pemberian beasiswa kepada siswa secara proporsional untuk memasuki program studi yang bias gender terutama pada anak perempuan di sekolah kejuruan teknologi, serta beasiswa kepada siswa laki-laki pada kasus mengulang dan DO
- i. Revisi materi buku pelajaran Sekolah Dasar yang bias gender.
- j. Meningkatkan kuantitas perempuan penulis buku pelajaran dan melaksanakan pelatihan sensitivitas gender khususnya penulis buku di Sumbar.
- k. Perlu penertiban alat permainan multi media yang tidak menunjang pembelajaran seperti media play station dan sejenisnya, terutama pada lokasi lingkungan sekolah.

## **2. Indikator Rencana Aksi**

- a. Tercapainya perluasan dan pemerataan kesempatan pendidikan yang bermutu bagi anak usia pendidikan dasar,dengan pengeluaran biaya pendidikan seminim mungkin

bagi siswa serta bertambahnya subsidi untuk pendidikan melalui APBD.

- b. Termotivasinya dan pemberian fasilitas guru yang melaksanakan pengembangan dan evaluasi (mis: action research) pada mata pelajaran yang dibina, sehingga akan ditemukan pendekatan pembelajaran yang lebih efektif, bermutu dan responsif gender.
- c. Terlaksananya sosialisasi temuan ilmiah di lingkungan sekolah dan Diknas, yang dapat dipandang memberikan kontribusi yang lebih luas.
- d. Meningkatnya jumlah guru yang mengikuti studi lanjut, magang, pelatihan/penataran dan pertemuan ilmiah lainnya, sehingga terciptanya tenaga kependidikan yang berwawasan luas, profesional dan responsif gender.
- e. Terlaksananya proses pendidikan yang responsif gender oleh guru-guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK.
- f. Terlaksananya manajemen sekolah yang responsif gender oleh Kepala Sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK.
- l. Terinventarisasinya kelayakan mengajar guru berdasarkan jenis kelamin. Guru yang tidak layak mengajar perlu mengikuti studi lanjut untuk mendapatkan ijazah keguruan yang relevan.
- m. Peningkatan pemberian beasiswa kepada siswa secara proporsional untuk memasuki program studi yang bias gender terutama pada anak perempuan di sekolah kejuruan teknologi, serta beasiswa kepada siswa laki-laki pada kasus mengulang dan DO
- n. Terevisinya kurikulum dan materi buku pelajaran Sekolah Dasar yang bias gender
- o. Bertambahnya jumlah perempuan penulis buku pelajaran sehingga dapat mempercepat tersedianya buku pelajaran yang sensitif gender

- p. Tersedianya buku pelajaran, alat pelajaran serta kelengkapan perpustakaan sekolah yang responsif gender
- . Tercapainya proporsi yang seimbang dari para pelaksana pendidikan yang responsif gender pada setiap jenjang dan jenis pendidikan
- . Tersedianya guru Bimbingan dan Penyuluhan di setiap sekolah, sehingga angka mengulang kelas dan putus sekolah sudah dapat ditekan, seiring dengan lancarnya komunikasi dan kerjasama dengan orangtua siswa.
- . Diperketatnya pemberian izin usaha tempat permainan multi media dan sejenis (seperti play station) disekitar lokasi dan waktu sekolah.

### **3. Indikator Sinkronisasi dan Koordinasi**

- a. Dihasilkan data statistik semua komponen pendidikan yang sudah berwawasan gender
- b. Terwujudnya keseimbangan gender para pejabat struktural di lingkungan Dinas Pendidikan, mulai dari tingkat pusat, daerah sampai jenjang terendah
- c. Terselenggaranya program pembinaan jenjang karier guru, serta guru yang memenuhi persyaratan sebagai Kepala Sekolah dan Pengawas dengan mempertimbangkan keseimbangan gender menuju terwujudnya kepemimpinan pendidikan yang perspektif gender.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arivia, Gadis. (penyadur), 2002. "Apa yang disebut dengan kurikulum?. *Jurnal Perempuan Nomor 23 tahun 2002*, halaman 35 – 48.
- Anonim.2002. *Profil Statistik dan Indikator Gender Provinsi Sumatera Barat Tahun 2000*. Jakarta : BPS; Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan.
- Anonim. *Rencana Induk Pembangunan Nasional Pemberdayaan Perempuan 2000-2004*, Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Republik Indonesia
- Buku Data Pokok Pendidikan Tahun 2001/2002 Pemerintahan Propinsi Sumatera Barat Dinas Pendidikan.*
- Buku Profil Pendidikan Propinsi Sumatera Barat, Dinas Pendidikan Tahun 2002/2003*
- BPS, 2003, *Survei Sosial Ekonomi Nasional 2002 Propinsi Sumatera Barat*
- Chotib, Ananta Aris. 1996. Analisis Mobilitas Penduduk; Subjek penting yang Belum Banyak Tergarap; dalam *Mobilitas Penduduk di Indonesia*. Jakarta : Kantor Menteri Negara Kependudukan/BKKBN dan Lembaga Demografi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- Fakih, Mansour. 1996. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- 1998a. "Diskriminasi dan Beban Kerja Perempuan : Perspektif Gender". Dalam Baidar (ed), *Wacana Perempuan dalam Keindonesiaan dan Kemodernan*. Jakarta : CIDES-UII
- 1998b. "Isu-isu dan Manifestasi Ketidakadilan Gender" Dalam Muchotib MD (ed) *Menggagas Jurnalisme Sensitif Gender*. Yogyakarta : PMII dan INPI Pact.
- Fatmariza, 1999. *Pendidikan Anak Perempuan dalam Keluarga dan Masyarakat Minangkabau*. Tesis S2. Universitas Indonesia. Tidak diterbitkan
- Fatmariza; Indrati; Suasti; Suryanef; Maria Montessori; Avriva Khaidir; Ikhtwan.2002. *Laporan penelitian Kajian Pengembangan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Nagari*. Padang : Balaibangda kerjasama dengan LP-UNP Padang.
- Irawan dan Suparmoko. 1995. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta : BPFE.

- Isnami dan Yumi Suasti.2002. *Laporan Penelitian Media Massa dan Keadilan Gender : Analisis Isi dan Artikel Koran Lokal Sumatera Barat*. Padang : FIS-UNP Padang.
- Mantra, Ida Bagus. 1985. *Pengantar Studi Demografi*. Yogyakarta : Nur Cahaya.
- Miko, Alfian. 1991. *Pekerja Perempuan pada Industri Rumah Tangga Sandang di Propinsi Sumatera Barat*. Yogyakarta : PPK UGM.
- Mosser, Caroline. 1989. *Gender Planning in The Third World : Meeting Practical and Strategic Gender Need*, kit Kontrol terhadap sumber daya.
- ,1993. *Gender Planning and Development Theory, Practice and Training*. Routledge, London.
- Nurhadi Wiyono. 1995. *Tantangan Pelaksanaan Pempampuan Perempuan*, Warta Demografi tahun ke 25, 1995, Jakarta.
- Rejeki Sumaryoto, Sri. 2001. *Bahan Pembelajaran Pelatihan Pengarus-utamaan Gender Bidang Kesehatan Reproduksi dan Kependudukan*. UNFPA,Kantor Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI, BKKBN: Jakarta.
- Sjaifudian, Hetifah. .Sensitivitas Gender dalam Perumusan KebijakanPublik, dalam *Analisis Sosial edisi 4/November 1996*.Akadiga:Bandung.
- Syarifuddin, Amir.1984. *Pelaksanaan Hukun Kewarisan Isam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung
- Supiandi ,Yusuf Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Temu Pakar di Bandung 18 Desember 2002 Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI bekerjasama dengan Forum Studi Wanita.
- Tukiran. 1997. Analisis Fertilitas di Indonesia dari data Sekunder disampaikan pada *Pelatihan Peningkatan Kemampuan Penelitian dan Analisis Data Bagi Staf Biro Pusat Statistik di Yogyakarta*, 20 Oktober-1 November 1997. 1-19.

Lampiran 1 :

**Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur,  
Jenis Kelamin dan Kota - Desa**

*Perkotaan*

Kelompok Umur	2000		2001		2002		2003	
	L	P	L	P	L	P	L	P
7 - 12	98.36	98.18	98.75	98.69	97.49	97.68	97.03	98.89
13 - 15	89.76	92.67	90.14	94.57	91.00	92.48	91.99	95.04
16 - 18	76.27	86.86	71.56	83.36	73.67	85.07	74.46	84.93

Sumber : Susenas 2000 - 2003, BPS Prov. Sumatra Barat

*Pedesaan*

Kelompok Umur	2000		2001		2002		2003	
	L	P	L	P	L	P	L	P
7 - 12	95.14	96.79	94.64	96.21	95.18	96.00	96.33	96.84
13 - 15	82.91	87.64	81.58	85.60	77.57	86.70	82.06	86.47
16 - 18	53.22	59.21	48.80	64.83	52.29	61.55	51.18	59.97

Sumber : Susenas 2000 - 2003, BPS Prov. Sumatra

*Perkotaan + Pedesaan*

Kelompok Umur	2000		2001		2002		2003	
	L	P	L	P	L	P	L	P
7 - 12	95.96	97.12	95.68	96.84	95.86	96.48	96.52	97.38
13 - 15	84.46	88.96	83.74	88.04	81.63	88.38	84.78	88.81
16 - 18	60.66	67.56	56.01	70.31	58.64	69.26	58.22	68.21

Sumber : Susenas 2000 - 2003, BPS Prov. Sumatra Barat

Lampiran 2 :

**Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan**

**Perkotaan**

Jenjang Pendidikan	2000		2001		2002		2003	
	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR
SD / MI	92.79	90.78	95.69	93.97	91.92	89.62	89.89	91.77
SLTP/MTs	67.44	72.24	71.10	74.58	72.28	74.71	70.88	74.43
SMU/K/MA	62.85	72.53	59.36	72.64	62.58	67.98	60.78	72.62

Sumber : Susenas 2000 – 2003, BPS Prov. Sumatra Barat

**Pedesaan**

Jenjang Pendidikan	2000		2001		2002		2003	
	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR
SD / MI	92.88	92.97	95.91	95.59	92.57	93.28	93.12	93.42
SLTP/MTs	57.14	64.57	61.18	64.99	57.76	67.76	61.69	65.54
SMU/K/MA	35.55	45.02	33.90	51.48	38.43	44.05	37.90	46.19

Sumber : Susenas 2000 – 2003, BPS Prov. Sumatra Barat

**Perkotaan + Pedesaan**

Jenjang Pendidikan	2000		2001		2002		2003	
	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR
SD / MI	92.86	92.44	95.85	95.18	92.38	92.22	92.22	92.98
SLTP/MTs	59.47	66.59	63.68	67.59	62.15	69.77	64.21	67.96
SMU/K/MA	44.36	53.33	41.97	57.74	45.60	51.89	44.82	54.92

Sumber : Susenas 2000 – 2003, BPS Prov. Sumatra Barat



Lampiran 3 :

Tabel : Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Perkotaan							
	2000		2001		2002		2003	
	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR
SD / MI	109.24	104.64	109.31	108.78	102.82	100.88	104.41	103.44
SLTP/MTs	97.05	93.42	93.61	96.14	96.40	104.02	98.69	98.87
SMU/K/MA	84.31	93.25	74.58	89.43	85.01	89.22	79.57	92.26

Sumber : Susenas 2000 – 2003, BPS Prov. Sumatra Barat

Jenjang Pendidikan	Pedesaan							
	2000		2001		2002		2003	
	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR
SD / MI	110.79	108.52	109.35	108.59	104.66	105.14	106.32	105.05
SLTP/MTs	75.33	84.87	75.10	82.30	80.07	89.68	80.97	86.80
SMU/K/MA	51.11	57.42	44.28	56.97	48.58	54.72	49.31	58.08

Sumber : Susenas 2000 – 2003, BPS Prov. Sumatra Barat

Jenjang Pendidikan	Perkotaan + Pedesaan							
	2000		2001		2002		2003	
	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR
SD / MI	110.40	107.59	109.34	108.64	104.11	103.91	105.79	104.63
SLTP/MTs	81.02	87.11	79.77	86.06	85.01	93.84	85.82	90.09
SMU/K/MA	61.82	68.24	53.88	66.57	59.39	66.02	58.46	69.37

Sumber : Susenas 2000 – 2003, BPS Prov. Sumatra Barat

Lampiran 4 :

Tabel : Indeks Paritas dan Disparitas menurut Jenjang Pendidikan

*Perkotaan*

Jenjang Pendidikan	2000		2001		2002		2003	
	D	IP	D	IP	D	IP	D	IP
SD / MI	-8.80	0.84	-3.60	0.93	-5.00	0.91	-7.00	0.87
SLTP/MTs	6.00	1.13	2.80	1.06	4.40	1.09	-4.40	0.92
SMU/K/MA	1.40	1.03	8.40	1.18	1.80	1.04	12.00	1.27

Sumber : Susenas 2000 – 2003, BPS Prov. Sumatra Barat

*Pedesaan*

Jenjang Pendidikan	2000		2001		2002		2003	
	D	IP	D	IP	D	IP	D	IP
SD / MI	-3.80	0.93	-3.20	0.94	-1.60	0.97	-3.20	0.94
SLTP/MTs	3.40	1.07	1.00	1.02	9.00	1.20	-0.80	0.98
SMU/K/MA	7.00	1.15	16.60	1.40	-2.00	0.96	6.40	1.14

Sumber : Susenas 2000 – 2003, BPS Prov. Sumatra Barat

*Perkotaan + Pedesaan*

Jenjang Pendidikan	2000		2001		2002		2003	
	D	IP	D	IP	D	IP	D	IP
SD / MI	-4.97	0.91	-3.35	0.94	-2.62	0.95	-4.26	0.92
SLTP/MTs	4.06	1.08	1.57	1.03	7.45	1.16	-1.91	0.96
SMU/K/MA	4.63	1.10	13.20	1.30	-0.31	0.99	8.73	1.19

Sumber : Susenas 2000 – 2003, BPS Prov. Sumatra Barat

Lampiran 5 :

Angka Buta Aksara Penduduk 10 Tahun Keatas

*Perkotaan*

Usia	2000		2001		2002		2003	
	L	P	L	P	L	P	L	P
10 - 14	0.46	1.08	2.66	1.00	0.51	0.28	0.59	0.00
15 - 24	0.69	0.11	0.77	0.70	0.49	0.40	0.41	0.22
25 - 44	0.75	1.20	0.85	1.59	0.52	1.00	0.40	0.80
45 +	1.43	6.62	3.16	8.59	1.68	6.84	1.46	5.74

Sumber : Susenas 2000 - 2003, BPS Prov. Sumatra Barat

*Pedesaan*

Usia	2000		2001		2002		2003	
	L	P	L	P	L	P	L	P
10 - 14	1.18	0.70	2.47	0.80	2.96	1.35	1.48	0.50
15 - 24	1.29	1.51	1.36	1.19	2.01	1.25	1.23	1.35
25 - 44	1.73	4.50	3.19	6.22	2.44	4.60	1.66	3.61
45 +	7.79	19.79	8.80	21.42	8.08	18.02	7.21	17.44

Sumber : Susenas 2000 - 2003, BPS Prov. Sumatra Barat

*Perkotaan + Pedesaan*

Usia	2000		2001		2002		2003	
	L	P	L	P	L	P	L	P
10 - 14	1.01	0.79	2.51	0.85	2.21	1.04	1.24	0.36
15 - 24	1.10	1.04	1.16	1.03	1.52	0.95	0.97	0.93
25 - 44	1.43	3.55	2.48	4.82	1.83	3.46	1.25	2.74
45 +	6.27	16.60	7.38	18.21	6.33	14.99	5.75	14.54

Sumber : Susenas 2000 - 2003, BPS Prov. Sumatra Barat

Lampiran 6 :

Tingkat Keragaman Akses Terhadap Pendidikan Anak  
Antar kabupaten/kota Tahun 2000-2003

NO	KELOMPOK UMUR	2000			2001			2002			2003		
		R	Rt	T	R	Rt	T	R	Rt	T	R	Rt	T
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	<b>7 – 12 tahun</b>												
	Laki-laki	91.17	95.96	99.63	90.66	95.68	99.32	91.33	95.86	99.31	94.77	96.52	98.62
	• Perempuan	94.63	97.12	100	95.40	96.84	100	93.89	96.48	99.23	95.04	97.38	100
	• Indeks Paritas		0.91			0.94			0.95			0.92	
2	<b>13 – 15 tahun</b>												
	• Laki-laki	75.51	84.46	95.05	73.76	83.74	92.83	57.02	81.63	92.06	65.81	84.78	95.91
	• Perempuan	81.75	88.96	98.21	84.18	88.04	96.41	75.24	88.38	98.30	78.87	88.81	100
	• Indeks Paritas		1.08			1.03			1.16			0.96	
3	<b>16 – 18 tahun</b>												
	• Laki-laki	36.43	60.66	77.59	34.30	56.01	79.98	27.98	58.64	77.04	41.41	58.22	81.69
	• Perempuan	47.78	67.56	87.76	26.36	70.31	82.98	40.46	69.26	91.18	42.53	68.21	89.15
	• Indeks Paritas		1.10			1.30			0.99			1.19	

Lampiran 7 :

APK, APM, dan APS Penduduk Usia 7 – 12 Tahun  
Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2000

Kabupaten / Kota	APK		APM		APS	
	L	P	L	P	L	P
01 Kep. Mentawai *	-	-	-	-	-	-
02 Pesisir Selatan	108.70	104.45	97.67	96.52	99.51	96.52
03 Solok	103.26	105.11	86.83	92.90	91.17	95.09
04 Swi / Sijunjung	105.65	104.55	93.02	87.68	93.41	94.79
05 Tanah Datar	116.54	108.40	98.13	93.89	99.36	100.00
06 Padang Pariaman	112.13	109.46	90.19	91.71	93.75	96.43
07 Agam	109.72	117.38	91.49	97.10	95.97	98.16
08 Limapuluh Kota	108.64	113.81	92.97	92.71	96.90	97.26
09 Pasaman	116.68	115.28	93.35	96.83	93.91	98.10
71 Padang	109.03	98.26	94.15	85.34	99.63	97.54
72 Solok	118.16	101.64	89.93	86.84	95.44	94.63
73 Sawahlunto	109.51	97.53	92.39	86.30	97.88	95.13
74 Padang Panjang	117.61	104.16	96.02	90.69	96.98	100.00
75 Bukittinggi	114.26	109.56	93.27	94.26	97.97	99.35
76 Payakumbuh	115.56	95.81	95.58	90.12	98.72	97.44
<b>Sumatra Barat</b>	<b>110.40</b>	<b>107.59</b>	<b>92.86</b>	<b>92.44</b>	<b>95.96</b>	<b>97.12</b>

Keterangan : \*). Masih tergabung dengan Kab. Padang Pariaman

Sumber : Susenas 2000 – 2003, BPS Prov. Sumatera Barat

Lampiran 8 :

APK, APM, dan APS Penduduk Usia 13 – 15 Tahun  
Provinsi Sumatra Barat, Tahun 2000

Kabupaten / Kota	APK		APM		APS	
	L	P	L	P	L	P
01 Kep. Mentawai *	-	-	-	-	-	-
02 Pesisir Selatan	94.98	89.29	73.99	75.04	88.70	89.87
03 Solok	73.30	76.02	49.88	62.32	76.74	81.75
04 Swi / Sijunjung	66.67	91.20	57.51	66.70	75.51	86.84
05 Tanah Datar	76.10	88.40	61.66	70.70	85.37	90.20
06 Padang Pariaman	93.72	81.09	64.80	58.91	88.80	86.80
07 Agam	83.09	85.20	59.03	65.13	87.14	93.81
08 Limapuluh Kota	78.33	88.57	50.71	65.07	79.87	85.37
09 Pasaman	60.75	67.92	44.07	53.62	81.36	86.94
71 Padang	97.14	101.42	68.22	74.05	90.79	92.18
72 Solok	77.43	116.44	58.80	78.79	92.34	95.05
73 Sawahlunto	90.75	98.21	65.32	82.94	78.60	98.21
74 Padang Panjang	101.29	105.76	81.41	74.35	95.05	93.59
75 Bukittinggi	83.87	98.48	65.21	71.60	90.58	96.97
76 Payakumbuh	84.00	99.30	66.70	75.03	86.76	93.25
<b>Sumatra Barat</b>	<b>81.02</b>	<b>87.11</b>	<b>59.47</b>	<b>66.59</b>	<b>84.46</b>	<b>88.96</b>

Keterangan : \*). Masih tergabung dengan Kab. Padang Pariaman  
Sumber : Susenas 2000 – 2003, BPS Prov. Sumatra Barat

## Lampiran 9 :

**APK, APM, dan APS Penduduk Usia 16 – 18 Tahun  
Provinsi Sumatra Barat, Tahun 2000**

Kabupaten / Kota	APK		APM		APS	
	L	P	L	P	L	P
01 Kep. Mentawai *	-	-	-	-	-	-
02 Pesisir Selatan	52.37	59.54	40.73	49.13	56.40	64.51
03 Solok	56.68	51.92	40.48	42.56	58.40	54.58
04 Swi / Sijunjung	37.98	48.18	27.79	34.00	38.94	47.78
05 Tanah Datar	60.59	78.32	52.06	58.40	64.95	68.41
06 Padang Pariaman	63.45	67.22	42.38	52.02	72.81	64.92
07 Agam	66.66	70.26	44.04	57.65	59.94	75.04
08 Limapuluh Kota	47.26	48.71	33.57	42.53	50.14	60.51
09 Pasaman	34.07	56.73	17.60	43.05	36.43	53.60
71 Padang	89.67	86.73	64.49	64.92	77.59	82.97
72 Solok	83.17	79.28	62.43	62.59	71.57	83.48
73 Sawahlunto	57.77	92.85	46.13	68.55	58.88	71.67
74 Padang Panjang	73.29	92.67	59.70	78.46	72.97	87.76
75 Bukittinggi	81.30	91.23	66.67	74.53	73.99	85.06
76 Payakumbuh	81.09	98.49	58.46	77.34	69.99	85.93
<b>Sumatra Barat</b>	<b>61.82</b>	<b>68.24</b>	<b>44.36</b>	<b>53.32</b>	<b>60.66</b>	<b>67.56</b>

*Keterangan : \*). Masih tergabung dengan Kab. Padang Pariaman  
Sumber : Susenas 2000 – 2003, BPS Prov. Sumatra Barat*

## Lampiran 10 :

**APK, APM, dan APS Penduduk Usia 7 – 12 Tahun  
Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2001**

Kabupaten / Kota		APK		APM		APS	
		L	P	L	P	L	P
01	Kep. Mentawai	111.89	113.67	94.75	95.26	95.78	96.43
02	Pesisir Selatan	108.90	104.30	92.07	94.59	94.04	95.67
03	Solok	104.49	108.83	93.26	93.04	94.16	95.84
04	Swl / Sijunjung	102.61	110.52	87.19	93.66	90.66	95.40
05	Tanah Datar	106.87	102.67	93.76	95.33	95.00	98.00
06	Padang Pariaman	112.33	111.33	93.43	93.45	93.98	95.97
07	Agam	114.77	108.72	96.65	93.82	98.85	97.58
08	Limapuluh Kota	114.49	105.28	94.01	95.57	95.71	97.07
09	Pasaman	110.42	112.11	95.40	95.34	96.42	95.86
71	Padang	109.09	108.77	94.18	92.94	98.16	98.52
72	Solok	113.49	107.23	91.17	93.19	97.35	99.08
73	Sawahlunto	103.94	105.32	89.81	90.97	98.52	100.00
74	Padang Panjang	107.78	97.27	89.18	89.42	98.12	97.53
75	Bukittinggi	111.64	112.32	97.26	93.48	99.32	99.28
76	Payakumbuh	113.32	116.31	97.34	98.00	98.54	99.33
<b>Sumatra Barat</b>		<b>109.34</b>	<b>108.64</b>	<b>93.56</b>	<b>94.08</b>	<b>95.68</b>	<b>96.84</b>

*Sumber : Susenas 2000 – 2003, BPS Prov. Sumatera Barat*



## Lampiran 11 :

**APK, APM, dan APS Penduduk Usia 13 – 15 Tahun  
Provinsi Sumatra Barat, Tahun 2001**

Kabupaten / Kota	APK		APM		APS	
	L	P	L	P	L	P
01 Kep. Mentawai	86.85	66.20	50.46	52.66	80.46	90.81
02 Pesisir Selatan	76.19	88.88	59.41	72.21	83.14	86.65
03 Solok	71.67	86.32	51.49	63.41	76.24	84.18
04 Swi / Sijunjung						
05 Tanah Datar	82.39	101.31	67.99	75.19	84.49	92.12
06 Padang Pariaman	78.67	86.51	61.44	61.02	85.79	90.01
07 Agam	79.76	94.97	61.57	69.24	89.83	92.48
08 Limapuluh Kota	69.55	96.41	59.40	78.32	83.08	88.65
09 Pasaman	58.73	52.18	48.69	45.00	75.52	72.95
71 Padang	102.09	101.96	72.26	74.07	92.83	95.60
72 Solok	90.20	84.58	59.43	69.23	83.71	96.41
73 Sawahlunto	100.58	89.33	66.18	69.06	87.57	93.73
74 Padang Panjang	91.68	85.54	64.60	66.74	86.69	96.25
75 Bukittinggi	83.95	98.18	59.26	60.00	86.42	92.73
76 Payakumbuh	82.50	91.33	61.55	72.67	85.62	95.06
<b>Sumatra Barat</b>	<b>79.77</b>	<b>86.06</b>	<b>59.92</b>	<b>65.26</b>	<b>83.74</b>	<b>88.04</b>

*Sumber : Susenas 2000 – 2003, BPS Prov. Sumatra Barat*

Lampiran 12 :

**APK, APM, dan APS Penduduk Usia 16 – 18 Tahun  
Provinsi Sumatra Barat, Tahun 2001**

Kabupaten / Kota		APK		APM		APS	
		L	P	L	P	L	P
01	Kep. Mentawai	26.57	25.48	17.22	16.30	56.03	34.66
02	Pesisir Selatan	37.50	56.15	24.97	50.47	42.45	67.73
03	Solok	32.09	52.67	19.39	42.38	41.79	64.39
04	Swi / Sijunjung	31.38	24.55	22.51	15.30	43.76	26.36
05	Tanah Datar	64.57	80.72	51.28	67.05	68.93	82.56
06	Padang Pariaman	64.47	67.39	44.61	58.04	66.49	78.75
07	Agam	62.20	72.98	37.80	61.33	55.71	82.99
08	Limapuluh Kota	52.10	64.62	42.80	56.47	48.11	72.10
09	Pasaman	31.84	54.63	26.05	43.74	34.30	50.90
71	Padang	69.16	83.46	48.55	68.02	72.00	82.98
72	Solok	76.26	95.00	55.63	75.32	71.68	79.05
73	Sawahlunto	73.14	88.96	52.17	64.48	66.70	71.69
74	Padang Panjang	97.49	116.21	70.34	74.09	79.98	81.50
75	Bukittinggi	77.94	75.26	58.09	60.82	72.79	74.23
76	Payakumbuh	86.40	86.18	59.10	66.29	72.55	79.18
<b>Sumatra Barat</b>		<b>53.88</b>	<b>66.57</b>	<b>38.30</b>	<b>54.61</b>	<b>56.01</b>	<b>70.31</b>

Sumber : Susenas 2000 – 2003, BPS Prov. Sumatra Barat

## Lampiran 13 :

**APK, APM, dan APS Penduduk Usia 7 – 12 Tahun  
Provinsi Sumatra Barat, Tahun 2002**

Kabupaten / Kota		APK		APM		APS	
		L	P	L	P	L	P
01	Kep. Mentawai	111.52	113.75	96.61	95.01	97.41	96.43
02	Pesisir Selatan	104.11	103.29	94.04	93.18	97.10	97.17
03	Solok	108.02	109.72	96.55	94.85	97.55	95.36
04	Swi / Sijunjung	98.51	105.88	90.08	91.98	91.33	93.89
05	Tanah Datar	98.58	104.17	92.30	93.76	97.21	97.92
06	Padang Pariaman	101.27	101.36	89.61	89.14	95.49	97.23
07	Agam	106.30	105.49	92.38	92.37	96.22	96.80
08	Limapuluh Kota	105.13	104.68	95.28	92.32	98.56	97.81
09	Pasaman	102.06	100.85	88.24	92.97	89.89	93.83
71	Padang	106.19	101.96	92.64	91.11	98.16	97.83
72	Solok	104.71	98.43	89.42	88.92	94.19	99.23
73	Sawahlunto	102.92	96.69	93.38	87.22	98.27	98.74
74	Padang Panjang	101.50	99.92	94.05	86.88	97.03	99.13
75	Bukittinggi	106.27	110.68	92.37	93.96	99.31	98.49
76	Payakumbuh	112.95	100.08	94.33	90.84	98.71	98.69
<b>Sumatra Barat</b>		<b>104.11</b>	<b>103.91</b>	<b>92.38</b>	<b>92.22</b>	<b>95.86</b>	<b>96.48</b>

*Sumber : Susenas 2000 – 2003, BPS Prov. Sumatra Barat*

## Lampiran 14

**APK, APM, dan APS Penduduk Usia 13 – 15 Tahun  
Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2002**

Kabupaten / Kota	APK		APM		APS	
	L	P	L	P	L	P
01 Kep. Mentawai	71.89	50.74	48.24	41.80	79.87	75.92
02 Pesisir Selatan	101.51	104.92	67.94	75.56	82.50	85.53
03 Solok	59.81	75.30	46.56	58.29	69.26	86.57
04 Swi / Sijunjung	59.24	68.61	39.76	55.14	57.02	75.24
05 Tanah Datar	96.94	97.65	70.77	81.58	90.79	94.24
06 Padang Pariaman	93.18	110.95	62.29	70.88	78.50	91.67
07 Agam	95.14	90.61	68.84	66.15	88.77	92.93
08 Limapuluh Kota	89.69	102.22	74.35	64.01	83.21	80.00
09 Pasaman	70.60	83.40	53.23	70.84	77.78	83.40
71 Padang	90.69	108.63	68.94	78.72	92.06	93.77
72 Solok	105.54	106.81	78.51	75.88	91.96	98.27
73 Sawahlunto	101.24	118.48	75.53	72.75	88.82	92.64
74 Padang Panjang	91.10	101.48	79.09	75.37	88.61	98.30
75 Bukittinggi	92.78	95.03	69.63	77.04	89.86	96.70
76 Payakumbuh	100.32	105.52	69.03	77.00	95.45	96.03
<b>Sumatra Barat</b>	<b>85.01</b>	<b>93.84</b>	<b>62.15</b>	<b>69.77</b>	<b>81.63</b>	<b>88.38</b>

*Sumber : Susenas 2000 – 2003, BPS Prov. Sumatera Barat*

Lampiran 15 :

APK, APM, dan APS Penduduk Usia 16 – 18  
Tahun  
Provinsi Sumatra Barat, Tahun 2002

Kabupaten / Kota		APK		APM		APS	
		L	P	L	P	L	P
01	Kep. Mentawai	16.39	15.25	12.20	9.66	33.32	18.32
02	Pesisir Selatan	52.59	68.68	42.65	56.56	62.87	74.05
03	Solok	46.63	55.12	34.82	42.99	43.32	62.02
04	Swi / Sijunjung	15.33	34.59	10.71	26.79	27.98	40.46
05	Tanah Datar	67.17	79.25	50.71	59.76	64.40	70.16
06	Padang Pariaman	51.80	59.43	44.84	45.25	57.29	70.70
07	Agam	62.23	78.29	48.96	57.55	65.62	73.58
08	Limapuluh Kota	48.16	49.66	43.80	42.62	52.54	60.50
09	Pasaman	48.59	39.57	38.27	37.42	51.35	48.59
71	Padang	93.98	86.49	65.26	64.96	74.53	91.18
72	Solok	68.03	98.79	49.95	78.70	63.42	90.63
73	Sawahlunto	62.58	93.10	50.56	74.12	65.88	85.88
74	Padang Panjang	87.55	100.29	70.50	75.60	76.30	81.86
75	Bukittinggi	88.19	84.52	65.94	69.02	73.39	78.74
76	Payakumbuh	90.10	88.61	64.12	70.56	77.04	81.81
	<b>Sumatra Barat</b>	<b>59.39</b>	<b>66.02</b>	<b>45.60</b>	<b>51.89</b>	<b>58.64</b>	<b>69.26</b>

Sumber : Susenas 2000 – 2003, BPS Prov. Sumatra Barat

MILIK PERPUSTAKAAN  
UNIV. NEGERI PADANG  
130

## Lampiran 16 :

**APK, APM, dan APS Penduduk Usia 7 – 12 Tahun  
Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2003**

Kabupaten / Kota		APK		APM		APS	
		L	P	L	P	L	P
01	Kep. Mentawai	113.58	114.77	97.01	96.60	98.80	98.64
02	Pesisir Selatan	107.87	105.22	90.40	90.99	94.95	97.30
03	Solok	110.67	108.18	92.31	94.36	94.77	96.71
04	Swi / Sijunjung	106.31	104.51	92.92	91.48	96.92	95.04
05	Tanah Datar	105.70	102.78	93.04	95.14	96.20	98.61
06	Padang Pariaman	101.24	101.72	90.21	86.72	95.17	93.66
07	Agam	99.65	101.72	92.53	93.64	95.43	97.61
08	Limapuluh Kota	101.74	102.66	91.70	94.02	96.54	97.34
09	Pasaman	110.49	107.81	97.43	97.51	98.42	99.09
71	Padang	107.07	102.33	89.92	91.46	97.51	98.16
72	Solok	105.36	107.69	91.11	92.31	94.86	98.08
73	Sawahlunto	110.21	103.85	91.82	91.06	98.49	99.21
74	Padang Panjang	99.05	106.96	90.43	92.01	98.57	96.44
75	Bukittinggi	99.10	105.25	87.03	92.01	97.40	100.00
76	Payakumbuh	96.08	106.13	88.85	92.38	98.62	99.26
<b>Sumatra Barat</b>		<b>105.79</b>	<b>104.66</b>	<b>92.22</b>	<b>92.98</b>	<b>96.52</b>	<b>97.38</b>

*Sumber : Susenas 2000 – 2003, BPS Prov. Sumatera Barat*

## Lampiran 17 :

**APK, APM, dan APS Penduduk Usia 13 – 15 Tahun  
Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2003**

Kabupaten / Kota	APK		APM		APS	
	L	P	L	P	L	P
01 Kep. Mentawai	102.45	92.75	69.17	61.21	96.10	98.23
02 Pesisir Selatan	94.63	90.29	66.11	73.61	83.52	92.99
03 Solok	63.83	80.04	48.39	58.95	79.28	88.77
04 Swl / Sijunjung	65.11	74.80	46.06	60.22	65.81	78.87
05 Tanah Datar	82.26	103.15	73.40	82.53	87.34	93.64
06 Padang Pariaman	85.93	84.46	64.06	57.93	86.53	82.33
07 Agam	97.33	99.61	79.64	69.99	93.09	84.72
08 Limapuluh Kota	76.56	92.63	50.79	69.51	73.38	92.63
09 Pasaman	77.47	82.23	62.61	66.12	83.12	84.44
71 Padang	106.84	102.63	75.11	74.01	94.41	94.60
72 Solok	75.33	98.87	59.54	76.77	80.72	91.88
73 Sawahlunto	99.11	97.63	64.89	70.20	88.80	91.23
74 Padang Panjang	109.96	91.41	77.22	71.53	95.91	100.00
75 Bukittinggi	94.71	95.54	68.36	64.41	87.74	95.54
76 Payakumbuh	103.11	92.75	67.58	75.88	91.94	95.90
<b>Sumatra Barat</b>	<b>85.82</b>	<b>90.09</b>	<b>64.21</b>	<b>67.96</b>	<b>84.78</b>	<b>88.81</b>

*Sumber : Susenas 2000 – 2003, BPS Prov. Sumatera Barat*

## Lampiran 18 :

**APK, APM, dan APS Penduduk Usia 16 – 18 Tahun  
Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2003**

Kabupaten /	APK		APM		APS	
	L	P	L	P	L	P
01 Kep. Mentawai	43.03	37.19	29.56	27.81	56.61	51.77
02 Pesisir Selatan	47.72	72.11	38.89	61.30	58.42	68.32
03 Solok	39.90	59.05	30.68	46.78	41.41	64.16
04 Swi / Sijunjung	38.86	36.06	31.71	31.19	41.88	42.53
05 Tanah Datar	68.77	72.71	53.13	63.63	56.25	74.02
06 Padang Pariaman	62.48	72.05	44.72	53.59	58.73	67.72
07 Agam	71.79	68.26	49.34	59.22	61.63	78.08
08 Limapuluh Kota	49.26	50.41	40.01	36.74	55.37	48.70
09 Pasaman	40.15	44.39	31.20	34.03	44.05	45.73
71 Padang	77.32	93.94	63.11	73.19	78.85	87.34
72 Solok	81.61	88.91	59.72	76.38	67.54	85.17
73 Sawahlunto	65.51	91.72	43.98	68.64	64.20	78.93
74 Padang Panjang	104.75	111.65	71.11	73.90	80.47	89.15
75 Bukittinggi	105.21	95.99	73.35	70.25	81.69	85.14
76 Payakumbuh	86.94	90.80	61.30	66.45	73.39	72.75
<b>Sumatra Barat</b>	<b>58.46</b>	<b>69.37</b>	<b>44.82</b>	<b>54.92</b>	<b>58.22</b>	<b>68.21</b>

*Sumber : Susenas 2000 – 2003, BPS Prov. Sumatera Barat*